

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Arti Perencanaan .....	1
Makna Pembangunan .....	2
Perlunya Perencanaan .....	4
Tujuan dan Unsur Perencanaan .....	5
<b>BAB II. BERBAGAI MACAM PERENCANAAN .....</b>	<b>7</b>
Perencanaan menurut jangka waktu .....	8
Perencanaan berdasarkan sistim ekonomi .....	10
Perencanaan berdasarkan cara pelaksanaannya .....	14
<b>BAB III. KARAKTERISTIK, KEMISKINAN NEGARA BERKEMBANG, FAKTOR DAN PERSYARATAN DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>16</b>
Karakteristik Negara Berkembang .....	16
Kemiskinan Negara Berkembang .....	18
Faktor dasar perencanaan pembangunan .....	21
Persyaratan dasar pembangunan ekonomi .....	27
<b>BAB IV. TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>33</b>
Teori Marx .....	24
Teori Adam Smith .....	44
Teori Rostow .....	45
Teori Harrod-Domar .....	53
Teori Schumpeter dan Solow Swan .....	56
Teori Myrdal .....	58
Teori Keynes .....	68
<b>BAB V. MODEL PERENCANAAN EKONOMI .....</b>	<b>76</b>
Model Input-Output .....	76
Model capital output ratio (COR) dan Incremental Capital output ratio .....	86
<b>BAB VI. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR .....</b>	<b>90</b>
Pendekatan kebutuhan dasar .....	91
Implikasi strategi kebutuhan dasar .....	93
Munculnya pendekatan kebutuhan dasar .....	94

Konsep dan ciri pendekatan kebutuhan dasar .....	96
Kebijakan kebutuhan dasar .....	98
Ekonomi Indonesia dan Strategi kebutuhan dasar .....	99
<b>BAB VII. PERENCANAAN EKONOMI DAERAH .....</b>	<b>103</b>
Paradigma pembangunan ekonomi daerah .....	103
Integrasi ekonomi daerah .....	104
Dasar penetapan integrasi ekonomi daerah .....	107
Pengembangan ekonomi basis .....	109
Keunggulan Komparatif dan Location Question .....	110
Strategi Pembangunan ekonomi daerah .....	113
Kebijakan mengatasi disparitas antara daerah .....	116
Teori Lokasi Industri .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

# **EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

**DR. JUNAIDDIN ZAKARIA, SE.,MS.**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah Penulis dapat menyusun Buku Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Buku ini disusun dengan mendapat inspirasi dari para pakar Ilmu Ekonomi. Walaupun disadari oleh Penulis bahwa buku ini masih belum sempurna. Karena itu penulis masih sangat terbuka untuk menerima masukan, saran-saran dan kritikan dari para pembaca.

Buku ini disusun sebagai referensi untuk memenuhi kebutuhan para Akademisi, Praktisi atau para pengambil kebijakan dalam menyusun Perencanaan Pembangunan. Buku ini juga dapat digunakan oleh Mahasiswa yang belajar Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Untuk membantu para pembaca memahami isi buku ini, penulis menggunakan bahasa verbal, peralatan matematika, angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel agar para pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari buku Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan.

Semoga dapat memberi manfaat bagi para pembaca, Mahasiswa, Akademisi, para Praktisi yang membaca buku ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca jika Buku ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan yang sekarang ini semakin maju dengan pesat. Tidak ada yang sempurna, hanya Sang Penciptalah yang memiliki kesempurnaan.

Makassar, Mei 2015

Penulis,

**DR. JUNAIDDIN ZAKARIA, SE.,MS.**

# EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

## DR. JUNAIDDIN ZAKARIA, SE.,MS.

### BAB I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangunan dan perencanaan pembangunan adalah gejala baru bagi Negara-negara terbelakang, yang umumnya baru merdeka setelah Perang Dunia II. Negara-negara terbelakang tersebut diperhadapkan dengan berbagai konsep pendekatan dan teori pembangunan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Tidak dapat disangkal bahwa konsep-konsep tersebut mempunyai latar belakang politik, ideology dan kebudayaan tertentu, walaupun para konseptornya mungkin tidak mengemukakan faktor-faktor subyektif tersebut, sehingga konsepnya kelihatan “obyektif” Baik konsep-konsep liberal maupun konsep-konsep komunis dimunculkan sebagai jalan keluar yang terbaik bagi pembangunan Negara-negara terbelakang.

Disini kita akan memperbandingkan teori-teori pembangunan, sebagai alternatif-alternatif yang diperhadapkan kepada Negara-negara terbelakang. Alasan-alasan memperbandingkan teori ini ialah : **Pertama**, Teori-teori tersebut berbicara tentang pembangunan Negara-negara terbelakang. **Kedua**, teori-teori tersebut melihat pembangunan sebagai proses yang dialami masyarakat sebagai suatu sistem sosial, proses mana berlangsung secara circular causation antara faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor non-ekonomis.

#### Arti Perencanaan

Bintoro Tjokroamidjojo (tahun 1981), memberi definisi perencanaan sebagai berikut: **Pertama**, Perencanaan dalam arti yang luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. **Kedua**, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber ada agar penggunaan lebih efisien dan efektif. **Ketiga**, perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan

oleh siapa. **Keempat**, perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Dari beberapa arti perencanaan, Penulis dapat mengemukakan arti perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang tersedianya terbatas agar dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif dalam pembangunan, untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang diinginkan. Perencanaan pembangunan selalu melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

### **Makna Pembangunan**

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat di artikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah sebagai pencapaian aspirasi setiap warga masyarakat. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit di artikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

Menurut Todaro (2000) pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (*sustenance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih.

Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual .

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual .

Dengan demikian pembangunan ekonomi adalah suatu proses pengarahan kepada terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi(*equity*) dan pertumbuhan yang keberlanjutan (*sustainability*). Proses pembangunan tersebut harus disusun secara sengaja dan terencana sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya dalam jangka panjang. Menurut Penulis Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau suatu system sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Hasrat untuk membangun Negara-negara miskin memperlihatkan keinginan yang besar untuk berkembang maju. Hal tersebut sangat beralasan karena mereka berada pada kondisi miskin, sebagaimana mereka hidup dalam kemelaratan dan penderitaan. Ketiadaan pangan, perumahan, mereka sakit dan lapar. Mereka sangat wajar berkeinginan membangun untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Perekonomian dunia terbagi dua, sebagian miskin sebagiannya lagi terus menerus bertambah kaya. Kondisi tersebut akan memicu terjadinya konflik antara Negara, antara bangsa didunia. Negrara-negara berkembang akan semakin sulit bila Negara ini tidak mendapat perhatian dari dunia.

### **Perlunya Perencanaan.**

Bintoro Tjokroamidjojo (**tahun 1981**) mengemukakan perlunya perencanaan dalam pembangunan ekonomi adalah ;

- 1). Penggunaan sumber daya ekonomi agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
- 2). Perencanaan dilakukan dalam rangka perubahan struktur ekonomi dan sosial
- 3). Perencanaan diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial
- 4). Dengan perencanaan dapat membuat skala prioritas pembangunan
- 5). Sebagai pedoman atau patron pelaksanaan pembangunan
- 6). Sebagai alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan
- 7). Perencanaan dapat memperkirakan potensi-potensi, prospek, hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi
- 8). Dengan adanya perencanaan dapat memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif untuk cara yang terbaik mengelola pembangunan.
- 9). Penanggulangan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan besar karena ekonomi pasar tidak dapat dengan cepat menciptakan stabilitas ekonomi.

Arthur Lewis (1950), mengemukakan bahwa perencanaan bagi negara-negara berkembang didasarkan pada alasan ;

- 1). Ideologi politik, negara-negara baru berkembang dulu cenderung menganut falsafah masyarakat sosialis
- 2). Belum sempurnahnya mekanisme pasar
- 3). Melakukan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri
- 4). Tingkat investasi yang masih rendah, karena itu perlu adanya perencanaan.
- 5). Belum berkembangnya kemampuan kewirausahaan (enterpreneur)
- 6). Kemampuan teknologi masih lemah



### **Tujuan Perencanaan Pembangunan;**

- 1). Ingin menciptakan pembagian pendapatan yang adil dan merata
- 2). Ingin menciptakan pertumbuhan yang cepat dan stabil
- 3). Ingin menciptakan kesempatan kerja yang cepat dan merata
- 4). Menciptakan stabilitas harga

### **Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan.**

Bintoro Tjokroamidjojo (1981), mengemukakan unsur-unsur perencanaan pembangunan adalah :

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut arah, tujuan dan prioritas pembangunan

Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.

Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah penetapan tujuan-tujuan rencana (*development objectives* atau *plan objectives*).

Mengenai perumusan tujuan perencanaan ini dapat dikemukakan hal-hal berikut :

- (1). Perumusan tujuan perencanaan/pembangunan merupakan prasyarat bagi penentuan strategi yang baik untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan kepada alokasi keperluan investasi yang menunjang pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
- (2). Perumusan atau penetapan tujuan perencanaan/pembangunan tergantung dari :
  - (a) preferensi-preferensi nasional atau pilihan-pilihan nasional yang didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut di bidang politik, sosial dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan;
  - (b) tingkat perkembangan pembangunan (stage of development).

Negara-negara sosialis akan memilih tujuan-tujuan rencana/pembangunan yang mungkin berbeda dengan negara-negara demokrasi liberal. Negara-negara yang sedang berkembang mungkin memilih tujuan rencana/pembangunan yang berbeda dengan negara-negara yang relatif maju.

- (3). Dalam pemilihan dan penentuan tujuan-tujuan rencana/pembangunan seringkali terdapat kelemahan yaitu dengan adanya tujuan-tujuan yang saling bersaing. Misalnya tujuan menaikkan pendapatan nasional dengan tujuan pembagian pendapatan yang lebih merata. Misal yang lain adalah tujuan pembangunan sektor industri dengan teknologi tinggi bersaing dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja. Demikian pula sering terjadi kelemahan mencampurkan antara tujuan-tujuan yang bersifat lebih kualitatif dengan sasaran-sasaran rencana yang lebih bersifat kuantitatif.
  - (4) Penetapan tujuan rencana/pembangunan pada umumnya perlu merupakan suatu putusan politik. Karena tujuan perencanaan/pembangunan nasional hendaknya merupakan hasil pendapat atau penyatuan pendapat politik, ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Walaupun perumusannya harus melalui perhitungan berbagai alternatif tentang prioritas-prioritas, sumber-sumber, kemungkinan dapat dicapainya, yang semuanya itu direncanakan oleh para perencana.
  - (5) perkembangan akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan untuk memperluas tujuan-tujuan rencana/pembangunan, tidak hanya menyangkut bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
- b. Kerangka rencana, sering disebut sebagai kerangka makrorencana. Kerangka ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasinya.
  - c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan. Khususnya adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha pembangunan, karena itu perlu diperkirakan secara seksama.

- d. Kerangka kebijakan yang konsisten. Perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang serasi dan konsisten seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter kebijakan harga, dan kebijakan mengatasi pengangguran.
- e. Program investasi. Program investasi dilakukan secara sektoral seperti investasi pada sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan, sektor pendidikan, sektor perumahan dll. Penyusunan program investasi dan sasaran rencana pembangunan diserasikan dengan kemungkinan pembiayaannya secara wajar. Tiga pertimbangan yang perlu dilakukan dalam program investasi yaitu :
  - (1) Konsistensi dan saling mendukung antara program-program dan proyek-proyek investasi;
  - (2) Penetapan skala prioritas secara tajam;
  - (3) Menjamin proses pertumbuhan ekonomi
  - (4) Menjamin pemerataan pendapatan
  - (5) Menjamin kesempatan kerja yang luas.
- f. Administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan untuk menjamin proses perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga perencanaan yang dilakukan secara integral antara satu sektor dengan sektor lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan.

## **BAB II. BERBAGAI MACAM PERENCANAAN**

Menurut Timbergen (tahun 1867) Perencanaan mempunyai fungsi ;

Pertama; dengan menyusun rencana-rencana yang dapat dibagi kedalam beberapa macam perencanaan.

Kedua ; dengan adanya perencanaan diperlukan adanya penelitian pendahuluan untuk menjadi bahan acuan untuk membuat rencana.

Ketiga ; dengan perencanaan dapat menyusun peraturan-peraturan dan mempersiapkan data-data baku bagi badan-badan perencanaan yang lebih rendah tingkatnya.

Keempat; sebagai pedoman dalam member nasehat dan laporan mengenai segi-segi

Kelima ; perencanaan mempunyai untuk melakukan pengawasan terhadap badan perencanaan agar menjalankan tugas sesuai dengan variable-variabel dan **indicator** perencanaan.

### **Perencanaan menurut jangka waktu**

#### **A. Perencanaan Jangka Panjang (Perencanaan Perspektif)**

Perencanaan prespektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun (Arsyad L. tahun 1993). Pada hakekatnya, rencana prespektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tetapi, rencana prespektif bukan berarti satu rencana untuk keseluruhan jangka waktu 15 atau 20 tahun tersebut. Pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dalam membagi rencana prespektif itu kedalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Tujuan pokok rencana prespektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek sehingga masalah-masalah yang harus di selesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka menengah dan jangka pendek.

Menurut Tinbergen (tahun 1976), orang dapat mengungkapkan di dalam rencana prespektif, kekuatan-kekuatan yang dampaknya dapat diperkirakan dengan agak pasti dalam jangka panjang. Ini meliputi pertumbuhan penduduk, pengaruh pendidikan, yang hanya tampak dalam jangka panjang dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor yang peka terhadap perubahan seperti hasil panen yang tergantung pada cuaca dan faktor lain yang peka terhadap fluktuasi yang tidak teratur, tidak dapat dan mungkin tidak perlu dipertimbangkan

### **B. Perencanaan Jangka Menengah**

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4–6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, Sasaran dalam kelompok besar (perencanaan sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. Seperti Repelita atau Rencana Pembangunan lima tahun (Arsyad L. tahun 1993).

Rencana jangka menengah sebagian besar dari investasi selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasil. Salah satu keuntungan dari rencana lima tahun adalah dapat di gambarkan hal-hal yang dapat dicapai selama masa transisi, dan juga hal-hal yang dapat dicapai sesudah masa transisi.

### **C. Perencanaan Jangka Pendek**

**Fungsi** utama rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah **adalah** menguraikan tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan perencanaan jangka pendek bertugas untuk menetapkan cara pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Perencanaan jangka pendek dituangkan dalam bentuk rencana-rencana proyek investasi yang konkrit. Rencana jangka pendek mempunyai Rentang waktu 1 tahun. Biasa dikenal dengan rencana operasional tahunan (Arsyad L). Rencana jangka pendek lebih akurat, lebih mudah melihat masa depannya daripada dalam jangka yang lebih panjang. Oleh karena itu, dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibanding perencanaan jangka panjang.

Setiap rencana biasa dibagi menjadi rencana sektoral dan rencana regional. Rencana regional meliputi wilayah, daerah, dan lokal yang selanjutnya dipecah menjadi rencana sektoral untuk pertanian, industri, perdagangan luar negeri, transportasi dan sebagainya. Rencana sektoral dibagi lagi menjadi subrencana berikutnya untuk masing-masing cabang seperti, rencana produksi pangan, rencana produksi semen, rencana ekspor, dan sebagainya.

## **Perencanaan Berdasarkan Sistem Ekonomi**

### **A. Perencanaan dalam ekonomi Kapitalis**

Ekonomi pasar bebas menurut Lewis (tahun 1950) cenderung mengawasi produksi dan distribusi untuk kepentingan umum. Negara tidak campur tangan dalam perencanaan ekonomi. Menurut Adam Smith Negara hanyalah mengurus pertahanan Negara, pendidikan, pengadilan, dan membuat infrastruktur yang mendukung jalannya roda ekonomi.

Namun menurut Lewis, ekonomi kapitalis yang dikenal dengan ekonomi pasar bebas telah membawa banyak masalah yaitu ;

Pertama ; pendapatan tidak dibagikan secara adil barang-barang yang kurang mendesak dibuat untuk orang kaya, sedangkan orang miskin kekurangan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan.

Kedua ; ekonomi pasar bebas tidak mempertimbangkan hubungan upah buruh yang manusiawi.

Ketiga; ekonomi pasar bebas cenderung menciptakan ketidak stabilan ekonomi

Keempat ; ekonomi pasar bebas tidak efektif menghadapi perubahan besar dalam perekonomian dunia.

Keenam ; ekonomi pasar bebas itu boros, karena harus memaksa produsen memperbaiki teknik produksi dalam menghadapi persaingan.

Arsyad L. (1993), Perencanaan dalam sistem kapitalisme tidak didasarkan pada rencana yang terpusat (central plan). Dengan tiadanya rencana pusat, maka alat-alat produksi biasa dimiliki secara pribadi. Produksi juga dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Ditentukan oleh kekuatan pasar dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dibawah sistem

perencanaan kapitalis, lembaga-lembaga milik swasta, perusahaan swasta dan mekanisme harga selalu bekerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dengan ekonomi kapitalis menjalankan 3 fungsi: (1) menganbil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga agar permintaan agregat tidak terlalu kecil atau terlalu besar sehingga terhindar dari resesi dan inflasi. Untuk itu, pemerintah mengatur segala kegiatan perusahaan swasta. Pemerintah mendirikan lembaga kredit dan moneter, dan menerapkan kebijaksanaan fiskal sesuai dengan situasi ekonomi negara; (2) mencegah pemusatan monopoli. Didalam kapitalisme, monopoli mengganggu mekanisme negara. Untuk mempertahankan harga (monopoli membatasi output sehingga sumber daya yang digunakan lebih kecil). Untuk mencegah monopoli dan praktek monopolistik, pemerintah menerapkan kebijaksanaan anti-monopolistik dan bahkan menasionalisasi beberapa perusahaan monopolistik demi kepentingan masyarakat seluruhnya; (3) mengambil langkah-langkah begi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kesehatan masyarakat, pengendalian banjir, dan sebagainya. Semua kegiatan pemerintah tidak dikoordinasi oleh rencana terpusat apapun.

Jadi perencanaan dalam kapitalisme dibatasi pada kegiatan pemerintah yang sifatnya mengatur yang sedemikian rupa untuk menghindari resesi dan inflasi, untuk mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan kualitas kehidupan rakyat, dan untuk menciptakan kondisi demi kelancaran fungsi mekanisme harga dengan kadar persaingan yang memadai.

## **B. Perencanaan dalam ekonomi Sosialis**

Arsyad L. (1993), Perencanaan dalam sosialisme didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada pengusaha atau badan perencanaan pusat yang merumuskan rencana bagi keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah diletakkan dalam rencana selam jangka waktu yang yang ditetapkan pemerintah mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana. Masalah-masalah pokok perekonomian mengenai apa dan berapa banyak barang/ jasa yang akan di produksi, bagaimana, bila, dan untuk siapa barang/ jasa tersebut di alokasikan, semuanya diputuskan oleh badan tersebut.

Rencana pusat memuat semua tujuan sosioekonomi secara pasti. Tujuan untuk mencakup: permintaan agregat, tingkat pengerjaan penuh, pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi faktor-faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal, atau pembangunan ekonomi, dan sebagainya.

Produksi diberbagai sektor perekonomian ditentukan berdasarkan prioritas dan sasaran rencana. Produksi barang-barang konsumsi pada umumnya ditentukan berdasarkan keinginan konsumen dan barang-barang yang tersedia didistribusikan kepada mereka dengan harga yang pasti. Didalam perencanaan sosialis, kedaulatan konsumen hanya dibatasi pada pemilihan barang-barang yang secara sosial bermanfaat dan oleh badan perencanaan di anggap tepat untuk diproduksi dan disediakan untuk masyarakat. Proses penentuan harga dibawah perencanaan sosialis tidak berjalan secara bebas tapi mereka dibawah pengaturan dan pengawasan badan perencanaan pusat.

Perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar. Malahan, alat-alat produksi tersebut diawasi dan diatur oleh badan perencanaan dengan cara yang paling efisien. Dibawah perencanaan sosialis, badan perencanaan mampu menghindarkan kecenderungan deflasiomer dan inflasiomer melalui koordinasi yang lebih baik terhadap kegiatan berbagai satuan produksi dan memungkinkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia dengan sepenuhnya.

### **C. Perencanaan dalam Ekonomi Campuran**

**Arsyad L. (1993)**, Perencanaan campuran merupakan merupakan gabungan dari sistim kapitalis dan sosialis. Sistim ini bebas dari kejelekan kapitalis dan sosialis, tetpi mengambil kebaikan dari kedua ini. Pembangunan ekonomi dalam sistim perencanaan ini membagi perekonomian negara kedalam dua sektor ekonomi yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta.

Produksi barang dan jasa yang membutuhkan investasi, tapi laba yang rendah dan dengan masa petik hasil yang panjang, dioperasikan dibawah sektor pemerintah. Seperti angkutan kereta api, jalan raya, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, industri



pertahanan, industri logam, industri berat, dan sebagainya. Perusahaan Yang menguasai hajat hidup orang banyak diselenggarakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Sektor swasta mengelola sendiri apa yang mereka miliki, misalnya dibidang peternakan, industri dan perdagangan eceran. Demi kepentingan umum maka pemerintah mengatur kelangsungan hidup sektor ini dengan cara melakukan pembinaan, subsidi, fasilitas kredit, pembebasan pajak, dan sebagainya. Termasuk sektor yang didasarkan pada prinsip koperasi juga ada dalam perekonomian campuran.

Perencanaan dalam perekonomian campuran, memberikan semua kebebasan yang dikenal dalam kapitalisme, misalnya kebebasan berkonsumsi, kebebasan memproduksi, kebebasan bekerja, kebebasan memiliki dan sebagainya. Tetapi kebebasan ini tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Karena pemerintah yang membatasi kebebasan tersebut dengan peraturan dan pengawasan yang tepat terhadap kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi maupun distribusi penting untuk mencegah adanya penimbunan dan pemasaran yang dilakukan secara gelap. Bahkan pemerintah melakukan penjatahan bila terjadi kelangkaan barang, melakukan pengendalian terhadap milik swasta untuk menciptakan pemerataan, dan mencegah terjadinya monopoli terhadap kekuatan ekonomi. Mencegah adanya kekuasaan kapitalis yang berlebihan, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan tentang perburuhan misalnya pemerintah menetapkan upah minimum dan jam kerja para buruh. Dan jaminan sosial lainnya misalnya jaminan kesehatan, jaminan hari tua atau pensiun, dan sebagainya. Perencanaan dengan sistem campuran sangat cocok untuk negara-negara berkembang dengan tujuan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dinegara tersebut.

## **Perencanaan Berdasarkan Cara Pelaksanaannya**

### **A. Perencanaan Pusat (Centralistik)**

Proses perencanaan suatu negara dibawah badan perencanaan pusat. Pusat menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas untuk semua sektor ekonomi. Badan Perencanaan Pusat melakukan pengendalian terhadap perekonomian. Badan ini menetapkan keputusan investasi, harga semua produk, upah dari semua jenis pekerjaan. Sistem perencanaan ini disebut juga *top down planning*. Perencanaan dengan sistem ini sudah jelas bersifat kaku, tidak kebebasan ekonomi ditingkat daerah. Perencanaan melalui pusat kadang bertentangan dengan potensi ekonomi daerah.

### **B. Perencanaan Desentralistik**

**Desentralisasi ekonomi** yang merupakan ukuran tentang demokrasi ekonomi sangat penting dilaksanakan mengingat kondisi daerah diseluruh Indonesia tidak sama. Potensi daerah yang berbeda-beda membuat daerah kabupaten dan propinsi di Indonesia berkeinginan untuk membuat perencanaan ekonominya sendiri. Kecuali lima kegiatan departemen yaitu departemen agama, pertahanan, departemen luar negeri, kehakiman, dan departemen keuangan.

Smoke dan Lewis (tahun 1996) dan Bank dunia, dalam Megazine East Asia Economic, 2003) bahwa tolak ukur desentralisasi dapat diawasi perkembangannya (Tambunan,2010) adalah ;

Pertama ; sejauhmana desentralisasi telah memberikan perbaikan layanan publik yang lebih efisien dan merata dirasakan oleh masyarakat luas.

Kedua ; sejauhmana pemerintah lokal menata kelembagaan dan organisasi birokrasi menjalankan tugas untuk penguatan roda pemerintahan.

Ketiga ; apakah dirasakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Penerapan desentralisasi yang dilakukan melalui pemberian wewenang yang lebih luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kotamadya untuk membangun kemandirian ekonominya, tetapi harus tetap berpeoman pada aturan Negara

kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun pada kegiatan ekonomi tertentu diatur oleh pemerintah. Badan perencanaan pusat dan daerah memberi rangsangan kepada sektor swasta.

Desentralisasi ekonomi daerah perlu diiringi dengan perhatian untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut ;

Pertama ; mobilisasi sumberdaya dari ekonomi lokal dan luar yang terpadu.

Kedua ; optimisasi penggunaan fiscal yang diperoleh.

Ketiga ; menciptakan iklim usaha bagi berkembangnya sektor swasta sehingga dapat memperluas pembangunan ekonomi daerah.

Keempat; model pembangunan ekonomi daerah perlu menggambarkan kemampuan daerah untuk memilih program yang berdaya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu langkah strategis yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi secara desentralisasi adalah memfokuskan pada pengembangan industrialisasi daerah. Industry daerah dibutuhkan mentransformasi masyarakat daerah kearah masyarakat industry yang maju. Pengembangan industry akan mendidik masyarakat agar lebih kreatif, inovatif, produktif sehingga masyarakat akan menjadi masyarakat yang mandiri dan maju. Untuk mendukung program ini maka yang perlu dilakukan adalah ;

Pertama; memper besar jumlah pengusaha usaha kecil menengah (UKM). Kedua ; memperkuat sumberdaya manusia yang terkait dengan basic ekonomi yang sedang dikembangkan. Ketiga ; memperkuat adaptasi perkembangan teknologi, agar dunia usaha lebih mudah mendapat sumber daya.

### **BAB III. KARAKTERISTIK, KEMISKINAN NEGARA BERKEMBANG, FAKTOR DAN PERSYARATAN DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

#### **Karakteristik Negara Berkembang**

Todaro (tahun 2006) menjelaskan karakteristik umum Negara berkembang ada enam kategori sebagai berikut :

1. Standar hidup yang relative rendah; ditunjukan oleh tingkat pendapatan yang rendah , ketimpangan pendapatan yang tinggi, kondisi kesetana yang buruk sehingga mereka tidak produktif, sistim pendidikan yang kurang memadai sehingga bekal pendidikan sangat minim bahkan tidak berpendidikan samasekali dan mereka tidak kreatif. Mereka hidup dengan tingkat yang tidak layak angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang singkat, peluang untuk bekerja yang rendah. Secara umum mereka tidak berdaya. Negara berkembang atau terbelakang terperangkap dalam kemiskinan umum.
2. Produktifitas yang Rendah; hal tersebut disebabkan karena kualitas sumberdaya manusia rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia berakibat tidak dapat merespons perkembangan teknologi yang cukup cepat sekarang ini. Karena itu perlu didukung oleh kecakapan menejerial, motivasi tenaga kerja.
3. Ketergantungan pada Produksi Pertanian dan Eksport barang primer; sebagian besar penduduk Negara berkembang tinggal dipedesaan dengan mata pencaharian utama adalah pertanian. Mata pencaharian utama pertanian kebanyakan tidak produktif karena dikerjakan dengan cara tradisional dan metode produksi yang sudah using dan ketinggalan zaman. Negara berkembang berorientasi pada produksi barang primer seperti produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan-bahan mentah. Produk-produk ini merupakan produk andalan untuk di eksport ke nagara lain atau Negara maju. Sehingga ketergantungan terhadap Negara maju sangat tinggi. Karena jika terjadi depresi ekonomi Negara maju yang

menjadi Negara penerima ekspor maka secara otomatis akan berdampak pada Negara berkembang yang mengekspor bahan mentah.

4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan Yang Tinggi; di Negara berkembang tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi. Kematian yang tinggi disebabkan karena pemahaman tentang kesehatan yang rendah sehingga tingkat kematian bayi tinggi. Kelahiran penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tidak merata tidak hanya membawa beban terhadap penanggulangan kesehatan, tetapi juga menjadi beban terhadap penyediaan perumahan untuk tempat tinggal dan penyediaan sarana pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya, yang akan menjadi beban Negara.
5. Pasar yang tidak sempurna dan Informasi yang tidak memadai; di negara berkembang mempunyai kecepatan tumbuh yang berbeda-beda, bergerak menuju perekonomian pasar pada kebanyakan mereka kurang memiliki perangkat hukum/legal institusional. Sistem yang legal yang mendorong adanya kontrak/perjanjian dan validasi atas hak cipta, kurs mata uang yang stabil dan terpercaya, infrastruktur jalan yang mendorong transportasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan antara daerah masih rendah, perbankan, pasar kredit formal, informasi pasar bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas dan kualitas produk serta sumberdaya yang dapat mendukung hubungan bisnis yang baik di Negara berkembang masih tidak sempurna. Ketidak sempurnaan pasar ini perlu diimbangi dengan peningkatan peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang stabil.
6. Ketergantungan dan Kerapuhan dalam Hubungan Internasional; salah satu faktor yang menyolok yang mengakibatkan rendahnya standar hidup masyarakat mereka, meningkatnya pengangguran, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan internasional yang sangat tidak merata antara Negara kaya dan Negara berkembang atau miskin. Ketergantungan terhadap dunia internasional yang terlalu tinggi yang akan mempersulit usaha-usaha pembangunan di Negara berkembang atau Negara miskin. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Negara berkembang terhadap

kesejahteraan ekonomi dan social mereka. Akan semakin parah jika Negara berkembang tidak memiliki kekayaan alam yang memadai, sehingga tidak memiliki kekuatan tawar menawar. Sehingga Negara kaya semakin kaya, dan Negara miskin makin miskin.

### **Kemiskinan Negara Berkembang.**

Negara yang sedang berkembang kebanyakan berada dalam perangkap kemiskinan, hal tersebut tercermin dari pendapatan perkapita yang rendah. Pendapatan perkapita yang rendah memberi dampak terhadap standar kehidupan yang rendah. Emil Salim (tahun 1984) mengemukakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin adalah masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal atau kebutuhan pokok minimal seperti pangan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan pokok ini akan membuat manusia bisa hidup secara manusiawi. Pandangan tentang Kebutuhan hidup yang pokok ini dipengaruhi oleh sistim nilai masyarakat, adat istiadat, tingkat pendidikan. Komposisi pangan yang harus dikonsumsi adalah sesuai dengan kebutuhan gizi, kalori, protein yang sesuai dengan tingkat usia, pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan dimana dia berada.

Kondisi kemiskinan masyarakatan dapat dikategori kedalam kemiskinan relative dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relative dipengaruhi oleh perbedaan distribusi pendapatn dan pengeluaran masyarakat yang tidak sama. Walaupun mereka sudah dapat memenuhi standar kebutuhan minimum. Sedangkan kemiskinan absolut ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan pokok minimum. Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan dan bekerja, dan diukur dalam bentuk financial atau uang yang dapat ditukar dengan kebutuhan tersebut.

John Kenneth Galbraith (1979) menjelaskan penyebab kemiskinan sebagai berikut ;

1. Kemiskinan alamiah, kondisi ini disebabkan karena tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai seperti kondisi tanah yang tidak subur, tanah berbatu-batu, kering, tidak cukup luas, tidak menyimpan mineral, atau kekayaan alam lainnya. Tetapi

Jepang, Korea selatan, Taiwan, Hongkong, tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti tanah yang subur tetapi berbatu-batu, tidak punya minyak, sedikit mineral, tetapi Jepang sebuah Negara yang maju. Di lain pihak Iran, dan Jazirah Arab lainnya yang kaya akan sumber alam seperti minyak bumi, tetapi mereka biasa saja tidak kaya seperti Jepang.

2. Sistem ekonomi sebagai penyebab kemiskinan. Rakyat menjadi tidak mampu karena perusahaan atau kaum kapitalis dan tuan tanah dimana mereka kerja terlalu mencari keuntungan dengan kurang memperhatikan kebutuhan karyawannya.
3. Masyarakat menjadi miskin disebabkan karena negara tidak mempunyai modal untuk membangun. Tabungan rendah sehingga akumulasi modal rendah, pada gilirannya investasi rendah. Pada gilirannya jika investasi rendah maka akan kekurangan lapangan kerja dan pengangguran, sehingga pendapatan rendah.
4. Negara menjadi miskin karena ketiadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusianya tidak tertidik, tidak terlatih, tidak mempunyai kemampuan teknis dan administrasi. Tenaga manusia yang berkualitas sangat langka.
5. Kemiskinan terjadi di suatu Negara disebabkan karena akibat pemerintah yang tidak efektif, tidak teratur, korup, tidak mampu atau tidak kreatif dan tidak inovatif. Membuat peraturan yang berbelit-belit dan melumpuhkan pembangunan ekonomi.

Bank Dunia tahun 1973 dalam Emil Salim (tahun 1984) menetapkan indikator masyarakat dalam kategori miskin sebagai berikut ;

1. Masyarakat miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Hanya memiliki sedikit faktor produksi ini sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.
2. Masyarakat menjadi miskin karena mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatannya sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Sedangkan syarat untuk memperoleh modal usaha berupa kredit dari perbankan harus ada

jaminan kredit. sehingga mereka harus bekerja sama dengan lintah darat atau para tengkulak yang sangat memeras.

3. Tingkat pendidikan mereka sangat rendah, bahkan tidak sekolah atau tidak sekolah dasar. Mereka hanya bekerja mencari nafkah hidup sehari-hari. Dan anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah.
4. Kebanyakan mereka tinggal dipedesaan, tidak memiliki tanah yang cukup, mereka menjadi buruh tani dan pekerja kasar diluar pertanian karena usaha tani bersifat musiman dan tidak bisa menjamin hidup secara lebih layak.
5. Banyak juga diantara mereka hidup dikota dengan ketiadaan keterampilan atau pendidikan. Sedangkan pekerjaan dikota memerlukan keterampilan tinggi. Seperti sektor industry.

Komponen dan indicator kebutuhan dasar menurut para ahli yang dimuat pada Badan Pusat Statistik (BPS tahun 2008) dalam Badrudin (tahun 2012) merumuskan komponen kebutuhan dasar sebagai berikut;

1. Menurut United Nations (1961), komponen kebutuhan dasar terdiri dari kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan social dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), komponen kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, kesehatan, ; kebutuhan cultural yang mencakup pendidikan, rekreasi, dan ketenangan hidup, dan kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976) komponen kebutuhan dasar terdiri dari gizi, perumahan, layanan kesehatan pengobatan, pendidikan dan sandang.
4. Menurut Green (1978) kebutuhan dasar terdiri dari personal consumption items mencakup pangan, sandang dan pemukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan.



5. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah pedesaan dan perkotaan berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Indicator masing-masing komponen dari kebutuhan minimum dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Pangan, dinyatakan dalam kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
2. Sandang, dinyatakan dalam indicator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
3. Perumahan, dinyatakan dalam indicator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air.
4. Pendidikan, dinyatakan dengan indicator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku)
5. Kesehatan, dinyatakan dengan indicator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

### **Faktor Dasar Perencanaan Pembangunan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi menurut Jhingan (1988) yaitu; sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Faktor tersebut dapat dijelaskan:

#### **1. Faktor Sumber Daya Alam**

Perkembangan perekonomian suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam seperti tanah yang subur, hutan dan perairan, minyak, gas, dan bahan-bahan lainnya. Sumber daya alam yang melimpah dan murah, akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Eksistensi sumber daya alam menjadi penting jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit negara didunia ini yang tidak memiliki sumber daya alam secara potensial dan mereka menjadi miskin, namun banyak pula negara yang memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar tetapi juga mereka belum dapat membangun

perekonomiannya . Dengan demikian kepemilikan sumber daya alam saja belum cukup menjadikan suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan. Disisi lain banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah secara relatif tetapi pertumbuhan ekonomi negara tersebut lebih cepat.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memiliki posisi strategis mendorong kemajuan perekonomian suatu bangsa. Tersedianya sumber daya manusia secara potensial akan berfungsi sebagai unsur pendorong kemajuan ekonomi dan daya saing suatu bangsa. Bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang relatif berlimpah akan mempunyai daya saing yang relatif lebih unggul dibanding dengan negara yang kekurangan sumber daya manusia.

Walaupun demikian tidak sedikit negara yang memiliki sumber daya manusia relatif berlimpah tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mendorong kemajuan ekonominya, dan tidak mempunyai daya saing. Tidak sedikit pula negara yang kekurangan sumber daya manusia secara relatif tapi secara relatif dengan cepat dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Kasus yang pertama dengan sumber daya manusia yang berlimpah tidak dapat bersaing, terjadi pada kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia. Jika sumber daya manusia merupakan suatu unsur sebagai pelaku pembangunan, maka sebagai pelaku harus mendapat perhatian untuk pengembangannya.

*Sutyastie Soemitro Remi* mengemukakan dalam tulisannya (2003) pentingnya kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan yang mendasar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan lebih cepat bangkit dari krisis yang melandanya seperti Jepang, Korea, Thailand, dan negara-negara lainnya.

Selanjutnya *Sutyastie* mengemukakan bahwa perlu dinaikan anggaran pemerintah di Indonesia terhadap pendidikan minimal 10 persen. Namun kenaikan anggaran pendidikan itu harus diimbangi dengan investasi fisik yang lain, terutama penyediaan sarana dan

prasarana di daerah-daerah terpencil. Walaupun beliau mengakui proporsi anggaran di bidang pendidikan untuk negara-negara berkembang cukup besar yaitu antara 15-30 persen dari anggaran rutin seluruhnya, tetapi masih jauh lebih kecil dibanding negara-negara maju. Jika diukur dengan pengeluaran pendidikan per kapita, pengeluaran untuk pendidikan umum di negara-negara berkembang (Asia, Afrika, Amerika Latin) berkisar pada 27 dollar Amerika di banding dengan negara maju 428 dollar Amerika, tentunya suatu angka yang sangat jauh ketinggalan bagi negara berkembang.

Upaya pengembangan sumber daya manusia pada era globalisasi ini sangat penting karena dalam era globalisasi diperhadapkan dengan persaingan yang ketat dan tidak dapat dihindari. Upaya pengembangan sumber daya manusia haruslah dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat sekarang ini. Walaupun hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana. Terutama transformasi ekonomi Indonesia dari agraris ke sektor industri, harus berjalan secara simultan dengan tranformasi sumber daya manusianya.

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja pada sektor pertanian tidak mudah menyesuaikan diri dengan pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri, karena keahlian mereka terbatas pada sektor pertanian, maka srategi pengembangan sumber daya manusia Indonesia harus mengacu pada permasalahan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di negeri ini.

*Bank Dunia* (Yudo Suwasono dan Endang 1993; 4) mengemukakan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah seluruh aktifitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan entreprenensial, pengembangan dan teknologi. Pada tahun 1988 Bank Dunia memperluas pengertian pengembangan SDM dengan memasukan unsur-unsur yang baru yaitu : kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan di tempat kerja, kehidupan politik yang bebas.

*United Nations Development Programme* (UNDP) berdasarkan studinya telah merumuskan pengetahuan baru dari pembangunan manusia yang dimuat melalui laporannya tahun 1991 sebagai berikut :

*Human (resources) development is the process of increasing people choice, it focused equally on the formation of human capabilities (through investing in people) and on the use of those capabilities through creating a participatory framework for income and employment growth.*

Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan kemampuan manusia, proses tersebut dikonsentrasikan secara merata pada peningkatan formasi kemampuan-kemampuan manusia, melalui inventasi pada diri manusia, dan pemanfaatan dari kemampuan manusia, melalui penciptaan kerangka partisipasi untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja (Yudo Swasono dan Endang, 1993; 6).

*Canadian International Development Agency (CIDA)* mengemukakan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimuat dalam McWhinney (1980) ditulis oleh Yudo Swasono dan Endang (1993; 8): Bahwa pembangunan sumber daya manusia sebagai inti dan sasaran pembangunan, yang dalam jangka pendek berkaitan dengan pendidikan dan latihan yang segera bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, managerial dan tenaga kerja administrasi. Pengertian PSDM yang dikemukakan oleh CIDA, menyoroti kelompok sasaran tertentu seperti wanita, masyarakat miskin didaerah pedesaan dan perkotaan, kelompok penduduk usia muda, masyarakat terpencil (suku terasing).

Dari tiga definisi pengembangan sumber daya manusia (PSDM), penulis menarik suatu kesimpulan bahwa PSDM menetapkan empat hal yaitu : **(1)** PSDM dititikberatkan pada kemampuan skill atau keahlian untuk berinovasi yaitu menemukan metode-metode baru dalam proses menciptakan suatu produk atau jasa yang mengutamakan pada teknik-teknik produksi yang mengarah pada efisiensi. Atau menemukan barang-barang baru yang dapat menggantikan kedudukan barang lain dan memberi manfaat sama kepada manusia. **(2)** PSDM ditujukan untuk meningkatkan kemampuan fisik manusia agar menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melahirkan manusia-manusia unggul dalam era persaingan global. **(3)** PSDM ditujukan pada kemampuan intelektual dan kemampuan managerial. Sebagai pelaku pembangunan, manusia harus mempunyai kemampuan manajemen yang handal. Kemampuan manajemen sangat signifikan dengan kebutuhan

untuk mengatur unsur-unsur produksi agar dikelola secara lebih efisien. (4) PSDM diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi insan manusia agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berjalan, baik yang ada dikota maupun yang ada di desa terpencil sekalipun, sehingga mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kehidupan yang lebih baik.

Konsep tentang pembangunan sumber daya manusia (PSDM) dan teknologi menjadi pilihan banyak negara menuju era industrialisasi. Negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong dan Negara Asia Tenggara Singapura dan Malaysia telah mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasar Internasional. Kemampuan daya saing suatu produk, tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi sangat ditentukan oleh beberapa kesiagaan sumber daya manusianya (SDM). Dengan demikian peran sumber daya manusia signifikan terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian ada hubungan yang positif yang cukup kuat antara tingkat pendidikan (formal) yang dimiliki seseorang dengan kemampuan individu tersebut untuk belajar selama bekerja (*learning by doing*) selanjutnya dikatakan bahwa pendidikan yang paling dasar sekalipun yang memberi seseorang kemampuan membaca, menulis dan menghitung, sudah pasti dapat berkembang dalam pekerjaannya. Sehingga lambat laun pekerjaan yang ditekuni seseorang dapat memberi pengetahuan kepada orang yang bersangkutan.

### **3. Ketersediaan Modal**

Modal memainkan peranan penting dalam meningkatkan hasil kerja perekonomian suatu bangsa. Modal erat kaitannya dengan kemungkinan untuk melakukan perubahan produksi. Modal diperlukan untuk melengkapi sumber daya manusia yang semakin bertambah terus sehingga pemupukan modal merupakan suatu yang tidak dapat dielakan untuk memperluas produksi serta menciptakan lapangan kerja dan menaikkan output.

*Gregory Mankiw* (tahun 2000) mengemukakan model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam persediaan modal, pertumbuhan dalam angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana

pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa. Persediaan modal merupakan determinat penting terhadap pertumbuhan output, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan output.

*Michael P. Todaro* (tahun 1983) mengemukakan faktor pertumbuhan ekonomi yang penting dalam masyarakat mana saja adalah : (1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, (2) Perkembangan populasi, terjadi pertumbuhan dalam angkatan kerja walaupun terlambat, (3) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian/proporsi pendapatan yang akan ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output. Investasi-investasi yang sering dikenal dengan infrastruktur sosial dan ekonomi seperti jalan-jalan, listrik, air dan sanitasi, dan komunikasi yang mempermudah dan mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi.

*Mankiw* (tahun 2000) mengemukakan pengalaman pasca perang dunia kedua, ekonomi Jepang dan Jerman mengalami pertumbuhan yang cepat. Output perorang antara tahun 1948 dan 1972 tumbuh sebesar 8,2 persen pertahun di Jepang, dan 5,7 persen di Jerman, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat hanya 2,2 persen. Hal tersebut sebagai akibat dari tingkat tabungan yang tinggi dan tidak merosot, jika tabungan tinggi perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar sehingga output mengalami pertumbuhan yang cepat. Kinerja ekonomi Jepang dan Jerman yang tumbuh cepat setelah perang dunia II karena persediaan modal mereka pada kondisi mapan tinggi yang disebabkan tingkat tabungan mereka tinggi. Solow mengemukakan (dalam Mankiw, 2000; 81) tentang hubungan antara tabungan dengan pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang tinggi mengarah kepada pertumbuhan yang lebih cepat.

#### **4. Kesiapan Teknologi**

*M.L. Jhingan* (tahun 1988) menjelaskan bahwa inovasi terdiri dari : (1) pengenalan barang baru, (2) pengenalan metode produksi baru (3) pembukaan pasar baru, (4)

penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur, (5) pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli.

*Madison* (Martani tahun 2001) mengemukakan hasil survey intensif yang meliputi tiga perempat populasi dan pangsa pasar produk dunia, bahwa mesin utama pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan pengetahuan dan teknik yang dicerminkan dalam sumber daya manusia (SDM) dan modal.

Karena itu konsep tentang transformasi teknologi atau alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dengan tujuan mempercepat proses pembangunan di negara berkembang, hal ini tidaklah sama dengan mengimport barang lain, membeli dan memakai seperti pakaian tidak memerlukan teknik yang tinggi dan tidak memerlukan biaya dalam pemakaiannya. Transformasi teknologi tidak otomatis begitu dipasang langsung dapat berfungsi, tetapi memerlukan suatu proses penyesuaian dengan kemampuan sumber daya manusia sebagai unsur penggerak teknologi.

Dengan demikian operasionalisasi teknologi sangat melekat dengan kemampuan sumber daya manusia. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat menerapkan teknologi yang sudah ada dan menemukan teknik-teknik baru dalam proses produksi. Sehingga output bisa meningkat dengan cepat

### **Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi**

**Jhingan (1988), mengemukakan bahwa** Pembangunan ekonomi tidak hanya dapat dicapai dengan kepemilikan sumber-sumber ekonomi yang berlimpah ruah seperti modal yang murah, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang sudah siap pake, tetapi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Memiliki kekuatan sendiri**

Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa suatu proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan ekonomi dalam negeri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar atau dari negara lain. Kekuatan luar hanya pada batas merangsang dan bersifat membantu kekuatan nasional. Bantuan luar negeri

hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan dan tidak untuk mempertahankannya. Terlalu banyak bergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan kreatifitas dalam negeri.

## **2. Perubahan Struktural**

Perubahan struktur ekonomi adalah mengandung arti peralihan aktifitas ekonomi masyarakat dari sektor pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern. Perubahan struktur ekonomi tidak berjalan sendiri secara parsial tetapi memerlukan perubahan secara substansial dan menyeluruh dari berbagai aspek yang akan menopang sektor industri.

Perubahan sektor ekonomi dari sektor pertanian menjadi sektor industri bukanlah seperti membalikan telapak tangan, tetapi harus berubah secara bersama-sama dengan kemampuan sumberdaya manusia, teknologi dan masyarakat cepat respon terhadap perkembangan teknologi, sikap sosial yang terbuka terhadap perubahan dengan tidak menutup diri karena menganut nilai dan norma tertentu, perubahan kelembagaan, infrastruktur berupa transportasi dan komunikasi, tenaga listrik, sumber daya air, pelabuhan, pasar, dan jasa-jasa lainnya semuanya harus cepat respon terhadap perubahan ekonomi industri. Perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke sektor industri tidak berarti kita meninggalkan sektor pertanian, tetapi perubahan struktur diharapkan akan menarik pertumbuhan sektor pertanian dengan terus menerus secara proporsional sebagai sumber pengadaan bahan baku untuk menopang sektor industri. Perubahan struktur ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendayagunaan sumber-sumber ekonomi baru, perbaikan teknologi, mendorong tumbuhnya sektor jasa, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah.

## **3. Menghilangkan Ketidakefisienan Pasar**

Kondisi pasar yang tidak sempurna menyebabkan pergerakan sumber ekonomi terhambat sehingga menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Ketidakefisienan pasar yang membuat harga-harga faktor tidak stabil sehingga menghambat kegiatan produksi. Hal ini disebabkan karena mobilisasi faktor ekonomi yang tidak lancar. Kesiapan



lembaga ekonomi seperti lembaga kredit untuk pengadaan modal bagi pengusaha, kesiapan sumber daya manusia dengan upah yang stabil, perbaikan teknik produksi harus ditingkatkan, pengetahuan para usahawan mengenai peluang pasar bagi produk yang mereka hasilkan harus punya kepastian.

#### **4. Persyaratan Sosial Budaya**

Potensi Budaya pada umumnya merupakan faktor pendorong dan daya tarik yang kuat jika dikembangkan dengan baik. Budaya kerja keras dan kegotong royongan merupakan potensi dasar masyarakat. Sikap dan budaya suatu bangsa akan terlihat pada ekspresi kehidupan masyarakatnya. Sikap kerja keras, tekun dan ulet, dan tidak malas merupakan faktor yang signifikan terhadap kemampuan meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing masyarakat. Sikap masyarakat yang dinamis dan responsif terhadap suatu perubahan adalah suatu modal yang besar terhadap proses pembangunan ekonomi suatu bangsa. Tetapi sikap masyarakat yang statis dan bergantung pada proses alamiah dan tidak inovatif, akan berdampak pada lambatnya pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah.

Wawasan sosial budaya masyarakat harus diubah jika pembangunan ekonomi diharapkan berjalan dengan cepat. Hambatan tersebut harus disingkirkan atau disesuaikan. Misalnya sistim kasta, warna kulit, suku, dan dogma agama yang yang ekstrim, harus diselaraskan dengan wawasan pembangunan. Tidak berarti kita meninggalkan budaya dan nilai yang kita miliki, tetapi nilai dan norma tersebut bisa terbuka dan tidak menutup diri dengan nilai-nilai yang dianut dalam pembangunan

Sikap masyarakat yang suka menabung dan kebiasaan sebagian dari penghasilannya dan kebiasaan menghemat adalah merupakan aspek penting dalam akumulasi modal, karena pertumbuhan modal yang cepat akan mendorong investasi. Tetapi masyarakat yang konsumtif apalagi demonstratiaon efek adalah tradisi yang tidak menguntungkan terhadap proses percepatan pembangunan masyarakat dan daerah. Karena akumulasi modal yang tinggi akan menciptakan pengadaan modal sehingga dapat mendorong para wirausahawan untuk melakukan investasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.

Penulis menambahkan bahwa persyaratan dasar pembangunan ekonomi suatu negara terletak pada kekuatan sebagai berikut ;

### **1. Pemerintahan Yang Kuat Dan Bersih**

Penguatan pada lembaga pemerintahan daerah beserta dinas-dinasnya adalah suatu faktor penentu untuk mendorong percepatan pembangunan masyarakatnya. Penguatan lembaga pemerintahan daerah ini meliputi penguatan pada pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya sesuai kebutuhan daerah. Lembaga pemerintahan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan yang memadai dan proporsional, moral yang baik dan tidak korup, tidak menyelewengkan aset negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Pemerintahan yang korup dapat menciptakan biaya tinggi (high cost) yang dampaknya akan membuat suatu daerah dan masyarakat tidak mempunyai daya saing yang tinggi, dan tetap dalam kondisi keterbelakangan.

Pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan yang selalu berpihak kepada semua kepentingan kelompok masyarakat. Pemerintahan yang mampu mengadopsi seluruh kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Peran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a). Penciptakan iklim persaingan yang sehat, dan meminimalkan intervensi yang berlebihan
- b). Efektifitas administrasi pemerintahan daerah dan aturan-aturan yang berpengaruh terhadap daya saing daerah
- c). Melakukan koordinasi dan menyediakan informasi pada sektor swasta
- d). Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi dalam mendukung daya saing.
- e). Menciptakan stabilitas sosial dan politik daerah yang kondusif

## **2. Kekuatan Sosial Politik**

Kekuatan sosial politik masyarakat saat ini didorong oleh kemampuan politik, kemauan politik dan moral politik untuk membangun daerah dan masyarakat yang termarginalkan selama ini. Kekuatan politik ini telah terbukti terbentuknya daerah Propinsi dan daerah Kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan daerah dan masyarakat.

Kekuatan politik ini muncul dari berbagai kelompok mulai dari Partai politik, organisasi sosial, tokoh individual telah muncul secara simultan sehingga menjadi kekuatan yang besar. Dalam era demokratisasi saat ini, kekuatan sosial politik akan tumbuh kuat dan akan membantu suatu kebijakan politik yang lebih kuat dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kekuatan sosial politik akan menjadi alat kontrol yang akurat terhadap semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat. Hal ini penting agar pemerintah mengatur pelaksanaan pembangunan lebih berhati-hati dan lebih profesional dan proporsional karena banyak potensi ekonomi daerah yang tidak mendapat perhatian serius dalam pengembangannya, padahal jika sektor ekonomi tersebut dikembangkan secara sungguh sungguh maka akan memberi dampak positif yang cukup luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## **3. Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan, pelabuhan darat dan laut, sarana pasar, tenaga listrik, jaringan telepon. Kesiapan infrastruktur akan menjadi suatu daya tarik bagi investor untuk menanam modal di Kabupaten Manggarai Timur. Tentunya akan membantu proses percepatan pembangunan daerah dan masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi akan mempermudah dan memperlancar mobilisasi barang dan jasa dari centra-centra produksi ke pusat-pusat konsumen. Ketersediaan pelabuhan laut dan darat menjadi tempat berpangkal sarana transportasi sehingga arah dan jalur transportasi tertata dengan baik sesuai dengan sirkulasi

barang, jasa, dan manusia. Ketersediaan tenaga listrik, sumber daya air bersih sebagai pendukung kegiatan sektor industri dan jasa-jasa lainnya.

#### **4. Lembaga Keuangan Lokal**

Pembentukan Lembaga keuangan lokal yang berperan mengakses akumulasi modal masyarakat. Pembentukan modal dalam masyarakat sangat penting karena merupakan faktor pendorong terjadinya kekuatan kewirausahaan yang kuat dan mandiri. Peran pelaku kewirausahaan akan memberi kontribusi terhadap proses percepatan pembangunan ekonomi masyarakat karena itu tersedianya lembaga keuangan lokal akan mempermudah bagi usahawan untuk memperoleh modal. Lembaga keuangan lokal dapat berfungsi memfasilitasi kebijakan kredit usaha agar para pengusaha tidak terjebak pada rentenir.

## BAB IV. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

### Teori Marx

Teori Marx dalam W.I.M. Poli (tahun 2010) mengemukakan tentang perkembangan masyarakat, atau perkembangan sejarah, dinamakan “historic materialism” teori mana didasarkan pada pandangan filsafatnya yang dinamakan “dialectic materialism.” Marx berpendapat bahwa masyarakat berkembang sebagai suatu “socio-economic formation”, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi secara dialektis : (1) masyarakat primitif; (2) masyarakat perbudakan; (3) masyarakat feodal; (4) masyarakat kapitalis; (5) masyarakat sosialis; (6) masyarakat komunis.

Berturut-turut akan diuraikan tentang “dialectic materialism”, “historic materialism,” dan peralihan dari masyarakat kapitalis ke masyarakat socials. Kemudian akan ditarik beberapa garis besar kesimpulan untuk menggampangkan perbandingan dengan teori Mydal.

#### a. Dialectic Materialism

Karl Heinrich Marx dilahirkan pada tanggal 5 mei 1808, di Trier, Jerman, dan meninggal pada tanggal 14 maret 1883, di London. Ia adalah keturunan Yahudi dari golongan rabbi (pendeta), baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayahnya. Di Trier ia bersekolah pada sekolah Yesuit yang kepala sekolahnya adalah pengikut Kant, yang dicurigai Pemerintah Prusia sebagai penyebar pikiran-pikiran liberal. Tetangganya, Baron von Westphalen yang kemudian menjadi mertuanya, mempengaruhi Marx dengan karya-karyanya Shakespeare dan Homer, serta mendorongnya untuk mempelajari kepribadian dan karya-karya Saint Simon, tokoh sosialis Perancis.

Sebagai seorang pengacara, ayah dari Karl Marx menghendaki bahwa anaknya juga mempelajari ilmu hokum Marx sendiri lebih suka mempelajari ilmu sejarah dan filsafat. Pada tahun 1835 Marx meninggalkan Trier untuk mempelajari ilmu hokum pada Universitas Bonn. Disana ia dipengaruhi oleh seorang dosennya, W.Fr. Schlegel, yang menyebabkan ia mempelajari dan menulis puisi. Waktunya di Bonn dipandang sebagai suatu kegagalan sehingga ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke Universitas di Jerman diwajibkan

untuk mengajarkan filsafat dari George Friedrich pada Universitas Berlin (antara 1821-1831) yang baru saja meninggal (1831). Marx lebih banyak mengunjungi pertemuan-pertemuan filsafat daripada mengikuti kuliah. Pada tahun pertama saja di Berlin, 1837, ia telah menulis surat kepada ayahnya betapa ketika ia sakit ia telah mempelajari filsafat Hegel dari awal hingga akhir, serta kebanyakan dari karya para pengikutnya.

Filsafat Hegel, yang mengagungkan pikiran manusia di atas materi, dinamakan "dialectical idealism." Menurut Hegel, realitas bukanlah materi melainkan kesadaran, akal dan pikiran manusia, yang berkembang secara dialektis. Perkembangan pikiran manusia yang secara dialektis itulah yang menentukan perkembangan sejarah. Itulah sebabnya filsafatnya dinamakan "dialectical idealism."

Menurut Hegel, alam semesta ini terdiri atas sejumlah "logical categories," seperti kuantitas, kualitas kemungkinan, kebetulan, kebutuhan, kebenaran, dan sebagainya. Konsep-konsep ini berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari manusia, dan bersifat dinamis. Totalitas dari konsep-konsep itu dinamakan "the Idea", "the Whole", atau "the Absolute." Absolute adalah kenyataan atau kebenaran yang mutlak. Logical categories mempunyai hubungan dialektis satu dengan yang lainnya, hubungan man menyebabkan mereka berubah dan berkembang ke arah kenyataan yang mutlak yaitu absolute. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang sempurna dan tidak berubah, kecuali Absolut. Ke arah nmana segala sesuatu yang lainnya berkembang. Absolut juga memiliki ciri-ciri : "creative power, truth, and rationality." Absolut merupakan sumber dari alam semesta, dan pencipta pikiran manusia. Alam semesta dikendalikan oleh suatu prinsip rasional yang dinamakan "World Spirit." Rasionalitas adalah kebenaran, dan kebenaran adalah kenyataan. Karena itu, menurut Hegel : "what ever is rational is real, and what ever is real is rational."

Dialektika sebenarnya berasal dari pemikiran Yunani, yang berarti perdebatan. Menurut Hegel, sesuatu pendapat (thesis), akan menimbulkan pendapat yang bertentangan (antithesis). Jikalau unsur-unsur yang salah dari keduanya dibuang, dan unsur-unsur yang benar dipertahankan, akan timbul perpaduan yang baru dari kedua pendapat itu, yang dinamakan synthesis. Synthesis sebagai thesis yang baru, akan menimbulkan lagi antithesis yang baru, dan seterusnya, menuju kepada kebenaran yang mutlak, yaitu Idea atau Absolut.

Marx menerima hukum dialektika dari Hegel, tetapi menolak idealismenya. Hukum dialektika dari Marx adalah hukum dialektika yang materialistis. Ia dipengaruhi oleh filsafat materialistis dari Ludwig Feurbach, yang menyatakan bahwa yang merupakan realitas bukanlah pikiran manusia, seperti yang dinyatakan oleh Hegel, melainkan materi. Pikiran manusia tidak lebih daripada pencerminan kondisi-kondisi materilnya. Namun, jikalau filsafat Feurbach dapat disimpulkan dalam pernyataan : "Man is what he eats," filsafat materialistis dari Marx, walaupun materialistis, tidaklah tiba pada kesimpulan yang sedemikian sempit. Jikalau Feurbach menekankan bahwa kondisi-kondisi materil menentukan kesadaran manusia, / Marx mengalihkan tekanannya dan mengatakan bahwa kondisi-kondisi materil menentukan kehidupan sosial. Marx melihat hubungan antara kondisi-kondisi materil dengan struktur sosial, yang selanjutnya juga turut menentukan pemikiran manusia yang hidup di dalamnya

Perbedaan pokok antara Marx dengan Hegel terletak pada penolakan Marx terhadap idealism Hegel. Marx sendiri mengatakan :

*My dialectic method is not only different from Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel the life-process of the human brain, i. e., the process of thinking, which, under the name of 'the idea', he even transforms into an independent subject, is the demiurge (creator) of the real world, and the real world is only the external, phenomenal form of the 'idea'. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than material world reflected by the human mind, and translated into terms of thought."*

Dengan kata lain, Marx berpendapat bahwa Hegel berdiri dengan kepalanya ke bawah. Dan bahwa Marx membalikkannya, berdiri dengan kepalanya ke atas. Dialectical materialism dari Marx menggunakan tiga hukum dari Hegel : The Law of the Unity and the Struggle of Opposites, The Law of Transition from Quantity to Quality, The Law of Negation of the Negation.

Dengan the Law of the Unity and the Struggle of Opposites, diterangkan tentang mengapa terjadi pertentangan dan perubahan didalam setiap materi atau gejala. Setiap benda terdiri atas dua unsur yang bertentangan. Atom terdiri atas proton dan neutron; listrik mempunyai muatan positif dan muatan negatif; manusia memiliki sifat-sifat

sosial dan a-sosial. Unsur-unsur yang bertentangan itu, walaupun bertentangan, membentuk suatu kesatuan. Pertentangan itu menimbulkan kekuatan yang mengakibatkan perubahan dan perkembangan. Seluruh alam ini berubah dan berkembang bukan karena Tuhan atau sesuatu kekuatan luar lain yang mengaturnya, melainkan karena adanya kontradiksi yang menjadi ciri dari setiap benda dan gejala. Setiap materi dan gejala bergerak. Itulah sebabnya segala sesuatu berubah.

Dengan the Law of Transition from Quantity to Quality hendak diterangkan bagaimana terjadinya perubahan pada sesuatu materi atau gejala. Setiap benda di samping terdiri atas dua unsur yang bertentangan, juga mempunyai dua aspek : aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Sebuah tali biola, misalnya, mempunyai ukuran panjang dan tebal yang tertentu, yang dapat diukur. Itulah aspek kuantitatifnya. Pada panjang dan tebal yang tertentu ia menghasilkan bunyi yang tertentu pula. Itulah aspek kualitatifnya.

Pertentangan yang terjadi antara unsur-unsur yang bertentangan di dalam sesuatu benda, akan memberikan perubahan kuantitatif pada benda tersebut. Perubahan kuantitatif belum tentu segera mengakibatkan perubahan kualitatif. Tetapi jikalau perubahan kuantitatif telah bertumpuk-tumpuk, maka sampai pada suatu batas tertentu, yang dinamakan 'node' akan terjadi perubahan kualitatif yang tiba-tiba, yang menyebabkan benda X menjadi bukan – X. sebuah mobil yang berkarat perlahan-lahan, sampai pada suatu batas tertentu, mobil itu berubah menjadi bukan mobil, yaitu besi tua. Perubahan kuantitatif dapat terjadi secara perlahan-lahan (evolusi), tetapi perubahan kualitatif merupakan suatu lompatan (revolusi).

Dengan demikian, aspek kualitatif adalah berkenaan dengan tingkat kestabilan sesuatu benda ; jikalau ia berubah, maka benda bersangkutan berubah sama sekali secara tiba-tiba. Aspek kuantitatif berkenaan dengan kemampuan suatu benda untuk berubah, tanpa mempengaruhi stabilitasnya. Kesatuan organis antara aspek kuantitatif dan aspek kualitatif sesuatu benda dinamakan "measure". Measure menyatakan batas-batas didalam mana perubahan-perubahan kuantitatif tidak mengakibatkan perubahan kualitatif. Titik perubahan dari measure yang satu ke measure yang lain dinamakan "node".



Sebagai contoh dari apa yang dikemukakan di atas, yang terjadi didalam alam, Engels mengemukakan berbagai perpaduan antara atom-atom N dan O, yang membentuk molekul-molekul yang sangat berbeda satu dari yang lainnya.  $N_2O$  dan  $N_2O_5$  adalah dua molekul yang walaupun keduanya mengandung Atom-atom N dan O, mempunyai sifat yang sangat berbeda satu dari yang lainnya.  $N_2O$  adalah gas,  $N_2O_5$  pada temperature yang normal adalah Kristal. Perbedaan keduanya hanyalah karena  $N_2O_5$  mengandung 4. Atom O lebih banyak daripada  $N_2O$ . diantara keduanya masih terdapat  $NO$ ,  $N_2O_3$ , dan  $NO_2$  masing2 dengan cirri yang sangat berbeda.

The Law of Negation of the negation hendak menerangkan kearah mana sesuatu perubahan itu terjadi. Hegel sudah menyatakan bahwa synthesis lebih benar dari pada thesis dan antitheis. Dengan mengenakan hokum ini pada dunia materiil dan kehidupan sosial, Marx mengatakan bahwa setiap perkembangan dialektis membawa kita kepada tingkatan yang lebih tinggi. Di lain pihak hukum ini juga menerangkan bahwa setiap kenyataan yang ada tidak lahir begitu saja ; ia mempunyai hubungan dengan kenyataan yang lalu dengan kenyataan yang akan datang . bahkan, filsafat Marx sendiri tidak lahir begitu saja tanpa filsafat Yunani, Hegel, dan Feurbach. Yang pasti ialah bahwa kenyataan yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kenyataan yang akan datang lebih baik daripada kenyataan yang sekarang. Alam semesta berada dalam proses penciptaan dan penciptaan kembali yang terus-menerus.

Demikianlah garis besar filsafat Marx : dialectic materialism. Di atas dasar ini Marx mengemukakan teorinya tentang perkembangan sejarah : historic materialism.

#### **b. Historic Materialism**

Marx melihat masyarakat sebagai suatu bangunan sosial ekonomi (socio-economic formation), yang terdiri atas dua lapisan: lapisan bawah, yang dinamakan "economic substructure", dan lapisan atas, yang dinamakan "cultural substructure". Karena kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam economic substructure dan antara economic substructure dengan cultural superstructure, akhirnya seluruh bangunan masyarakat berubah dan berkembang ketinggian yang lebih tinggi. Mengapa, bagaimana dan ke arah

mana perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan itu terjadi, akan diuraikan dibawah ini.

### **(1) Mode of production**

Faktor-faktor produksi terdiri atas faktor-faktor yang melekat pada resources) yaitu benda- benda (alam, peralatan teknik). Faktor-faktor ini mempunyai pemilik, hubungan antara manusia dengan alam dan peralatan-peralatan teknik dinamakan "productive forces." Hubungan antara para pemilik faktor-faktor produksi dinamakan "production relations". Productive force dan production relations menentukan "Mode of Production", yaitu caranya produksi berlangsung. Mode of Production inilah yang merupakan lapisan bawah, atau economic substructure, dari bangunan masyarakat, di atas mana dibangun cultural superstructure.

Hubungan antara economic substructure dengan cultural superstructure adalah seperti yang dikemukakan Marx berikut ini :

"In the social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will; these relations of production correspond to a definite stage of development of their material forces of production. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of the society the real foundation on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production in material life determines the social, political and intellectual life processes in general."

Mengapakah economic substructure yang menjadi dasar dari cultural superstructure dan bukan sebaliknya? Sebabnya ialah karena menurut Marx kondisi-kondisi materiil yang menentukan pikiran manusia dan bukan sebaliknya. "The first premise of existence and, therefore, of all history is that man must be able to live in order to make history." Menurut Engels, orang harus makan sebelum ia berfilsafat. Dalam pidato pemakamannya di tepi kubur Karl Marx di London, pada hari Sabtu, 17 Maret 1883, antara lain ia mengatakan :

As Darwin discovered the law of evolution in organic nature, so Marx discovered the law of evolution in human history : that human beings must first of all eat, drink, shelter,

and clothe them selves before they can turn their attention to politics, science, art and religion ; that therefore the production of immediate material means of life and consequently the given stage of economic development of a people or of a period forms the basis on which the state institutions, the legal principles, the art and even the religious ideas of the people in question have developed and out of which they must be explained, instead of exactly the contrary, as was previously attempted.”

## **(2) Tiga Kontradisi**

Perubahan dan perkembangan-perkembangan masyarakat yang terjadi secara dialektis disebabkan oleh adanya tiga kontradisi. Kontradisi yang pertama terjadi di dalam productive force, yaitu antara human dan non-human resources : antara manusia dengan benda-benda. Misalnya, pertentangan antara manusia dengan alam menyebabkan manusia menemukan pacul, traktor, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Non-human factors of production menjadi berkembang : manusia bertambah pengetahuannya dan sikapnya berubah terhadap alam dan sesamanya. Petani yang sudah bekerja dengan traktor mempunyai pengetahuan dan sikap yang lain daripada petani yang hanya mempergunakan pacul.

Kontradisi pertama ini menimbulkan kontradisi yang kedua, yang terjadi di dalam production relations. Penemuan peralatan-peralatan teknik yang baru dan perkembangan pengetahuan manusia tidak saja mengakibatkan pertambahan produksi melainkan juga mengakibatkan perubahan pemilikan faktor-faktor produksi. Timbul pertentangan antara pemilik-pemilik faktor produksi, yaitu pertentangan antara yang kuat dan yang lemah, antara kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Production relations berubah; seluruh mode of production berubah.

Perubahan mode of production menimbulkan pertentangan yang ketiga, yaitu antara economic substructure dengan cultural superstructure. Mode of production yang baru tidak lagi sesuai dengan cultural superstructure yang ada. Hukum, kesenian, pendidikan, nilai-nilai sosial, yang merupakan unsur-unsur dari cultural superstructure, tidak lagi sesuai dengan mode of production yang baru. Pertentangan ini akan menyebabkan

perubahan pada cultural superstructure. Akhirnya, seluruh bangunan masyarakat berkembang ketingkatan yang lebih tinggi dari semula.

Tingkat-tingkat perkembangan itu adalah : (1) masyarakat primitif; (2) masyarakat perbudakan; (3) masyarakat feodal; (4) masyarakat kapitalis; (5) masyarakat sosialis; (6) masyarakat komunis. Rentetan dan tingkatan-tingkatan perubahan dan perkembangan ini berlangsung menurut suatu hukum besi dari perkembangan sejarah, terlepas dari kemauan manusia. Manusia memang menciptakan sejarah, tetapi manusia sendiri ditentukan oleh sejarah. Apa yang dapat dibuat oleh manusia yang mengerti hukum besi dari perkembangan sejarah itu, dan memperkecil pengorbanan-pengorbanan yang terjadi pada setiap peralihan. Mereka yang sia-sia melawan hukum besi ini adalah : kaum reaksioner, yang hendak kembali kepada keadaan sebelumnya, dan kaum konservatif, yang hendak mempertahankan keadaan yang ada. Mereka yang mempercepat berlakunya hukum besi ini adalah : kaum progresif.

### **(3) Peralihan dari Masyarakat Kapitalis ke Masyarakat Sosialis**

Marx hidup di dalam masyarakat kapitalis, tetapi ia menolak sistim kapitalis. Ia memandang sistim kapitalis suatu sistim peralihan dari sistim feodal, yang akhirnya akan melahirkan sistim sosialis. Ia berpendapat bahwa sistim kapitalis mengandung kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuhnya, yang secara dialektis akan melahirkan sistim sosialis yang baik.

Dengan mengambil alih “labour theory of value” dari David Ricardo, (1772 – 1823), Marx mengembangkan “theory of surplus value” (teori nilai tinggi), yang dipakainya untuk menerangkan mengapa sistim ekonomi kapitalis akan runtuh. Sama seperti Ricardo, ia berpendapat bahwa hanya tenaga kerja yang menciptakan nilai. Nilai sesuatu barang sama besar dengan nilai tenaga kerja yang telah dikorbankan untuk menghasilkan barang tersebut. Bahan mentah dan barang modal yang dipergunakan memang turut juga menciptakan nilai, tetapi semuanya itu pernah dihasilkan dulunya oleh tenaga kerja juga; di dalam terdapat tenaga kerja yang telah dibekukan. Dengan demikian nilai suatu barang dapat dinyatakan dalam jumlah tenaga kerja yang telah dikorbankan untuk menghasilkan

barang tersebut. Tetapi, di dalam kenyataannya kaum buruh tidak menerima upah sebesar nilai yang telah diciptakannya. Ada sebagian hasil kerjanya yang ditahan sebagai nilai lebih oleh kaum kapitalis. Penahanan ini berarti penghisapan kaum kapitalis terhadap kaum buruh. Kekuatan-kekuatan yang ada didalam sistim kapitalis akan menyebabkan kaum buruh bergerak untuk mengambil alih peralatan produksi dari tangan kaum kapitalis. Dengan kemajuan teknologi akan terjadi substitusi tenaga kerja oleh barang-barang modal. Itu berarti menurunnya rate of profit. Hal ini tidak disenangi kaum kapitalis. Untuk mempertahankan rate of profitnya, mereka akan menaikkan surplus value, s. Kenaikan surplus value berarti kenaikan penghisapan terhadap kaum buruh.

Kesimpulan bahwa rate of exploitation yang kian hari kian besar adalah suatu perkembangan yang tidak dapat diabaikan. Kaum buruh menjadi melarat; mereka tidak mampu untuk membeli hasil produksinya sendiri. Pasar di dalam negeri menjadi sempit. Usaha kaum kapitalis untuk mencari pasaran baru di luar negeri, akan menimbulkan imperialisme. Imperialisme adalah tingkatan yang tertinggi dari kapitalisme, menurut Lenin.

Karena produksi berlangsung di dalam suasana persaingan bebas, kaum kapitalis yang kecil-kecil akan kalah di dalam persaingan, dan timbullah monopoli-monopoli besar. Kaum kapitalis yang bangkrut menambah jumlah penganggur, yang merupakan "industrial reserve army". Suasana obyektif yang bagi lahirnya revolusi telah tercipta. "The monopoly of capital become a fetter upon the mode of production... at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument. This integument is burst asunder. The knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated". Demikian pendapat Marx. Dengan bangkitnya kelas proletar yaitu mereka yang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerjanya, untuk merebut peralatan-peralatan produksi dari kaum kapitalis, maka tidak ada lagi surplus value yang tidak dibayarkan kepada kaum buruh. Perubahan di dalam economic substructure ini akan menimbulkan perubahan di dalam cultural superstructure. Lahirlah masyarakat sosialis yang lebih baik daripada masyarakat kapitalis.

Pernyataan Marx bahwa : "The mode of production of the material means of existence conditions the whole process of social, political, and intellectual life" telah menimbulkan banyak perbedaan penafsiran, baik dikalangan kaum Marxis maupun kaum non Marxis. Ada

yang menafsirkan bahwa Marx sangat membatasi perkembangan masyarakat hanya pada peranan teknologi belaka. Ada pula yang menafsirkan bahwa pendapat Marx tidaklah sesempit itu. G.D.H. Cole, misalnya berpendapat bahwa apa yang dipandang oleh Marx sebagai materi, yang menjadi sebab dari perubahan sosial adalah “more and more products of the human mind.” Tetapi kalau demikian halnya, mengapakah pandangan Marx tentang perkembangan sejarah dikatakan “materialist interpretation of history?”. Cole menjawab : “Marx called his conception of history ‘materialist’, because he was determined to mark it sharply from the metaphysical Idealism of Hegel and his followers. Where he wrote ‘materialist’, it be natural in our day to write ‘realist’...”

Schumpeter juga berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Marx dengan mode of production tidaklah disempitkan pada pengertian peralatan teknik belaka. Di dalamnya harus dicakupkan juga peranan faktor-faktor non ekonomis.

“The economic interpretation of history does not mean that men are, consciously or unconsciously, wholly or primarily, actuated by economic motives. On the contrary, the explanation of the role and mechanism of non-economic motives and the analysis of the way in which social reality mirrors itself in the individual psycnes is an essential element in the theory and one of its most significant contributions. Marx did not hold that religious metaphysics, schools of art, ethical ideas and political volitous were either reducible to economic motives or of importance. He only tried to unveil the economic conditions which shape them and which account for their rise and fall.”

Akibat perbedaan-perbedaan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Marx, maka Engels di hari tuanya, yang berbicara atas nama Marx serta dirinya sendiri, mengatakan :

“According to the materialist conception of history the determining element... is ultimately the production and reproduction in real life. Marx than this neither Marx nor I have ever asserted. If, therefore, somebody twists this into the statement that the economic element is the only determining one, he transforms it into a meaningless, abstract and absur phase ... the various elements of the

superstructure ... also exercise their influence ... and in many cases preponderate in determining their form. There is an interaction of all those elements in which, amid all the endless host of accidents ... the economic movement finally asserts itself as necessary ...

Bahwa perbendaan-perbedaan pendapat telah timbul hal itu menurut Engels, adalah antara lain karena kesalahan Marx sendiri : "Marx and I ourselves are partly to blame for the fact that younger writers sometimes lay more stress on the economic factor than is due to it. We had emphasized this main principle in opposition to our adversaries, who denied it, and we had not always the times, the place or the opportunity to allow the other elements involved in the interaction to come into their rights."

Demikianlah garis besar dialektik materialisme dan historic materialisme dari Marx. Uraian yang diberikan adalah sesingkat mungkin, dengan tujuan membandingkannya dengan teori Myrdal. Untuk tujuan itu perlu ditarik beberapa garis besar kesimpulan.

### **c. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian di atas tentang teori Marx dapat kita tarik beberapa kesimpulan berikut ini :

- (1) Secara sadar di dalam teorinya Marx menolak sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme akan digantikan oleh sistem sosialisme, dan sistem sosialisme akhirnya akan melahirkan sistem komunisme .
- (2) Hukum dialektika menyebabkan masyarakat akan berkembang dari tingkat-tingkatan yang rendah ke tingkat-tingkatan yang lebih tinggi. Yang terutama menentukan perubahan dan perkembangan itu adalah material mode of production dari masyarakat bersangkutan.
- (3) Perkembangan masyarakat yang berlangsung dari tingkat-tingkatan yang rendah ke tingkat-tingkatan yang lebih tinggi itu berlangsung menurut hukum dialektika yang tidak dapat ditiadakan manusia. Manusia hanyalah dapat memperlambat atau mempercepat proses perkembangan itu.

- (4) Teori Marx bersifat optimatis dan fatalistis. Optimistis dalam arti bahwa setiap masyarakat pasti akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Fatalistis dalam arti bahwa tidak mungkin ada unsur-unsur “kebetulan” yang mengalihkan perkembangan tersebut. Manusia memang menciptakan sejarah, tetapi ia sendiri, di luar dari kehendaknya, diciptakan oleh sejarah.

### **Teori Adam Smith**

**Adam Smith** sejak tahun 1729-1790 (Deliarnov, 1995) merupakan tokoh utama ekonomi klasik. Smith adalah murid dari Francis Hutcheson salah seorang dosen dari Universitas Glasgow (1694-1746) di Inggris. Pemikiran Smith juga banyak dipengaruhi oleh teman kuliahnya David Hume (1711-1776). Smith mendapat beasiswa untuk melanjutkan Studinya di Universitas Oxford hingga tahun 1746. Dari tahun 1748 hingga tahun 1751 ia mengajar di Edinburg University. Dan pada tahun 1751 hingga tahun 1763 mengajar di Glasgow University. Bahan-bahan kuliahnya yang diberikan pada Glasgow University menjadi sumber utama dalam penulisan bukunya yang sangat dikenal yaitu ; *An Inquiry into the nature and Causes Of The Wealth of Nations*. Buku yang ditulis oleh Smith tahun 1776, merupakan tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi, dan tidak heran sehingga Smith diberi gelar *Bapak Ilmu Ekonomi*.

**Adam Smith** (Deliarnov, 1995) terjadi perbedaan pendapat dengan tokoh-tokoh fisiokrat seperti Quesnay, Turgot, Necker dan tokoh lainnya tentang sumber kemakmuran suatu Negara. Kaum fisiokrat berpendapat bahwa *alamiah* yang sangat dominan dalam menentukan kemakmuran Negara, sedangkan Smith menganggap bahwa *manusia* sebagai factor produksi utama dengan alasan tanah tidak ada artinya jika tidak dikelola oleh manusia yang pandai sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Smith menganggap bahwa *akumulasi modal* itu penting bagi pembangunan ekonomi sehingga dalam sistim ekonomi sering disebut sistim liberal yang juga sering disebut sistim ekonomi kapitalis. Menurut Smith cara yang terbaik untuk menaikkan tingkat laba



perusahaan adalah dengan melakukan investasi dengan membeli mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih sehingga produktifitas tenaga kerja akan semakin meningkat.

Smith dikenal dengan doktrin *pasar bebas* (*Laissez faire-laissez passer*). Doktrin ini menghendaki seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Biarkan perekonomian berjalan melalui mekanisme pasar bebas, tanpa campur tangan pemerintah, karena akan ada suatu tangan yang tak kentara (*invisible hands*) yang akan mengendalikan perekonomian kedalam keseimbangan. Jika ada campur tangan pemerintah maka akan terjadi distorsi yang membawa perekonomian tidak efisien dan tidak seimbang.

Smith dalam pandangan lainnya adalah spesialisasi. Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja perlu didorong spesialisasi atau pembagian kerja. Salah satu cara yang baik untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja adalah mendorong spesialisasi dimana orang dapat mengerjakan sesuatu yang terbaik sesuai keahlian yang dimilikinya. Produktifitas tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengikut Klasik **Jean Baptiste Say** dalam Deliarinov (tahun 1995) dengan pandangannya yang paling populer adalah ; bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan. Pendapat Say ini biasa disebut sebagai hukum Say (*Say Law*). Hukum ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan, tiap ada produksi akan ada pendapatan, sehingga produksi menciptakan permintaan terhadap barang yang diproduksi sendiri. Selain terkenal dengan hukum ini, Say juga adalah orang yang pertama berbicara tentang *entrepreneur*, dan orang yang pertama melakukan klasifikasi factor-faktor produksi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Factor-faktor yang dimaksud yaitu ; *tanah, tenaga kerja dan modal*. Tetapi kalah populer dibandingkan dengan hukum Say karena hukum Say selalu dikritik oleh Keynes.

### **Teori Rostow**

Rostow (tahun 1965) adalah seorang ahli sejarah ekonomi yang pada tahun 1960 muncul dengan teorinya tentang tingkatan-tingkatan perkembangan ekonomi ("*stages of economic growth*"), yang dipandanginya juga sebagai teori tingkatan perkembangan

masyarakat, atau perkembangan sejarah. Ia mengemukakan bahwa bukunya menyajikan suatu "economic historian's way of generalizing the sweep of modern history" dan bahwa teorinya tentang stages of growth adalah "both a theory about economic growth and a more general, if still highly partial, theory about modern history as a whole." Adalah mungkin katanya, "to identify all societies in their economic dimensions, as lying within one of five categories : the traditional society, the preconditions for take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass consumption."

#### **a. Penolakan terhadap teori Marx**

Menurut pengakuan Rostow sendiri, teorinya timbul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap teori Marx. Reaksi ketidakpuasan ini sudah jelas terlihat pada sub judul bukunya : "A Non-Communist Manifesto", Teori Rostow sangat banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan, sedemikian banyaknya sehingga, menurut Benyamin Higgins, "theory author of the Non-Communist Manifesto resembles the author of the Communist Manifesto".

Marx menolak sistim kapitalisme didalam mana ia hidup. Rostow mempertahankannya sebagai penyelamat peradaban manusia. Walaupun Rostow mengakui bahwa teorinya diilhami teori Marx, tetapi justru ia mengemukakannya untuk menentang teori Marx. Ia mengemukakan:

Two aspects of Marx's analysis interested me. First, his historical sequence from feudalism through capitalism and socialism to communism. The stages of Economic Growth was, in part, an alternative to that sequence, done with the advantage of another century's knowledge. Second, there were Marx's propositions linking the economy and technical relationships within it to politics. I found these challenging, while reacting against his underlying view that politics was essentially a superstructure to economic life."

Jikalau Marx melihat perkembangan masyarakat atas dasar perkembangan mode of production, Rostow juga mengakui bahwa teorinya tentang perkembangan masyarakat di dasarkan pada perkembangan ekonomi, tetapi menolak bahwa faktor-faktor ekonomi adalah dominan sebagaimana yang dikemukakan Marx : "...both accept the fact that economic change has social, political, and cultural consequences; although the stages of growth rejects the notion that the economy as a sector of society and economic advantage

as a human motive are necessarily dominant.” Jikalau demikian penolakan Rostow, bagaimanakah teorinya sendiri?

#### **b. Produksi dan Tingkatan Perkembangan Masyarakat**

Sangkut-sangkut antara faktor-faktor ekonomis, sosial dan politik, yang menurut Rostow menghasilkan perkembangan ekonomi dan masyarakat dilukiskannya sebagai berikut :

Produksi masyarakat pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tiga macam stock : working force (yaitu jumlah penduduk yang turut serta dalam proses produksi), stock of capital, dan stock of applied knowledge. Perubahan pada ketiga jumlah ini menentukan tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi. Ketiga jumlah tersebut ditentukan oleh 6 propensities di dalam masyarakat, yaitu : (1) propensity to develop fundamental science; (2) propensity to apply science to economy; (3) propensity to accept the possibilities of innovation; (4) propensity to seek material advance ; (5) propensity to consume ; (6) propensity to have children. Ke-enam propensities ini dapat saling mempengaruhi:

the forces determining the strength and position of one propensity might also be directly relevant to the strength and position of other propensities, since their separability stems from economic rather than social analysis. It is quite likely, in a given society, that the general analyst would find the social forces making for increased allocations to applied science : and the same set of forces also operating to increase the proportion of innovations accepted, to shift out-ward the supply curve of finance, and to reduce the death rate.”

Walaupun propensities tersebut saling mempengaruhi, mereka dapat dipisahkan dan dianalisa tersendiri-sendiri juga: “They are not a single package”.

Ke-enam propensities tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, serta lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan politik yang ada . hubungan antara ke-enam propensities tersebut dengan faktor-faktor ekonomis, sosial, dan politik adalah sebagai berikut:

The propensities summarize those aspects of social and political behaviour believed to be directly relevant to the level of output and the rate of economic growth ; the strength of

the propensities and their course of change are determined by a complex of interrelationship among the economic, social, and political forces of a society, long run and slow moving in character.”

Dengan memperhatikan hubungan antara ke-enam propensities tersebut dengan tingkat produksi, Rostow berpendapat bahwa ia telah mempersatukan faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor non-ekonomis di dalam satu teori:

The present exposition is designed to bring together, within a single analytic structure, the variables which are conventionally regarded as economic along with those which are non-economic, in so far as they bear on strictly economic decisions.”

Setelah mengemukakan secara umum sangkut-paut antara faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor non-ekonomis tersebut, selanjutnya Rostow bertanya: “How shall we go about analyzing the relation between economic growth in general and economic growth in particular sectors of an economy?”. Pertanyaan ini membawa Rostow datang kepada jawaban bahwa menurut pengamatannya terhadap perkembangan sejarah :

1. Growth rates in the various sectors of the economy differ widely over any given period of time ;
2. In some meaningful sense, overall growth appears to be based, at certain periods, on the direct and indirect consequence of extremely rapid growth in certain particular key sectors.”

Rostow membedakan tiga macam sektor-sektor ekonomi, menurut kemampuan berkembangnya, sehingga memberikan peranan yang berbeda pula pada perkembangan ekonomi. Tiga macam sektor itu adalah : (1) primary growth sectors, atau leading sectors; (2) supplementary growth sectors ; (3) derived growth sectors.

**Primary growth sectors** adalah sektor-sektor dimana “possibilities for innovation or for exploitation of newly profitable or hitherto unexplored resources yield a high growth rate and set in motion expansionary forces elsewhere in the economy.”

**Supplementary growth sectors** adalah sektor dimana “rapid advance occurs in direct response to or as a requirement of advance in primary growth sectors, e.g. , coal, iron, and engineering in relation to railroads.”

**Derived growth sectors** adalah sektor-sektor dimana “advance occurs in some fairly relation to growth of total real income, population, industrial production, or some other over-all modestly increasing parameter. Food output in relation to population, housing in relation to family formation are classic derived relation in this order.”

Leading sectors suatu masyarakat tidak sama dalam perjalanan sejarahnya. Jikalau masyarakat tersebut pandai-pandai melihat manakah yang merupakan leading sektornya pada suatu saat tertentu, lalu memusatkan investasinya disana, maka akan muncullah kekuatan yang mengangkat masyarakat tersebut ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, menurut Rostow, teorinya tentang perkembangan masyarakat dan sejarah, melalui berbagai tingkatan itu, mempunyai suatu “analytic bonestructure, rooted in a dynamic theory of production.”

Marx mengatakan berdasarkan hukum dialektika masyarakat akan berkembang dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, berturut-turut : masyarakat primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat kommunis. Berdasarkan teorinya tentang hubungan antara faktor-faktor ekonomis dan faktor non-ekonomis yang menentukan tingkat produksi, serta peranan leading sectors di dalam perkembangan ekonomi, Rostow berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, berturut-turut sebagai berikut : traditional society, preconditions for take-off, take-off into self sustained growth, drive to maturity, dan feodal dari teori Marx sedikit banyaknya sama dengan apa yang ia namakan traditional society. Bergerak dari pendapat ini, maka baik Marx maupun Rostow melihat perkembangan masyarakat melalui lima tingkatan.

**Rostow** (1965) dalam bukunya *The Stages Of Economic Growth* (1965, hal. 5) mengemukakan lima tahapan pertumbuhan ekonomi ;

### **1. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)**

Dalam tahapan ini masyarakat menggunakan metode produksi yang masih sangat primitif dengan kebiasaan turun temurun. Masyarakat belum menguasai ilmu pengetahuan, manusia belum bisa menguasai alam, manusia masih tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Manusia cenderung bersifat statis, kemajuan berjalan lambat.

Produktifitas tenaga kerja rendah, sektor pertanian masih dominant, dan struktur social yang hierarkis.

## **2. Prasyarat Tinggal Landas (the precondition for take off)**

Mulai dilakukannya berbagai transformasi di seluruh sektor kehidupan, seperti dari sektor pertanian ke sektor perkotaan, semakin besarnya tingkat tabungan dan diikuti oleh kenaikan tingkat investasi baik dilakukan oleh negara maupun dilakukan secara individu termasuk investasi di sektor pendidikan. Semakin maraknya penggunaan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru, campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah maju, karena secara internal tidak mampu mengembangkan dirinya, perubahan di sektor pemerintahan.

## **3. Tinggal landas (the take off)**

Tahap ini dapat dipandang sebagai tahap paling krusial dalam sejarah ekonomi satu Negara karena pada tahap ini terjadi berbagai perubahan-perubahan yang drastis, baik berbentuk revolusi politik, terciptanya berbagai inovasi, dan munculnya pasar-pasar baru. Semakin meningkat kecenderungan menabung dan investasi yang mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi hingga melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Meningkat pertumbuhan sektor pertanian yang mendukung pertumbuhan di sektor industri. Menguatnya kerangka sosial-institusional yang menggambarkan keberhasilan suatu Negara untuk mematahkan mata rantai lingkaran kemiskinan yang dihadapinya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tepat, yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mantap. Rostow menjelaskan bahwa syarat utama untuk *“take off”*, adalah negara harus mampu memenuhi kondisi; Pertama, kenaikan dalam laju investasi produktif dari sekitar 5% atau kurang menjadi lebih dari 10% dari Pendapatan Nasional. Kedua, pengembangan sektor industri pengolahan yang semakin pesat dan substansial dengan laju pertumbuhan yang tinggi yang dapat menaikkan peranan sebagai sektor terdepan dalam proses pembangunan ekonomi. Ketiga, adanya atau

timbulnya kerangka politik, sosial dan kelembagaan yang cepat yang dapat memberi karakter yang bersifat terus-menerus pada pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Menuju kedewasaan (*the drive to maturity*)**

Industri berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi secara efektif disemua sektor produksi, peralihan sektor pemimpin (leading sektor), keahlian tenaga kerja makin meningkat dan terjadi perubahan-perubahan sosial. Negara memantapkan posisinya terhadap perekonomian dunia. Barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksi sendiri. Perkembangan industri terjadi dengan beraneka industri dan menggunakan teknik produksi yang sudah modern. Selain memproduksi barang konsumsi juga memproduksi barang-barang modal.

#### **5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*)**

Orientasi utama pada masyarakatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah konsumsi bukan produksi. Tahap empat dan lima dapat dijadikan satu dan dianggap sebagai tahap pertumbuhan berkelanjutan yang didorong oleh kekuatan diri sendiri.

#### **c. Hukum Perkembangan Masyarakat**

Marx berpendapat bahwa hukum perkembangan masyarakat yang dikemukakannya adalah hukum besi, yang berlaku bagi setiap masyarakat, di luar kehendak manusia. Rostow, yang mengemukakan suatu alternatif lain terhadap teori Marx, juga berpendapat bahwa teorinya berlaku bagi setiap masyarakat, baik non-kommunis maupun kommunistik. Dengan lain kata, tidak ada masyarakat yang dapat mengalahkannya. Ia juga merupakan hukum besi. Berikut ini adalah beberapa penegasannya :

“I have gradually come to the view that it is possible and, for certain limited purposes, it is useful to break down the history of each national economy ... according to this set of stages. They constitute, in the end, both a theory about

economic growth and more general, if still highly partial, theory about modern history as a whole". "The stages are not merely descriptive. They are not merely a way of generalizing certain factual observation about the sequence of development of modern societies. They have an inner logic and continuity. They have an analytic bone-structure, rooted in a dynamic theory of production."

#### **d. Teori yang Optimistis dan Fatalistis**

sama halnya dengan teori Marx, teori Rostow adalah optimistis dan fatalistis: Optimistis, karena cepat atau lambat, negara-negara terbelakang pun akan maju, melalui tingkatan yang telah digariskan oleh Rostow. Fatalistis, karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Russia, sebagai negara kommunistik, juga tidak dapat mengelakkan diri dari teori Rostow. Karena itu, jalan lain, yang dikemukakan oleh Marx itu, merupakan suatu penyakit. Adalah tugas dari Amerika Serikat, sebagai negara yang telah mencapai tingkatan perkembangan yang tertinggi, untuk menyelamatkan dunia dengan peradabannya dari jalan yang telah dikemukakan Marx dan kaum kommunistik. Penyelamatan itu harus terjadi dengan menggunakan teori Rostow.

Ciri teori Rostow yang optimistis nampak dalam uraiannya tentang take-off into self-sustained growth :

" ... the process of economic growth can usefully be regarded as centering on a relatively brief time interval of two or three decades when the economy and the society of which it is a part transform themselves in such a way that economic growth is, subsequently automatic"

Perkembangan yang otomatis ini, katanya, ditandai dengan adanya investasi sebesar 5-10 % dari pendapatan nasional. Perkembangan ekonomi hanyalah nampaknya saja sukar, tetapi sebenarnya tidak :

" ... the lesson of all this is that the tricks of growth are not difficult ; they may seem so, at moments of frustration and confusion in transitional societies ... "

Sedemikian yakinnya Rostow tentang teorinya sebagai jalan penyelamat bagi negara-negara terbelakang, sehingga dengan mengutip Keynes, ia mengatakan : "I give you



... the possibility of civilization”, di dalam kemungkinan mana seluruh dunia “can share the choices open in the stage of high mass consumption.” Yang telah dicapai Amerika Serikat.

Dengan optimis tersebut tidaklah mengherankan bahwa ketika Rostow ditanyakan apakah kegunaan dari teorinya, ia menjawab bahwa pertama-tama : “It might help to defeat Myrdal, Singer, and all those who held up as the dominating image of the contemporary world as a situation where the richer countries were becoming progressively richer relatively to the poor ones.” Jadi ia tidak saja hendak meniadakan teori Marx, melainkan juga hendak menghibur negara-negara terbelakang, bahwa keadaan mereka tidaklah segawat yang digambarkan oleh orang-orang seperti Myrdal, Singer, dan lain-lain. Yang selalu mengemukakan tentang perbedaan yang kian lama kian besar antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia ini. Agar supaya negara-negara terbelakang itu dapat menikmati kemajuan yang telah dicapai Amerika Serikat, dan diabaikan dari kemungkinan memilih jalan yang dikemukakan Marx dan kaum kommunist, perlu kiranya Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, menggunakan jalan ke luar yang terdapat di dalam teori Rostow :

“There may not be much civilization left to save unless we of the democratic north face and deal with the challenge implicit in the stages of growth, as they now stand in the world, at : the full stretch of our moral commitment, our energy, and our resources.”

Demikianlah kalimat penutup dari “Stages of Economic Growth; A Non-Communist Manifesto” dari Rostow yang sangat berbau slogan. Walaupun demikian, istilah-istilah yang dipergunakan oleh Rostow nampaknya tidak dapat dikeluarkan lagi dari kamus ekonomi pembangunan, bahkan dipergunakan uga oleh mereka yang paling keras menentanginya. Dimana-mana kita membaca dan mendengar orang menggunakan istilah “take-off”, baik secara sadar atau tidak sadar tentang isi dan kekurangan-kekurangannya.

### **Teori Harrod - Domar**

**Harrod–Domar dalam jhingan (tahun 1988) dengan** Dasar Teorinya Tabungan dan Investasi. Evsey Domar dan Roy Harrord adalah dua ahli ekonomi yang bekerja secara terpisah dan menemukan kesimpulan yang sama. Kedua pakar ini menemukan bahwa

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah.

Model teori ini didasarkan pada asumsi bahwa proses pembangunan pada dasarnya masalah penambahan investasi modal. Karena masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika modal tersedia dan modal itu di investasikan maka akan terjadi pertumbuhan. Para ahli ekonomi dengan melihat secara khusus pada negara dunia ketiga menemukan masalah keterbelakangan pembangunan karena masalah kekurangan modal. Karena itu para ahli ekonomi memberi resep bahwa jika ingin meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang adalah mencari tambahan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Teori Harrod maupun Domar dalam model pertumbuhannya adalah investasi selalu mempunyai efek ganda, di satu sisi sebagai peminta Output yang berupa barang modal sedang disisi lain sebagai penyedia tambahan barang modal yang pasti akan meningkatkan kapasitas produksi total suatu ekonomi. Jadi investasi mempunyai efek permintaan (efek pada AD) sekaligus efek kapasitas produksi (efek pada AS). Harrod-Domar merumuskan hubungan tersebut sebagai berikut:

$$I = \Delta K$$

Identitas diatas adalah, terjadinya kapasitas produksi masyarakat. Penambahan stok modal (K) akan menambah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output potensial ( $Q_p$ ). output potensial adalah output yang dapat dihasilkan sesuai dengan besar kecilnya kapasitas perusahaan. Output potensial ( $Q_p$ ) berbeda dengan output yang betul-betul diproduksi atau direalisasi ( $Q_R$ ).  $Q_R$  tergantung oleh besar kecilnya tingkat permintaan agregat (AD). Semakin kecil permintaan agregat (AD), semakin kecil  $Q_R$  (output riil) relative terhadap  $Q_p$ , yang berarti semakin besar kapasitas produksi yang menganggur (*excess capacity*), dan sebaliknya.

Harrod-Domar menggambarkan hubungan antara stok modal dengan output potensial sebagai berikut:

$$Q_p = hK$$

$h$ - adalah banyaknya unit output yang bisa dihasilkan dari setiap kapital.

Koefisien ini disebut output-capital ratio atau apabila dibalik ( $1/h$ ) adalah *capital output ratio* (COR).

Teori Harrod-Domar mengatakan bahwa hubungan antara  $K$  dan  $Q_p$  adalah proporsional apabila terdapat sejumlah  $I$  tertentu yang akan meningkatkan  $K$ , otomatis  $Q_p$  juga akan meningkat secara proporsional. Semakin besar  $I$ , semakin besar tambahan output potensial. Hal ini disebabkan karena hubungan antara  $K$  dan  $Q_p$  proporsional.

Laju pertumbuhan yang menyebabkan permintaan yang cukup tinggi. Perusahaan dapat menjual produk-produk yang dihasilkannya, sehingga mereka dapat mengulangi lagi apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Artinya laju pertumbuhan output adalah konstan sesuai dengan laju pertumbuhan permintaan. Secara umum menjamin keseimbangan dipasar barang dalam jangka panjang. Keseimbangan ini disebut oleh Harrod Domar dengan *Warrented rate of Growth*.

Apabila terjadi ketidak stabilan maka Harrod Domar mengatakan tidak ada satupun mekanisme secara otomatis yang dapat mengembalikan posisi perekonomian dalam keseimbangan. Dan ketidak stabilan pertumbuhan dalam jangka panjang merupakan salah satu dalil utama dalam teori Harrod Domar. Dalam teori Harrod Domar tidak hanya menggunakan stok modal dalam menghasilkan output, tetapi juga menggunakan input lain seperti tenaga kerja dan teknologi. Dalam teori Harrod Domar dianggap tingkat output natural memiliki hubungan yang proporsional dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Natural Rate of Growth adalah laju pertumbuhan yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan pada pasar tenaga kerja agar tidak ada tenaga kerja yang menganggur (dicapai kondisi full employment). Ini merupakan perbedaan utama antara teori Harrod Domar dengan teori klasik, dimana teori klasik lebih menekankan terjadinya stationary state dalam pertumbuhan jangka panjang.

Model Harrod Domar didasarkan pada asumsi (Jhingan 1988, hal.292) ;

- 1).Ada ekuilibrium awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh.
- 2).Tidak ada campur tangan pemerintah.
- 3).Model ini bekerja dalam perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri.
- 4).Tidak ada kesulitan di dalam penyusuaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produktif.
- 5).Kecenderungan menabung rata – rata sama dengan kecenderungan menabung marginal.
- 6).Kecenderungan menabung marginal tetap konstan.
- 7).Koefisien modal, yaitu rasio stok modal terhadap pendapatan, diasumsikan tetap (fixed).
- 8).Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai seumur hidup.
- 9).Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama.
- 10).Tingkat harga umum konstan, yaitu upah uang sama dengan pendapatan nyata.
- 11). Tidak ada perubahan tingkat suku bunga.
- 12). Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi.
- 13). Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal.

### **Teori Schumpeter Dan Solow Swan**

**Schumpeter** dalam bukunya *The Theori of Economic Development* yang diterbitkan pada tahun 1908 (Sadono, 2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya *inovasi* atau perubahan atau perubahan-perubahan pada teknologi, yaitu menggunakan metode baru dalam produksi dan menemukan barang-barang baru. Schumpeter sangat yakin bahwa dalam jangka panjang tingkat hidup masyarakat dapat ditingkatkan karena adanya kemajuan teknologi. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya dapat dipacu dengan adanya inovasi melalui teknik-tehnik baru dalam proses pertumbuhan produksi.

Kemajuan teknologi sangat penting dalam akumulasi modal, karena dengan adanya akumulasi modal dan investasi didorong oleh kemajuan teknologi. Syarat terciptanya

teknologi adalah ; (1). Harus tersedia cukup calon-calon inovasi yaitu wirausahawan (entrepreneur), (2). Adanya lingkungan social politik dan teknologi yang bisa mendukung terciptanya inovasi baru. (3). Adanya sistim pembiayaan dan perkreditan yang kondusif bagi pelaksana inovasi.

Teori Neoklasik (Sadono, 2000) dikembangkan oleh **Robert Solow Swan**. Factor penentu pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh factor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregate. Neo Klasik berpendapat bahwa factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah factor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi merupakan factor utama penentu pertumbuhan ekonomi. Solow mengemukakan bahwa 88 persen dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dalam periode 1929-1982 disebabkan oleh kemajuan teknologi. Hal ini diperkuat oleh hasil temuan *Edwar Denison* pada periode yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebahagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi. Model Solow dikenal sebagai Residu Solow. Dalam Residu Solow mengukur bagian pertumbuhan output yang tidak dapat dijelaskan oleh pertumbuhan pemakaian modal dan tenaga kerja, tetapi sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi.

Aliran Neoklasik menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam proporsi *capital- labour ratio* artinya *proses produksi bisa saja terjadi substitusi input antara tenaga kerja dan modal*. Dan mereka menganggap bahwa akumulasi modal tergantung pada sikap hemat masyarakat pada kondisi kesempatan kerja penuh.

**Model Solow Swan** dengan fungsi produksi ;

$$Q = F (K, L)$$

K = modal

L = tenaga kerja

Q = output riil

Teori pertumbuhan Solow mempunyai asumsi dasar ;

1. tenaga kerja tumbuh dengan laju tertentu pada kondisi kesempatan kerja penuh
2. fungsi produksi  $Q = F(K, L)$  berlaku disetiap periode tetapi dengan ratio yang dapat berbeda-beda
3. terdapat kecenderungan menabung dari masyarakat. Jika pendapatan naik maka tabungan juga akan naik, sebaliknya jika pendapatan menurun maka tabungan juga cenderung turun.
4. semua tabungan masyarakat akan diinvestasikan atau  $S = I = \Delta K$
5. terjadi persaingan sempurna dipasar output maupun input.

### **Teori Myrdal**

Gunnar Myrdal (tahun 1971), adalah pemenang Hadiah Nobel 1974 untuk Ilmu Ekonomi, adalah orang yang selalu membrontak terhadap arus pendapat ahli-ahli ekonomi konvensional yang ada. Di dalam seluruh karyanya tentang pembangunan negara-negara terbelakang, tiga thema pokok selalu muncul ke depan : (1) bahwa jurang kemajuan materiil antara negara-negara maju dan negara-negara terbelakang kian hari kian besar; (2) bahwa jurang tersebut tidak dapat diperkecil dengan menggunakan teori-teori ekonomi konvensional yang ada; (3) bahwa Pemerintah negara-negara terbelakang harus bertindak lebih radikal untuk melaksanakan pembangunan, tindakan-tindakan mana umumnya harus menyimpang dari resep-resep teori ekonomi konvensional yang ada.

Thema-thema pokok tersebut muncul terus menerus dan mencapai kulminasinya dalam dua karyanya yang terakhir : "Asian Drama", 1968, dan "The Challenge of World Poverty," 1970.

Walaupun terdapat beranekaragam pendekatan terhadap pembangunan negara-negara terbelakang, Myrdal menggolongkannya ke dalam dua golongan besar : (1) pendekatan kolonial ; (2) pendekatan modern, atau "post approach". Menurut Myrdal, kedua pendekatan ini tidak relevan dan tidak obyektif. Karena itu, ia mengemukakan

pendekatannya sendiri, yang dinamakannya pendekatan institusionil, yang diuraikan di dalam kedua karya tersebut di atas.

a. Pendekatan Kolonial

dengan pendekatan kolonial dimaksudkan pendekatan yang secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau secara tidak sadar, membenarkan kedudukan dan tindakan negara-negara kolonial terhadap daerah jajahannya. Pendekatan yang dikembangkan pada zaman kolonial sampai dengan sekitar Perang Dunia II ini menghasilkan teori-teori yang menerangkan tentang kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pribumi di daerah-daerah jajahan, teori-teori mana sekaligus juga merupakan “alasan-alasan yang baik” bagi negara-negara penjajah untuk memanfaatkan dan membebaskan diri mereka dari tanggung jawab moral dan politik terhadap kemiskinan dan keterbelakangan daerah-daerah tersebut, dan sekaligus membenarkan mereka untuk melanjutkan penjajahan. Inilah segimkolonial dari pendekatan-pendekatan kolonial.

Masyarakat pribumi di daerah-daerah jajahan digambarkan oleh teori-teori kolonial sebagai masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang terbatas, tidak mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk menaikkan pendapat dan tingkat kehidupannya, mempunyai pandangan hidup yang sempit, menyerahkan diri kepada nasib, dan sebagainya. Sikap-sikap semacam inilah yang dikemukakan oleh teori-teori kolonial sebagai sebab-sebab yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pribumi di daerah-daerah jajahan. Yang menjadi pertanyaan ialah : dimanakah sumber-sumber yang menimbulkan sebab-sebab tersebut?

Adalah suatu kenyataan bahwa negara-negara penjajah, yang maju dan kaya, penduduknya berkulit putih, mempunyai kebudayaan yang berinduk pada Kebudayaan Eropa Barat, dan mempunyai iklim yang dingin. Di lain pihak, daerah-daerah jajahan, yang miskin dan terbelakang, penduduknya berkulit warna, mempunyai kebudayaan yang lain daripada kebudayaan Eropa Barat, dan beriklim tropis. Ketiga faktor inilah, yaitu ras bangsa, kebudayaan, dan iklim, yang sering dipandang oleh teori-teori kolonial sebagai sumber-sumber sebab dari kemiskinan dan keterbelakangan daerah-daerah jajahan. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini sebuah spekulasi yang memadukan faktor iklim dan lingkungan

alam dengan faktor ras bangsa di dalam menerangkan tentang keterbelakangan sesuatu bangsa :

“adalah sukar untuk mengatakan mengapa sesuatu ras bangsa mengalami kemajuan dan sesuatu yang lainnya mengalami stagnasi. Faktor spirituil memang merupakang faktor yang menentukan, tetapi ciri rasial sendiri adalah hasil akhir dari lingkungan geografis. Setiap unsur dari tubuh kita asalnya adalah dari dalam tanah; dan manusia, sama halnya dengan tumbuh-tumbuhan, bertumbuh dari tanah. Tanah dan iklim yang berbeda, menghasilkan manusia dan pohon-pohon yang berbeda. Dimana tanah dan iklim bersifat pemurah, sehingga dengan sedikit ayunan pacul sudah diperoleh penen, disitu tidak terdapat dorongan yang besar bagi manusia untuk bekerja. Yang terutama harus dicatat ialah, bahwa sesuatu ras bangsa akan sangat terhalang untuk maju jikalau selama berabad-abad ia hidup di bawah terik matahari yang menghanguskan, dan dari generasi ke generasi dilahirkan dengan malaria di dalam darahnya, yang merongrong kemauan, merusakkan hari kerja dari satu menjadi tiga, dan memendekkan usia dengan puluhan tahun.”

Karena ras sesuatu bangsa dan iklim sesuatu daerah tidak dapat diubah manusia, dan kebudayaannya pun sebaiknya jangan dicampuri orang luar, maka terbentuklah teori populer di zaman kolonial bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa kulit warna sudah menjadi suratan nasibnya, dan tidak banyak yang dapat dibuat untuk mengubah keadaan tersebut. Teori populer ini memperkuat membenaran sikap negara-negara penjajah untuk tidak memperbaiki nasib masyarakat pribumi di daerah-daerah jajahan, dan sekaligus juga melanjutkan penjajahannya:

“The racial inferiority doctrinr, in particular, helps us to understand why colonial rules often felt that nothing much could be done to raise the standards of the indigenous peoples, because their plight was the consequence of immutable biological facts. Explanations in terms of social conditions led to the same defeatist conclusions; the social environment was held outside the juris diction of the colonial governments.”



Salah satu alasan populer yang dipakai untuk membenarkan kedudukan dan tindakan penjajah ialah, bahwa masyarakat pribumi itu berbahagia di dalam keadaannya yang miskin dan terbelakang, bahkan mungkin jauh lebih berbahagia daripada golongan yang menjajahnya. Karena itu, mengapakah keadaan mereka yang berbahagia itu diubah?. Sesuatu perubahan akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang justru akan mengakibatkan frustrasi dan ketidakpuasan jikalau tidak dipenuhi. Lebih baik, biarkanlah mereka itu sebagaimana adanya.

Tidak dapat dikatakan bahwa semua teori yang dikemukakan di zaman kolonial bersifat kolonial. Di bidang anthropologi terdapat banyak penelitian yang Myrdal, secara tidak langsung penelitian-penelitian di bidang anthropologi turut memperkuat teori kolonial. Perhatian para ahli anthropologi umumnya ditujukan pada menemukan bagaimanakah masyarakat pribumi hidup dan bertahan. Perhatian ditujukan pada mengetahui dan menerangkan kebudayaan pribumi yang ada. Atas dasar ini, maka dengan beberapa kekecualian, pendekatan para anthropologi bersifat statis; perubahan-perubahan dipandang sebagai gangguan-gangguan terhadap organisasi dan hubungan-hubungan sosial yang ada. Walaupun mereka menentang ethnocentrisme Barat, tetapi penghargaannya terhadap kebudayaan masyarakat pribumi justru memberikan angin-belakang kepada pemerintah kolonial untuk tidak berbuat apa-apa terhadap masyarakat pribumi.

Selanjutnya dapat pula kita catat suatu kenyataan yang menyolok di zaman kolonial, yaitu, tidak adanya perhatian para ahli ekonomi di negara-negara penjajah untuk masalah kemiskinan dan keterbelakangan daerah-daerah jajahan, walaupun hal tersebut jelas-jelas termasuk bidang penelitian mereka. Massa rakyat di daerah-daerah jajahan sama miskinnya dahulu dan sekarang, tetapi mengapa baru sekarang ada perhatian terhadap nasib mereka? Sebabnya, menurut Myrdal, karena perhatian para ahli ekonomi dipengaruhi oleh situasi politik dunia. Kenyataan ini harus membuat kita curiga bahwa bukan saja perhatian para ahli ekonomi yang dipengaruhi oleh situasi politik, melainkan cara pendekatan dan hasil pendekatan mereka pun turut dipengaruhi, hal mana yang mengakibatkan hasil pendekatan mereka tidak obyektif.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa pendekatan kolonial menghasilkan teori-teori yang : (1) memandang kemiskinan dan keterbelakangan daerah-daerah jajahan sebagai kenyataan yang tidak terabaikan, dan karena itu tidak banyak yang dapat dibuat untuk mengubah kenyataan tersebut. Teori-teori tersebut bersifat pesimistis.

#### b. Pendekatan Modern

Dengan pendekatan modern dimaksudkan pendekatan terhadap masalah pembangunan yang dikembangkan terutama setelah Perang Dunia II, pendekatan mana, menurut Mydal mempunyai dua ciri utama : diplomatis dan optimistis. Kedua ciri ini membuat pendekatan modern tidak obyektif, melainkan sama halnya dengan pendekatan kolonial, menyimpang dari kebenaran.

Setelah Perang Dunia II berakhir, tiba-tiba meningkatlah perhatian dunia terhadap masalah kemiskinan dan keterbelakangan bekas daerah-daerah jajahan, yang kini telah menjadi negara-negara merdeka. Perhatian yang meningkat ini tidak seluruhnya berdasarkan alasan-alasan humanistis, karena massa rakyat di negara-negara terkebelakang tersebut sama miskinnya dahulu dan sekarang. Perhatian yang tiba-tiba meningkat ini disebabkan oleh tiga hal :

- (1) Likwidasi yang cepat dari kekuasaan kolonial didaerah-daerah jajahan;
- (2) Pergumulan negara-negara yang baru merdeka itu sendiri dengan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara;
- (3) Ketegangan politik internasional, terutama perang dingin antara blok kommunistis dan blok non-kommunistis, yang menjadikan nasib negara-negara terkebelakang sebagai obyek politik luar negeri dari negara-negara maju yang bersaing.

Peningkatan perhatian tersebut di atas meningkatkan pula kegiatan studi dan penelitian terhadap negara-negara terkebelakang. Karena nasib negara-negara terkebelakang kini menjadi obyek dari perang dingin, maka studi dan penelitian tentang negara-negara tersebut juga menjadi diplomatis. Di dalam pendekatan modern, istilah "underdeveloped," misalnya, telah digantikan dengan istilah "developing" agar jangan menyinggung perasaan negara-negara terkebelakang, dan sekaligus juga memberikan kesan dan harapan bahwa negara-negara tersebut sedang mengalami kemajuan, kemajuan mana

sedikit banyaknya adalah berkat bantuan dan konsep pembangunan dari negara sahabat. Pihak kommunistik dan non-kommunistik mengemukakan konsep pembangunan dan bantuannya untuk pembangunan negara-negara terkebelakang, disertai perhitungan yang optimistis tentang hasil yang akan dicapai. Hanya dengan mengesankan bahwa bantuan dan konsep pembangunan yang disedorkan itu akan berhasil, sesuatu negara terkebelakang dapat diharapkan akan menjadi sahabat dari negara donor. Negara-negara terkebelakang tersebut, bagaimanapun kecilnya dan miskinnya, secara keseluruhan membentuk mayoritas dalam Sidang Umum PBB, sehingga suara mereka perlu kiranya dimenangkan sebagai suara negara sahabat.

Suatu kenyataan lain yang menunjukkan sifat diplomatis dari pendekatan modern ialah diabaikannya masalah-masalah yang peka, seperti korupsi dan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Membicarakan masalah-masalah tersebut akan bersifat tidak diplomatis, karena bertentangan dengan kepentingan golongan yang berkuasa di dalam negara-negara yang terkebelakang.

Masalah-masalah yang peka, yang tidak menyenangkan tersebut, dengan mudah dapat diabaikan di dalam pendekatan modern, karena pendekatan tersebut menggunakan konsep-konsep ekonomi murni, yang serba matematis, tanpa memperhatikan faktor-faktor non-ekonomis. Dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi murni yang serba matematis, maka pendekatan modern tidak memperhatikan sikap mental dan lembaga-lembaga sosial ekonomi di dalam masyarakat padahal di dalam kenyataannya kedua faktor inilah yang menjadi sebab utama dari kemiskinan dan keterbelakangan dari negara-negara terbelakang. Apa yang dahulunya sangat ditekankan pendekatan kolonial, kini diabaikan di dalam pendekatan modern. Pendekatan modern menghasilkan pandangan yang optimistis; pendekatan kolonial menghasilkan pandangan yang pesimistis; keduanya tidak obyektif.

Ahli-ahli ekonomi yang menggunakan pendekatan modern tidak semuanya secara picik menganggap bahwa faktor-faktor non-ekonomis tidak penting. Ada yang memandangnya penting, tetapi menganggap bukanlah kompetisinya untuk memperhatikannya. Ada pula yang menganggap bahwa adalah tepat untuk terlebih dahulu membangun sebuah teori ekonomi, dan kemudian memperlengkapinya dengan

pertimbangan faktor-faktor non-ekonomis. Anggapan ini, menurut Myrdal, tidak benar, karena di dalam kenyataan tidak terdapat masalah-masalah ekonomi, sosiologi, politik, dan kebudayaan secara terpisah-pisah. Yang ada adalah sejumlah masalah yang kompleks dan sangkut-menyangkut. Secara ilmiah, pembedaan yang dapat dipertanggung-jawabkan hanyalah pembedaan antara faktor-faktor yang relevan dan yang kurang relevan terhadap pembangunan, pembedaan mana akan berbeda menurut masyarakat yang kita teliti. Tindakan mendahulukan penyusunan sebuah teori ekonomi, kemudian menempelkan-nempelkan faktor-faktor non-ekonomis padanya adalah sama dengan menghamburkan ragi ke dalam oven setelah roti selesai dibakar, suatu tindakan yang sama sekali tidak berguna. Memang setiap konsep teori harus sesederhana mungkin, tetapi penyederhanaan tidak berarti harus mengorbankan relevansi, dengan meniadakan faktor-faktor yang pokok.

Di dalam jangka waktu yang panjang setiap teori yang tidak sesuai dengan kenyataan akan ditiadakan oleh kenyataan itu sendiri. Hal ini agak sukar belaku bagi negara-negara terkebelakang. Sebabnya ialah, karena kurang terdapat data statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Walaupun demikian, melalui pengalaman-pengalaman yang pahit, sekurang-kurangnya mulai pertengahan tahun 1960-an, para ahli pembangunan mulai menyadari kekurangan teori-teorinya, dan memberikan tempat yang kian hari kian luas pada faktor-faktor non-ekonomis di dalam analisa mereka. Salah satu usaha perintis terjelma di dalam pendekatan institusionil dari Gunnar Myrdal.

#### c. Pendekatan Institusionil dari Myrdal

dengan pendekatan institusionil oleh Myrdal dimaksudkan pendekatan di dalam mana : "history and politics, theories and ideologies, economic structure and levels, social stratification, agriculture and industry and so on" dipelajari bukannya secara terpisah, melainkan "in their mutual relationship." Dengan lain kata masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan, terpisah-pisahkan unsur-unsur dan segi-seginya, melainkan ke dalam satu bangunan teori. Pendekatan yang sedemikian ini membuat teori pembangunan menjadi se-relevan mungkin dengan kenyataan yang dihadapi.

Selanjutnya, demikian Myrdal, setiap pendekatan yang ilmiah harus sedari permulaan menyatakan dengan tegas penilaian-penilaian yang mendasari pendekatan

tersebut. Data dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan suatu kerangka teoretis yang dipilih sang peneliti. Kerangka teoretis yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dan karena setiap pilihan itu harus didasarkan pada “value judgement”, maka hanyalah dengan jalan mengemukakan secara tegas penilaian yang dipergunakan seseorang dapatlah ia mempergunakan peralatan-peralatan teorinya secara jelas, tidak membias oleh penilaian-penilaian yang tersembunyi.

Di dalam “Asian Drama”, Myrdal mengemukakan sejumlah cita-cita modernisasi, yang digunakannya sebagai nilai-nilai untuk mengukur keterbelakangan dan kemiskinan negara-negara Asia Selatan, dan sekaligus juga sebagai cita-cita yang harus dicapai di dalam pembangunannya. Cita-cita modernisasi tersebut mencukupi sejumlah nilai, sebagai berikut :

- (a) Rasionalitas
- (b) Pembangunan dan perencanaan pembangunan
- (c) Kenaikan produktivitas
- (d) Kenaikan tingkat kehidupan
- (e) Keadilan sosial dan ekonomi
- (f) Perbaikan lembaga-lembaga sosial-ekonomi dan sikap mental masyarakat
- (g) Persatuan nasional
- (h) Kemerdekaan nasional
- (i) Demokrasi politik dalam arti yang sempit
- (j) Demokrasi dasar
- (k) Disiplin sosial

Nilai-nilai ini dituangkan ke dalam suatu dalil pendahuluan, bahwa peningkatannya berarti kemajuan dan pembangunan, sedangkan penurunannya berarti kemiskinan dan keterbelakangan. Pemilihan dalil pendahuluan semacam ini bersifat hipotesis, karena adalah tugas penelitian selanjutnya untuk membuktikan apakah dalil pendahuluan ini benar, relevan, berguna, dan dapat diwujudkan. Dengan pemilihan titik tolak yang tegas semacam ini pada awal penelitian, kita dapat mengabaikan diri dari pembiasaan-pembiasaan di dalam penelitian kita, dan mendekati obyektivitas

Nilai-nilai yang dikemukakan di atas bukanlah suatu daftar lengkap dari cita-cita modernisasi. Nilai-nilai lainnya dapat diturunkan dari apa yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut tidak selamanya saling mendukung, melainkan mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Rasionalitas, misalnya, jelas saling mengisi dengan kebutuhan akan pembangunan dan perencanaan pembangunan. Tetapi, disiplin sosial dan demokrasi mungkin bertentangan; demikianpun demokrasi dan perencanaan. Di samping pertentangan yang mungkin ada diantara nilai-nilai modernisasi tersebut, nilai-nilai tersebut juga umumnya bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Pertentangan-pertentangan ini jelas akan menghambat pembangunan. Pertentangan antara nilai-nilai modernisasi dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat umum, diluar para pejabat dan kaum elite, dinamakannya "obstacles". Keduanya menghambat pembangunan.

Mengapakah nilai-nilai modernisasi di atas dipilih oleh Myrdal sebagai ukuran untuk mengukur keterbelakangan negara-negara Asia Selatan, dan sekaligus juga sebagai tujuan yang harus dicapai di dalam pembangunan? Sebabnya ialah, karena negara-negara tersebut, dan negara-negara terkebelakang pada umumnya, sudah memutuskan untuk memodernisasi bangsa dan negaranya. Modernisasi telah menjadi suatu ideologi, suatu agama nasional, yang dicantumkan di dalam undang-undang dasar, program-program pembangunan, dan pernyataan-pernyataan politik oleh para pemimpin dan kaum terdidik bangsa-bangsa tersebut. Walaupun modernisasi telah dinyatakan dengan resmi sebagai tujuan yang hendak dicapai, namun antara tujuan ideal tersebut dengan kenyataan yang ada, terletak suatu jurang yang besar. Ketegangan antara yang ideal dan yang kenyataan inilah yang merupakan sumber jatuh bangunnya negara-negara Asia Selatan di dalam usah pembangunan mereka. Jatuh bangunnya mereka inilah yang dilukiskan oleh Myrdal sebagai drama, di dalam mana "the leading figures" adalah "the people of South Asia themselves, above all their educated class."

"This drama has its unity in a set of inner conflicts operating on people's minds : between their highpitched aspirations and bitter experience of a harsh reality;

between the desire for change and improvement and mental reservations and inhibitions about accepting the consequences and paying the price.”

Kenyataan adanya jurang antara yang ideal dan yang kenyataan tersebut, mengundang setiap pengamat untuk mengidentifikasikan kondisi-kondisi kemiskinan dan kondisi-kondisi pembangunan. Identifikasi ini oleh Myrdal di dasarkan pada nilai-nilai modernisasi yang telah dipilih secara sadar sebagai ukuran dan tujuan pembangunan.

Dengan pendekatan institusionilnya yang didasarkan pada nilai-nilai modernisasi tersebut, Myrdal tiba pada teori institusionilnya. Teori ini, secara singkat mengatakan bahwa kemiskinan, pembangunan, dan perencanaan pembangunan untuk negara-negara Asia Selatan ditentukan oleh sejumlah kondisi yang sangkut-menyangkut, sebagai berikut:

- (1) Output and incomes (produksi dan pendapatan)
- (2) Conditions of production (kondisi dari produksi)
- (3) Levels of living (tingkat kehidupan)
- (4) Attitudes towards life and work (sikap mental terhadap hidup dan kerja)
- (5) Social institutions (lembaga sosial)

Kondisi-kondisi di dalam ketiga kategori yang pertama mencakupi faktor-faktor ekonomis; kategori-kategori keempat dan kelima mencakupi faktor-faktor non-ekonomis; kategori ke-6 adalah : politik pembangunan. Politik pembangunan dapat dipandang sebagai termasuk pada faktor-faktor ekonomis, jikalau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh ditujukan pada mempengaruhi kondisi-kondisi di dalam ketiga kategori yang pertama.

Ditinjau dari sudut ideologi modernisasi, kondisi-kondisi di Asia Selatan dalam kelima kategori di atas adalah tidak diinginkan ke arah yang diinginkan merupakan paningkatan dari sistim sosial yang bersangkutan; perubahan ke arah yang tidak diinginkan merupakan kemunduran.

Walaupun Myrdal melihat kelima kategori di atas sebagai mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya, dalam arti bahwa peningkatan dalam satu kategori akan mengakibatkan perubahan dalam kategori-kategori yang lainnya, tetapi dua kategori yang sangat ditekankannya adalah kategori (4) dan kategori (5) : sikap mental terhadap hidup dan kerja, serta lembaga-lembaga sosial. Kondisi-kondisi dalam kategori (4) dan

kategori (5) tersebut oleh teori-teori konvensional biasanya dipandang sebagai faktor-faktor non-ekonomis, yang tidak mendapatkan perhatian.

Hubungan timbal balik antara kondisi-kondisi tersebut telah menangkap negara-negara Asia Selatan ke dalam suatu lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Lingkaran ini hanya dapat dipatahkan melalui “big push” yaitu usaha pembangunan yang besar dan bersungguh-sungguh, yang ditujukan pada semua kondisi, bukan hanya pada kondisi-kondisi ekonomis belaka, seperti yang lazimnya dikemukakan teori-teori konvensional. Usaha pembangunan yang hanya ditujukan pada kondisi-kondisi ekonomis belaka, akan menemui hambatan dan rintangan dari arah kondisi-kondisi non-ekonomis, yang akan memperkecil atau meniadakan usaha pembangunan tadi. Perubahan yang kecil-kecil akan dihapuskan oleh kemiskinan yang ada, penambahan penduduk, yang diperkuat oleh sikap mental dan lembaga-lembaga sosial. “In many respect”, demikian Myrdal “a large and rapid change of attitudes and institutions is not more difficult than a series of small and gradual changes just as a plunge into cold water is less painful than a slow submersion”.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pembangunan baru terjadi jikalau terjadi peningkatan pada kelima kondisi yang sangkut-menyangkut itu. Dan, pembangunan itu tidak dapat terjadi secara otomatis, khususnya untuk negara-negara Asia Selatan, melainkan dilaksanakan secara berencana. Disinilah letak peranan “visible hand” dari Pemerintah. Tidak ada “invisible hand”; tidak ada “economic man” yang bertindak rasional dengan memperhitungkan rugi-laba. Yang ada adalah “the whole man”, yang digerakkan faktor-faktor ekonomis dan non-ekonomis, pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak rasional. Itulah kenyataan.

### **Teori Keynes**

**Jhon Maynard Keynes dalam buku W.I.M. Poli (tahun 2010)** lahir tahun 1883 dan meninggal tahun 1946. Keynes dikenal di suatu Universitas besar di Inggris yakni Cambridge University Inggris. Keynes adalah seorang tokoh Ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Pengikut-pengikutnya adalah *Alvin Hansen* hidup dari tahun (1887-1975) besar di Harvard University, Amerika Serikat. *Paul Samuelson*, besar di Massachusetts Institute of Technology)



Amerika Serikat. *Simon Kuznets*, Colombia University, Harvard University, Amerika Serikat. *Wassila Leontief* Harvard University Amerika Serikat. Keynes sebagai seorang pakar ekonomi ulung yang terkenal dengan karya-karyanya. Bukunya yang paling terkenal adalah berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Keynes banyak mengkritik pandangan klasik :

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian selalu menuju keseimbangan dengan kekuatan mekanisme pasar bebas. Menurut kaum klasik, bahwa kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli. Karena daya beli tersebut terbentuk karena adanya balas jasa atas faktor-faktor produksi berupa upah, gaji, bunga, sewa dan balas jasa terhadap penggunaan faktor produksi lainnya. Secara otomatis pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini yang disebut oleh Jan Baptis Say, bahwa penawaran secara otomatis menciptakan permintaan sendiri.

Jika terjadi ketidakseimbangan (disekuilibrium) misalnya penawaran lebih besar dari permintaan, dan terjadi pengangguran maka keadaan ini dinilai oleh klasik hanya bersifat sementara dan akan ada suatu tangan yang tak kentara (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian kepada keadaan keseimbangan. Kaum klasik juga percaya bahwa dalam kondisi keseimbangan semua sumberdaya, termasuk tenaga kerja digunakan secara penuh (*fully employed*), sehingga ekonomi dengan mekanisme pasar tidak akan terjadi pengangguran. Tenaga kerja mau bekerja dengan upah rendah jika terjadi pengangguran. Pada tingkat upah rendah perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sehingga tidak ada lagi yang menganggur, kecuali pekerja memilih-milih pekerjaan. Oleh kaum klasik bagi mereka yang pilih-pilih pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Tetapi pengangguran sukarela. Klasik juga percaya bahwa jumlah tabungan masyarakat akan selalu sama dengan jumlah investasi perusahaan.

### **Kritik Keynes Terhadap Klasik**

Keynes mengkritik bahwa pendapatan seseorang tidak semua dikonsumsi tetapi juga di tabung (*saving*). Maka sebagian dari pendapatan terjadi kobocoran dalam bentuk

tabungan. Sehingga akan terjadi penawaran tidak sama dengan permintaan. Permintaan efektif biasanya lebih kecil dari penawaran total (produksi total).

Dalam kondisi mekanisme ekonomi pasar bebas seperti yang dianut oleh paham klasik tentu tidak ada lagi ekonomi tertutup, tetapi masyarakat bisa memilih berbagai macam barang yang diproduksi dari luar. Dan tidak otomatis masyarakat membeli barang yang diproduksinya sendiri, sehingga penawaran total tidak otomatis sama dengan permintaan total.

Menurut Keynes pandangan klasik bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaan sendiri, hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Keynes juga membantah tentang pandangan klasik bahwa tabungan akan selalu sama dengan investasi. Dalam kenyataan motif seseorang orang untuk menabung berbeda dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Pengusaha melakukan investasi dengan motif keuntungan, sedangkan motif masyarakat melakukan penabungan didorong oleh berbagai faktor, seperti menabung untuk berjaga-jaga, menabung untuk mengamankan hartanya, sehingga jumlah tabungan tidak akan sama dengan jumlah investasi. Dengan demikian jika hal ini tidak diantisipasi dengan tangan yang kentara (pemerintah) maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian.

Keynes mengatakan bahwa tidak ada penyesuaian secara otomatis melalui mekanisme pasar untuk menjamin perekonomian akan berada dalam keseimbangan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes bahwa buruh mempunyai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh. Dan lagi pula telah ada undang-undang ketenagakerjaan dan upah buruh yang akan mengikat perusahaan dalam penetapan upah.

### **Pokok Pikiran Keynes**

Keynes dalam bukunya telah merumuskan teori umum tentang kesempatan kerja, suku bunga dan uang. Teori Keynes dipandang sebagai suatu teori mengenai kesempatan kerja dan pendapatan. Keynes dalam Sumitro (tahun 1991) merumuskan dalil teorinya bahwa Pendapatan total secara agregatif bagi masyarakat sama dengan konsumsi total secara agregatif ditambah investasi total (agregatif). Tingkat konsumsi tergantung pada keinginan

seseorang untuk berkonsumsi. Dan keinginan untuk berkonsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Demikian pula keinginan menabung tergantung pada pendapatan. Karena menabung adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi.

Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal. Efisiensi marginal dari investasi modal itu tergantung dari (dipengaruhi) ekspektasi (dugaan, pengharapan) pada pihak usahawan investor tentang imbalan-jasa (laba) yang akan diperoleh dari investasi modal yang bersangkutan. Sudah logis kiranya dalam ekspektasi si investor, imbalan-jasa (laba) yang diharapkan akan diperoleh, harus melebihi bunga yang harus diperhitungkan dalam penggunaan modal.

Pandangan Keynes tentang tingkat bunga bukanlah merupakan titik pencerminan dari pasok (supply) tabungan di satu pihak dan permintaan untuk investasi di pihak lain. Keynes mengatakan bahwa, tingkat bunga itu merupakan faktor yang berdiri sendiri (independent) dari pasok tabungan dan permintaan investasi. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter semata-mata dan tergantung dari hasrat orang untuk menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas. Singkatnya tingkat bunga tergantung dari (dipengaruhi) hasrat (mengutamakan) likuiditas atau *liquidity preference*. Di sinilah diungkapkan istilah pengertian baru dalam konsep Keynes, *liquidity preference* dalam kaitannya dalam tingkat bunga.

Tingkat bunga adalah imbalan-jasa (harga) yang harus dibayar kepada si penabung agar ia bersedia untuk melepaskan bagian tabungannya yang ditahan (disimpan) dalam bentuk dana likuiditas tadi itu untuk selanjutnya dicairkan ke dalam investasi. Dengan kata lain, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar agar dana likuiditas itu tidak disimpan, melainkan dilepaskan untuk investasi. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa jumlah tabungan yang terkumpul dalam masyarakat semuanya akan tersalur ke dalam investasi. Karena Golongan yang menabung bukanlah golongan yang sama yang melakukan investasi. Masing-masing pihak dalam perilakunya terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Mungkin saja dalam suatu keadaan tertentu, tingkat bunga sudah rendah, artinya pihak penabung bersedia melepaskan dana likuiditasnya dengan harga murah. Kendatipun

begitu bisa saja terjadi kurang adanya permintaan terhadap tabungan yang sudah tersedia dengan harga yang murah.

Dalam keadaan tertentu, mungkin saja para investor kurang berminat untuk melakukan investasi (walaupun tingkat bunga sudah menurun), oleh karena ekspektasinya kurang cerah tentang perkembangan masa depan. Sebaliknya dalam suasana keadaan yang lain bisa juga terjadi bahwa dari pihak investor permintaannya akan dana modal meningkat dan mereka bersedia untuk membayarnya dengan harga (tingkat bunga) yang tinggi. Walaupun begitu, para penabung tetap bersikap menahan sebagian besar tabungannya dalam bentuk dana likuiditas. Mereka ingin menguasai dana likuiditas dalam jumlah yang cukup memadai sebagai cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Hal itu akan berlaku jika dalam persepsi mereka dirasakan masih adanya banyak ketidakpastian yang terkandung dalam perkembangan keadaan sekitar.

Masalahnya timbul, jika penambahan tabungan yang terkumpul secara agregatif (dalam masyarakat secara keseluruhan) tidak semuanya digunakan sebagai penambahan investasi. Akibatnya ialah produksi dan pendapatan dalam masyarakat menurun, pada gilirannya pengeluaran agregatif untuk membeli hasil produksi menjadi berkurang – dengan kata lain : tenaga beli riil atau permintaan efektif, *effective demand*, dalam masyarakat menjadi rendah – sehingga terjadi pengangguran yang meluas.

Konsekuensi dari hasil pemikiran tersebut ialah : di kala permintaan efektif dalam masyarakat menjadi rendah dan pengangguran meluas, maka harus ada tindakan koreksi terhadap keadaan itu dengan menambah pengeluaran agregatif. Maksudnya, agar tercapai suatu keadaan ekuilibrium dengan adanya kesempatan kerja secara penuh dan kapasitas produksi terpasang yang digunakan sepenuhnya pula. Hanya dengan begitu dapat dijaga kestabilan ekonomi dan politik dalam perkembangan masyarakat selanjutnya.

Makna kesimpulan tersebut membawa *ramifikasi* (akibat pengaruh yang bercabang-cabang) terhadap peranan negara dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi-keuangan. Di kala kegiatan ekonomi tertekan pada tingkat rendah selama masa waktu yang cukup panjang dengan adanya pengangguran massal yang membawa banyak penderitaan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam keadaan depresi ekonomi serupa itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan suatu sikap pasif pada pihak negara dan pemerintahan. Pemerintah yang bersangkutan tidak boleh menunggu sampai proses kegiatan ekonomi “dengan sendirinya” akan mengerahkan kekuatan-kekuatan korektif terhadap keganjilan dan ketimpangan dalam perkembangan keadaan.

Keadan depresi yang ditandai oleh deflasi (harga umum turun) atau keadaan inflasi (harga umum naik), semuanya sebagai akibat dari perubahan tingkat pengeluaran agregatif dan permintaan efektif. Perubahan pada tingkat permintaan efektif mempengaruhi penawaran dan permintaan pada sektor tenaga kerja.

Untuk mencapai sasaran pokok, yaitu tingkat kegiatan ekonomi yang menjamin kesempatan kerja secara penuh, maka tidak dapat tiada harus ada intervensi negara melalui kebijaksanaan *budgeter/fiskal*. Kebijakan itu harus ditujukan secara aktif pada pengendalian pengeluaran agregatif yang menjamin permintaan efektif secara memadai.

Kebijaksanaan yang dimaksud kini lazim disebut dengan *demand management* (atau lebih lengkap, *management of aggregate demand*), artinya kebijaksanaan yang berpola pengelolaan terhadap pengeluaran agregatif dan pengendalian tentang permintaan efektif.

Dalam keadaan depresi, deflasi dan pengangguran, hendaknya dilakukan pengeluaran pemerintah untuk menambah pengeluaran agregatif dalam masyarakat. Tambahan pengeluaran pemerintah itu bisa bersumber pada pinjaman *ataupun* dengan menciptakan defisit anggaran negara (*deficit spending*) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam keadaan depresi yang sedang dihadapi itu. Sebaliknya di kala kegiatan ekonomi berjalan pada tingkat tinggi yang ditandai dengan inflasi, harus diciptakan surplus pada anggaran negara.

Dalam perkembangan keadaan yang senantiasa menunjukkan gerak gelombang naik-turunnya kegiatan ekonomi, maka kebijaksanaan perihal pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif mempunyai corak yang *kontra-siklis* atau *anti-siklis* (*contra-cyclical or anti-cyclical policies*).

Disini nampak perbedaan mendasar yang menyangkut peranan kebijaksanaan negara antara mazhab Keynes dan Neo-Keynes di satu pihak dan di pihak lain haluan pandangan yang dianut oleh kalangan luas dalam mazhab Klasik dan Neo-Klasik, yaitu yang berpedoman

pada prinsip *laissez faire, laissez aller* : proses ekonomi sebaiknya diserahkan kepada permainan bebas (tanpa intervensi) oleh dan di antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

Kerangka analisis dan pemikiran Keynes dengan sadar dan sengaja dipaparkan di atas dalam bentuk dan wujud perumusan yang sangat bersahaja. Maksud dan sifat telaahan ini ialah untuk menonjolkan saripatinya, supaya menjadi lebih jelas kaitan perbandingan antara pemikiran Keynes dengan sistem pemikiran yang sebelum itu berlaku umum dari sisi lain dampaknya terhadap perkembangan pemikiran selanjutnya selama beberapa dasawarsa sejak Perang Dunia II.

Dalam hubungan ini ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, ialah : (1) hasil kajian dan pemikiran Keynes membuat tidak berlaku lagi suatu dalil kuat dalam mazhab Klasik, yaitu seakan-akan kekuatan-kekuatan ekonomi cenderung berkisar ataupun dengan sendirinya menuju pada keadaan ekuilibrium dengan kesempatan kerja secara penuh ; (2) tabungan perseorangan/rumah tangga mencerminkan kebajikan dalam pola hidup masing-masing; namun, adakalanya dalam keadaan tertentu, kebajikan pribadi itu yang secara bersamaan terwujud sebagai tabungan masyarakat secara menyeluruh (tabungan agregatif) justru bisa merugikan kepentingan masyarakat umum, -- yaitu jika terjadi ketimpangan antara tabungan dan investasi dalam arti tabungan menjadi "terlalu banyak" dalam perimbangannya terhadap jumlah investasi yang akan dilaksanakan; (3) kaitan antara analisis ekonomi dan kebijaksanaan negara yang berpola intervensi aktif guna menanggulangi perubahan-perubahan pada pengeluaran agregatif dan permintaan efektif (kebijaksanaan budgeter yang bercorak kontra-siklis).

Keynes memandang hasil karyanya sebagai pembebasan diri dari kancah pemikiran ekonomi yang masih lazim di zamannya; bahkan seolah-olah sebagai suatu pemutusan hubungan total dari pemikiran mazhab Klasik dan Neo-Klasik. Memang oleh Keynes dan para pendukung setianya semua pemikiran ekonomi sebelum adanya *The General Theory* secara pukul rata digolongkan saja dalam satu mazhab Klasik, yang harus dipisahkan dari era *Ekonomi Baru*. Hal itu satu sama lain muncul tanpa memperhatikan tahapan dan aneka ragam dalam pemikiran ekonomi yang sudah berkembang selama waktu lebih dari tiga ratusan tahun sejak abad XVI.

### **Peran Pemerintah Dalam Perekonomian**

Depresi besar ekonomi pada awal tahun 1930-an, sudah tidak bisa dikendalikan oleh mekanisme pasar bebas yang dianut oleh kaum klasik. Harapan keseimbangan yang ingin dicapai secara otomatis tidak dapat dibuktikan, dan merupakan depresi terburuk disepanjang sejarah. Peran tangan yang tak kentara tidak dapat mengendalikan depresi ekonomi pada saat itu.

Berdasar pada fakta tersebut maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu kepada mekanisme pasar. Dalam batas tertentu peran pemerintah sangat diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluaran untuk membelanjai proyek padat karya, sehingga sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan kalau terjadi inflasi maka pemerintah bisa menarik jumlah uang yang beredar dengan cara mengenakan pajak lebih tinggi.

Keynes bukan tidak percaya pada pandangan klasik yang membiarkan keseimbangan ekonomi akan tercipta melalui mekanisme pasar bebas, akan tetapi Keynes menilai bahwa jalan menuju keseimbangan dan full employment sangat panjang dan rumit. Jika diserahkan kepada mekanisme pasar bebas untuk mencapai keseimbangan dibutuhkan waktu yang sangat lama.

Keynes mempunyai persepsi yang sama dengan Marx, yang mengatakan bahwa sistem liberal tidak dapat terhindar dari fluktuasi ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Karena itu Marx berusaha ingin menghancurkan sistem kapitalis liberal dan menggantikannya dengan sistem sosialis. Sedangkan Keynes ingin menyelamatkan sistem liberal tersebut dengan dikendalikan melalui tangan yang kentara pada batas-batas tertentu. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

## **BAB V. MODEL PERENCANAAN EKONOMI**

### **Model Analisa Input-Output**

Tehnik input-output merupakan suatu tehnik yang dikenal Wassily W. Leontief tahun 1951 dalam Buku Hollis Chenery (tahun 1959). Tehnik ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar-industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tehnik ini dikenal sebagai tehnik analisa antar-industri.

Input adalah sesuatu yang dibeli oleh perusahaan, sedangkan output adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan. Jadi input merupakan pengeluaran perusahaan dan output merupakan penerimaan perusahaan. Jumlah nilai output merupakan biaya total suatu perusahaan dan jumlah nilai output merupakan penerimaan total dari suatu perusahaan,

Input suatu industri merupakan output bagi industri lainnya, dan sebaliknya output suatu industri adalah merupakan input bagi industri lainnya. Pada akhirnya keterkaitan antar sektor akan menyebabkan terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran di dalam suatu perekonomian.

#### **Analisis ini mempunyai tiga ciri utama :**

- 1) Analisis I-O memusatkan perhatian pada perekonomian dalam keadaan seimbang,
- 2) Analisis I-O tidak memusatkan perhatian pada analisis permintaan akhir, tetapi pada masalah tehnik produksi,
- 3) Analisis I-O didasarkan pada penelitian empiris

#### **Asumsi dalam analisis Input-Output :**

- 1). Suatu perekonomian dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor antar-industri dan sektor permintaan akhir, dan masing-masing dapat dipecah-pecah ke dalam subsektor,
- 2). Output total setiap sektor antar-industri pada umumnya dapat digunakan sebagai input oleh sektor itu sendiri, oleh sektor industri lain, dan oleh permintaan akhir,
- 3). Setiap industri hanya memproduksi satu produk homogen,



- 4). Harga, permintaan konsumen dan persediaan faktor produksi adalah tertentu (given),
- 5). Perbandingan antara hasil dan skala yang bersifat konstan,
- 6). Kombinasi input ditetapkan dengan proporsi yang ketat. Proporsi input terhadap output selalu konstan, dengan demikian tidak terjadi kemajuan teknologi,
- 7). Di dalam kegiatan produksi tidak terjadi eksternalitas ekonomi dan disekonomi.

**Tabel Input-Output**

<p><b>Kuadran 1</b></p> <p>Memuat arus transaksi antar sektor</p>	<p><b>Kuadran 2</b></p> <p>Merupakan permintaan akhir dan output total yang dirinci menurut sektor</p>
<p><b>Kuadran 3</b></p> <p>Memuat input primer yang dipergunakan maupun output yang dihasilkan masing-masing sektor</p>	<p><b>Kuadran 4</b></p> <p>Berisi jumlah input primer yang juga merupakan jumlah permintaan akhir dan output total.</p>

**Kuadran Pertama :**

Memuat arus transaksi antar sektor. Kuadran pertama dan yang terpenting dari keempat kuadran ini, biasanya disusun dalam tiga bentuk. Pertama dalam bentuk arus barang dari sektor tertentu ke sektor-sektor lainnya dan disebut table *transaksi* antar sektor atau input antara, yang kedua dalam bentuk *koefisien tehnik* yaitu perbandingan dari input tertentu dengan output sektor yang mempergunakannya dan yang ketiga adalah bentuk matriks *invers koefisien tehnik* tersebut. Yang terakhir inilah yang banyak dipergunakan dalam berbagai perhitungan. Ketiga bentuk matriks kuadran pertama tersebut tampak disadur dari satu sama lain, yaitu yang kedua dari yang pertama, dan yang ketiga dari yang kedua.

**Kuadran Kedua :**

Merupakan permintaan akhir dan output total yang dirinci menurut sektor. Permintaan akhir yang merupakan bagian kuadran kedua pada dasarnya merupakan pendapatan

nasional menurut pengeluaran yang bila diperlukan dapat dirinci menjadi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan netto impor.

**Kuadran Ketiga :**

Memuat input primer yang dipergunakan maupun output yang dipergunakan dan output yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Kuadran ketiga menunjukkan input primer (atau nilai tambah) yang jumlahnya menunjukkan pendapatan nasional pula, ini diperinci menurut sektor (lapangan usaha). Bila data tersedia, maka kuadran ketiga ini sebagai nilai tambah dan dapat pula diperinci menjadi upah/gaji, sewa tanah, bunga dan laba pengusaha dan dengan demikian terdapat pendapatan nasional menurut pendapatan.

**Kuadran Keempat :**

Berisikan jumlah input primer yang juga merupakan jumlah permintaan akhir dan output total. Kuadran keempat jelas menunjukkan jumlah pendapatan nasional dan jumlah produksi.

Bila matriks dibaca menurut baris, maka setiap barisnya menunjukkan alokasi produksi yang dihasilkan oleh berbagai sektor ke berbagai sektor-sektor lainnya, termasuk sektor yang bersangkutan. Sebaliknya setiap kolom bersama input primer menunjukkan fungsi produksi sektor yang bersangkutan.

Untuk lebih jelas lagi, maka uraian di atas dituangkan dalam tabel I-O perekonomian Hipotetik sesuatu Negara yang terdiri atas tiga sektor, yaitu sektor pertanian, industri dan jasa.

Tabel transaksi Negara tersebut adalah seperti di bawah ini.

Pemakai Pembuat	Pertanian	Industri	Jasa	Permintaan akhir (C+I+G+X-M)	Permintaan Total
Pertanian	25	20	10	85	140
Industri	17	45	13	75	150
Jasa	15	18	12	50	95
Input primer (Nilai Tambah)	83	67	60	0	210
Output Total	140	150	95	210	595

Sektor pertanian ke sektor sendiri (25), industri (20), jasa (10) dan untuk memenuhi permintaan akhir (85). Jumlah keseluruhan output adalah 140 (25+20+10+85). Angka-angka tersebut dinyatakan dalam satuan uang (Rp). Interpretasi baris industri dan jasa adalah sama. Matriks kuadran 1 inilah yang disebut matriks transaksi. Seperti tampak dalam tabel di atas, maka angka dalam kuadran 2 menunjukkan permintaan akhir maupun output total sektoral.

Seperti telah diuraikan di atas, maka kolom suatu sektor menunjukkan fungsi produksi sektor yang bersangkutan. Jadi sektor pertanian mempergunakan sebagai input, hasil sektor pertanian (25), sektor industri (17), (output total) tentu saja mempunyai nilai yang sama dengan permintaan akhir total, yaitu 140. Interpretasi yang sama berlaku untuk kolom industri maupun jasa.

Jika output total  $X_i$  dari suatu sektor ekonomi ke-1 dibagi kedalam berbagai sektor ekonomi lainnya; 1,2,,3, n, dan ditambah dengan permintaan akhir, maka persamaannya sebagai berikut :

$$X_i = x_{i1} + x_{i2} + x_{i3}, \dots x_{in} + y_i$$

Artinya total produk sektor i menjadi input antara pada sektornya sendiri dan sektor lain ditambah dengan permintaan akhir (Final Demand). Jika ditambah dengan sektor luar negeri impor maka pemakaian barang impor tersebut ada yang menjadi konsumsi akhir dan ada yang dipakai sebagai input antara. Sehingga sulit untuk memilah kemana impor tersebut digunakan. Dengan demikian tetap menjadi satu kesatuan. Persamaannya adalah menjadi:

$$\sum x_i + y_i = X_i + M_i,$$

Selanjutnya untuk mendapat *matriks koefisien input* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

di mana :

$a_{ij}$  = Koefisien input dari sektor j dari sektor i

$x_{ij}$  = Penggunaan input dari sektor i oleh sektor j

$X_j$  = Output sektor j

Matriks koefisien teknik dibentuk berdasarkan angka yang terdapat dalam kuadran pertama dan ketiga dengan membagi setiap angka yang terdapat dalam masing-masing kolom dengan nilai total output yang bersangkutan. Bila ini dikerjakan, maka diperoleh total koefisien teknik seperti tergambar dalam matriks di bawah ini, yang disebut matriks **A**.

Matriks **A** ini tidak mencakup nilai input primer.

Pemakai Pembuat	Pertanian	Industri	Jasa
Pertanian	0,19	0,13	0,11
Industri	0,12	0,3	0,14
Jasa	0,11	0,12	0,13

Langkah selanjutnya adalah **menentukan matriks Pengganda**. Matriks pengganda dibutuhkan untuk memproyeksikan dampak dari perubahan suatu sektor terhadap keseluruhan sektor. Matriks pengganda dikalikan dengan matriks permintaan akhir, maka dalam proyeksi akan menghasilkan output baru untuk keseluruhan sektor. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- 1). Dari angka-angka tabel transaksi, hitung koefisien input (matriks A)
- 2). Hitung matriks  $(1 - A)$ , yaitu matriks identitas kemudian dikurangi matriks koefien input.
- 3). Hitung matriks pengganda, yaitu kebalikan (invers) dari matriks  $(1-A)$ . Matriks pengganda  $= (1 - A)$
- 4). Proyeksi dampak perubahan yang terjadi dengan cara matriks pengganda dikalikan matriks permintaan akhir yang berubah.

**Matriks  $1 - A$  dari angka pada tabel diatas adalah :**

$$\begin{matrix}
 \mathbf{1} & - & \mathbf{A} & = & \mathbf{1 - A} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & - & \begin{pmatrix} 0,19 & 0,13 & 0,11 \\ 0,12 & 0,3 & 0,14 \\ 0,11 & 0,12 & 0,13 \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} 0,81 & -0,13 & -0,11 \\ -0,12 & 0,70 & -0,14 \\ -0,11 & -0,12 & 0,87 \end{pmatrix}
 \end{matrix}$$

Berdasarkan matriks  $1 - A$ , dibuat matriks pengganda yaitu matriks kebalikan (invers) dari matriks  $(1 - A)$  yaitu :

$$B = (1 - A)^{-1}$$

Dimana :

B = matriks pengganda

1 = matriks identitas

A = matriks koefisien input

Setelah matriks (1-A) diketahui, kita menghitung Determinan dari matriks tersebut yaitu :

$$\begin{aligned}
 D &= (0,81 \times 0,70 \times 0,87) + (-0,13 \times -0,14 \times 0,11) + (-0,11 \times -0,12 \times -0,12) - \\
 &\quad (-0,11 \times 0,70 \times -0,11) - (-0,12 \times -0,14 \times 0,81) - (0,87 \times -0,12 \times -0,13) \\
 &= 0,46
 \end{aligned}$$

-Menghitung kofaktor dari matriks (1-A) dan hasilnya adalah matriks kofaktor :

-Kemudian mentranspose matriks kofaktor tersebut untuk menghasilkan matriks adjoint.

- membagi matriks adjoint dengan determinan dari matriks (1 - A), dan hasilnya adalah kebalikan (inverse) dari matriks (1- A) atau  $(1-A)^{-1}$  . **inverse dari matriks (1-A) disebut dengan matriks pengganda.**

-selanjutnya mengalihkan matriks pengganda dengan dengan permintaan akhir dari X1, X2

-Membagi matriks adjoint dengan determinan dari matriks (1-A) dan hasilnya adalah kebalikan (inverse) dari matriks (1-A) atau  $(1-A)^{-1}$ . Inverse dari matriks (1-A), disebut pengganda.

-Mengalikan matriks pengganda dengan permintaan akhir dari X1, X2 dan X3 yang berubah (hasil proyeksi) untuk mendapatkan total output X1, X2, dan X3 yang baru. Hasilnya adalah matriks perkalian.

Berdasarkan koefisien matriks input, dibuat matriks *invers leontief* yang mempunyai arti sangat penting dalam berbagai analisa dengan mempergunakan tabel I-O.

Rumus matriks tersebut adalah :  $(I - A)^{-1}$ . Di bawah ini adalah bentuk matriks  $(I - A)^{-1}$  tersebut. Dengan menggunakan program Excell maka matriks invers yang disebut juga matriks pengganda adalah sebagai berikut :

$$\begin{matrix}
 1,28 & 0,21 & 0,11 \\
 0,19 & 1,50 & 0,21 \\
 0,13 & 0,17 & 1,07
 \end{matrix}$$

Analisa struktural Negara tertentu yang dikerjakan berdasarkan atas Tabel I-O, merupakan analisa statis dalam arti bahwa hanya menggambarkan keadaan pada waktu tertentu. Dengan membandingkan dua keadaan yang digambarkan oleh Tabel I-O yang

dibuat pada tabel berbeda, maka dapat diperoleh analisa statis komparatif. Analisa struktural dinamis dapat dicapai dalam metode regresi berdasarkan atas data *Time Series* pendapatan nasional untuk beberapa tahun. Rasanya akan makin lengkap, bila analisa dinamis semacam ini didukung oleh analisa statis berdasarkan atas Tabel I-O untuk tahun-tahun tertentu dalam kurun waktu yang sama, seperti dicakup oleh data pendapatan nasional yang dipergunakan. Jadi, umpamanya saja diadakan analisa struktural terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan data time series produk domestic bruto (PDB) antara tahun 1970-1985. Analisa tentu akan lebih tajam lagi, bila disertai penelaahan keadaan perekonomian Indonesia seperti terungkap dalam tabel I-O untuk tahun 1970, 1975; 1980 dan 1983. Penelaahan perekonomian melalui dua sudut ini, akan memberi gambaran yang jauh berbeda dan lebih lengkap daripada bila hanya mempergunakan data PDB semata-mata apa yang terungkap oleh data PDB, tidak terungkap oleh Tabel I-O dan demikian sebaliknya. Analisa dengan mempergunakan data *time series* PDB akan mengungkapkan hal-hal seperti laju pertumbuhan perubahan struktur ekonomi dan berbagai elastisitas; sebaliknya analisa dengan tabel I-O dapat memberi gambaran antara lain mengenai "Faktor propotion" sektor yang dicakup, hubungan antar sektor dan berbagai dampak. Penelaahan mengenai perekonomian Indonesia dengan mempergunakan kedua pendekatan tersebut dengan bobot yang sama rasanya hingga kini belum pernah dijalankan.

Bila tabel I-O Negara maju dibandingkan dengan Negara berkembang yang mencakup jumlah sektor yang sama, maka perbedaan yang segera tampak adalah bahwa matriks transaksi (dan demikian pula matriks yang disadur dari tabel tersebut) menunjukkan banyak kolom/baris yang kosong. Gejala ini cenderung makin meningkat sejalan dengan makin terinci sektor yang dicakup. Hal ini disebabkan karena dalam memproduksi barang, negara berkembang banyak mengimpor bahan-bahannya daripada membuat sendiri dan menjualnya kepada sektor yang memerlukannya. Dengan lain perkataan bahwa ketergantungan antar sektor adalah rendah. Kalaupun ada, maka gejala demikian ini adalah tak seberapa. Umpamanya saja, industri mobil di Indonesia memerlukan hasil industri logam ; akan tetapi dari industri ini yang dapat dihasilkan dan yang dapat dipergunakan oleh industri mobil hanyalah berupa sekrup, knalpot, dan radiator yang keseluruhannya hanya

mempunyai nilai yang tak seberapa dibandingkan dengan nilai seluruh mobil. Hal ini tentu akan tergambar dalam tabel I-O di sektor industri logam, sekalipun nilainya sangat kecil. Sebaliknya, bila industri logam tersebut dirinci lebih lanjut menjadi sepuluh sektor, tujuh diantaranya tidak menghasilkan input bagi mobil, maka dalam tabel I-O baris/kolom yang berisikan sektor-sektor untuk ketujuh barang tersebut akan tampak kosong. Input yang dipergunakan dalam produksi mobil (yang tidak dihasilkan dalam negeri), dalam tabel I-O akan keluar di baris impor dalam kolom mobil tanpa diperinci lebih lanjut; nilai inilah yang merupakan komponen impor dalam produksi mobil tersebut. Kotak-kotak yang kosong dalam tabel I-O pada dasarnya yang pertama digambarkan oleh kolom dan yang kedua oleh baris sesuatu sektor. Dengan mempergunakan rumus tertentu dan mempergunakan matriks invers koefisien teknik kedua efek tersebut dapat dihitung.

Seperti inilah diuraikan di depan, maka kemampuan tabel I-O terletak dalam matriks invers koefisien teknik yang dapat dipergunakan bagi berbagai perhitungan. Bila matriks ini dikaitkan pada permintaan terakhir, ini adalah sangat penting bagi perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi pada dasarnya merupakan perencanaan permintaan akhir yang berasal dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi sektor swasta dan ekspor perhitungan output total setiap sektor seperti diuraikan di atas adalah penting, karena output tersebutlah yang mendukung realisasi permintaan akhir tadi. Bukan itu saja, perhitungan tersebut juga memungkinkan untuk mengetahui jumlah input primer yang diperlukan untuk memproduksi output total tersebut. Input primer ini adalah dalam bentuk tenaga, modal, tanah, dan devisa untuk mengimpor barang. Bila input primer ini tersedia kurang mencukupi, maka perlu diusahakan untuk menambah melalui peminjaman luar negeri atau peningkatan ekspor dan bila keduanya tidak mungkin, maka permintaan akhir yang direncanakan tersebut diturunkan. Tampaklah disini betapa konsisten perencanaan yang dijalankan dengan mempergunakan tabel I-O yang caranya tidak memiliki peralatan lain.

Tabel I-O juga sangat berguna bagi studi dampak. Seperti diketahui, maka setiap kegiatan ekonomi mempunyai dampak ekonomi maupun sosial. Dampak ekonomi dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan bekerja dan dampak kaitan



antar industri. Dengan mempergunakan tabel I-O, berbagai dampak tersebut dapat dihitung secara konsisten. Dalam studi dampak ini ada dua hal yang perlu diingat ; *pertama* adalah bahwa sesuatu dampak memerlukan waktu untuk bekerja dan *kedua* adalah bahwa dampak berlaku untuk daerah tertentu. Makin lencet hubungan dan komunikasi dalam sesuatu daerah, maka makin cepat bekerjanya dampak dan demikian pula makin tertuangkan (monetized) daerah yang bersangkutan. Faktor-faktor ini sekaligus membatasi daerah kerja dampak (impact region) yang merupakan hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam studi dampak. Daerah yang mempunyai komunikasi dan perhubungan lencet dengan tingkat penguangan yang tinggi dapat mempunyai daerah dampak yang luas. Di samping itu luas daerah dampak juga dipengaruhi oleh aktifitas yang menimbulkan dampak itu sendiri. Pendirian pabrik tekstil berskala besar jelas akan mempunyai dampak yang lebih besar daripada pendirian reactor atom yang keduanya terjadi di Indonesia.

Akhirnya tabel I-O juga sangat berguna untuk menghitung tingkat proteksi efektif (*effective rate of protection*) yang terjadi terhadap sesuatu industri. Proteksi terhadap sesuatu industri dijalankan dengan menaikkan bea masuk jenis produk yang sudah dihasilkan oleh industri tertentu dan/atau menurunkan bea masuk bahan baku yang dipergunakan oleh industri tersebut. Akibat kebijaksanaan ini, timbul perbedaan harga yang dimiliki oleh barang yang dihasilkan oleh industri yang dilindungi dengan barang yang diimpor. Berdasarkan atas kedua harga inilah dihitung tingkat proteksi nominal. Tingkat produksi nominal ini belum menggambarkan tingkat proteksi yang dinikmati oleh industri yang bersangkutan ; untuk mengetahui hal ini, maka diperlukan pengetahuan mengenai tingkat proteksi efektif yang sebaiknya dihitung dengan bila tabel I-O telah tersedia mempergunakan tabel I-O.

Kegunaan tabel I-O seperti diuraikan di atas barulah beberapa, masih banyak lagi manfaat yang dapat diperoleh dari tabel I-O tersebut ; lebih-lebih lagi sesudah banyak perbaikan yang dilakukan terhadap penyusunan tabel I-O maupun membebaskannya dari asumsi yang dianggap sangat mengikat dan tidak realistis. Itulah sebabnya penggunaan tabel I-O tampak makin meluas. Dengan makin dirasakan akan perlunya perencanaan regional, dan dengan demikian berbagai hal yang berkaitan dengan itu mulai dari analisa

perekonomian regional hingga studi dampak, maka dirasakan makin mendesak pula keperluan akan tabel I-O regional. Inilah sebabnya, maka metode baru telah dikembangkan dalam penyusunan tabel I-O regional yang bersifat “non survey” dan berpangkal tolak dari tabel I-O nasional yang tersusun atas dasar penelitian lapangan yang mendetil.

### **Model Capital Output Ratio (COR) DAN Incremental Capital output Ratio (ICOR)**

Perbandingan antara modal yang digunakan dengan hasil yang dicapai disebut **capital output ratio (COR) atau capital coefficient** dalam Todaro (tahun 1986). Konsep COR dikenal melalui teori Evey Domard dan R.F. Harrod. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori Harrod-Domard menganalisis syarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Makin maju perekonomian suatu bangsa makin banyak dipakai tehnik produksi yang menggunakan banyak modal (capital intensive). Dan yang perlu kita ketahui adalah berapa banyak modal yang diperlukan untuk menaikkan satu unit output, dan biasa disebut **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**.

Menurut teori H-O, bahwa perekonomian selalu dapat menyisihkan sebesar proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk digunakan mengganti barang-barang modal yang sudah rusak. Namun demikian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan output ( $\Delta y/y$ ) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan ( $s$ ) dan rasio modal-output ( $COR=k$ ).

Teori ini menjelaskan pula bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Artinya semakin tinggi tabungan yang diinvestasikan, semakin tinggi pula output. Hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif artinya makin besar koefien COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output. Dengan demikian jika menginginkan tumbuh dengan cepat, maka harus meningkatkan tabungan dan menginvestasikan dalam proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun pertumbuhan ekonomi tergantung pada produktifitas dari investasi.

Produktifitas modal investasi dapat diketahui dengan kebalikan dari rasio modal-output (COR atau k). Kebalikan tersebut adalah  $1/k$  menggambarkan rasio output modal investasi. Selanjutnya mengalihkan tingkat investasi baru yaitu  $s = 1/Y$ , dengan produktifitasnya yaitu  $1/k$ , akan menghasilkan tingkat output total. Dapat diformulasikan dengan rumus :

$$S = S/Y, \text{ dan } 1/k \text{ dapat ditulis dengan rumus : } \frac{1}{1/\Delta Y}, \text{ maka}$$

$$S \cdot 1/k = I/Y \cdot \Delta Y/I = \Delta Y/Y$$

**Asumsi Dasar Teori H-O :**

1. Perekonomian berada dalam kondisi full employment, dan barang modal digunakan secara penuh,
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan,
3. Besarnya tabungan masyarakat, proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, sehingga fungsi tabungan dimulai dari titik nol,
4. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save=MPS) adalah tetap, demikian juga ratio antara modal dan output (capital output ratio=COR) dan ratio pertambahan modal-output (incremental capital output ratio=ICOR).

Dalam teori H-O, fungsi produksi berbentuk L atau linear, artinya pemakaian input adalah proporsional. jika output ingin ditambah maka modal dan tenaga kerja harus ditambah secara proporsional atau modal dan tenaga kerja tidak dapat disubstitusi. Jika kombinasi pemakaian input berubah maka tingkat output juga akan berubah.

Jika sudah dapat diperkirakan tingkat tabungan dan besarnya Capital output ratio, maka dapat diadakan proyeksi dalam tingkat perkembangan ekonomi dalam ukuran produk nasional. Jika produk nasional sekarang diketahui sebesar 1000 dan tingkat tabungan (rate of saving) adalah 8 persen maka tabungan dalam negeri adalah 80. Ini berarti tabungan yang tersedia untuk diinvestasi sebesar 80. Jika ICOR diketahui adalah 4. Maka tabungan(=investasi) sebesar 80 dapat, menciptakan kenaikan hasil produksi nasional

sebesar  $80/4=20$ . Ini berarti pula laju pertumbuhan (rate of growth) adalah sebesar  $20/1000=2$  persen.

Dari hasil perhitungan ini, maka laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan dua cara sebagai berikut:

- 1). Membagi tingkat tabungan dengan ICOR, yaitu  $8\% : 4 = 2\%$
- 2). Membagi kenaikan produk dengan produk nasional yang ada, yaitu  $20 : 1000 = 2\%$ .

Jika kenaikan 2 produk nasional 2%, hanya cukup mengimbangi kenaikan jumlah penduduk, maka tingkat kehidupan masyarakat berada pada kondisi tetap. Karena itu jika kita ingin menaikkan pendapatan perkapita masyarakat sebesar 3 persen, maka pendapatan nasional harus dinaikan sebesar  $2\% + 3\% = 5\%$ .

Jika diketahui ICOR = 4, dan kita ingin menaikkan pendapatan per kapita dengan 3%, maka tabungan (=investasi) harus dinaikan dari 8% menjadi  $4 \times 5$  persen = 20% dari pendapatan nasional. Untuk menaikkan tingkat tabungan masyarakat diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan tingkat tabungan masyarakat.

**Faktor-Faktor Yang Menentukan Capital Output Ratio, (Jhingan, 1988) adalah :**

- 1). Tersedianya Sumber Alam;** Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka rasio modal output adalah rendah, karena peran modal dapat digantikan dengan sumber alam. Contoh, Norwegia negara yang mempunyai rasio modal output yang sangat tinggi karena tidak didukung oleh sumber alam.
- 2). Pertumbuhan Penduduk;** Di Negara industri dengan penduduk yang tumbuh cepat, ratio modal outputnya cenderung rendah, karena pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tabungan modal yang besar. Tetapi bagi negara pertanian, pertambahan penduduk berpengaruh buruk pada rasio modal output.
- 3). Jumlah modal yang diperlukan;** modal merupakan faktor penting dalam menentukan rasio modal output, rasio modal output ditentukan oleh proporsi pendapatan nasional yang yang diinvestasikan pada setiap tahun.

- 4). Kemajuan Teknologi;** sifat kemajuan teknologi berkaitan dengan kemampuan inovasi padat modal dan padat karya. Jika kemajuan teknologi bersifat padat modal, maka rasio modal output akan cenderung naik. Tetapi jika inovasi teknologi lebih cenderung padat karya, maka rasio modal output akan cenderung turun.
- 5). Komposisi Investasi;** pola investasi yang direncanakan akan berpengaruh terhadap rasio modal output. Jika pemerintah merencanakan pengeluaran yang besar pada bidang pekerjaan umum (PU), seperti membangun jalan raya, jalan kereta api, sekolah-sekolah dan sebagainya, maka rasio modal output akan cenderung tinggi. Tetapi rasio modal output akan cenderung rendah jika investasi pada pembangunan pertanian.
- 6). Keterampilan Manajerial Dan Organisasi;** keterampilan manajerial dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan modal. Keterampilan manajerial yang tinggi, maka rasio modal output rendah. Sebaliknya jika keterampilan manajerial rendah, maka rasio modal output akan tinggi.
- 7). Harga Faktor;** jika terjadi perubahan terhadap harga faktor seperti upah, bunga, sewa dan sebagainya maka akan berpengaruh terhadap rasio modal output. Jika harga faktor meningkat maka rasio modal output akan rendah. Itu berarti kegiatan investasi tidak efisien. Sebaliknya jika harga-harga faktor turun maka tingkat rasio modal output akan meningkat. Itu berarti investasi akan cenderung efisien. Karena koefisien ICOR yang tinggi, merupakan indikator dari investasi yang efisien.

## **BAB VI. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR**

Bintoro Tjokroamidjojo (tahun 1984), pendekatan kebutuhan dasar merupakan serangan langsung terhadap kemelaratan dan kepincangan terhadap pembagian pendapatan yang diderita oleh sebagian besar kelompok golongan miskin di dunia. Sasaran pokoknya adalah ;

pertama mencukupi persyaratan rumah tangga

kedua ; mencukupi sarana dasar kehidupan masyarakat luas seperti air minum, sanitasi, angkutan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

Dengan melihat perkembangan perencanaan di masa lampau, menimbulkan kekecewaan terhadap strategi pembangunan yang sebagian besar gagal dalam mengurangi kemiskinan, apalagi menghapus kemiskinan di kebanyakan negara berkembang, yang mengakibatkan timbulnya strategi baru, yaitu pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan. Memang, selama dua dasawarsa yang baru lalu, negara-negara berkembang sebagai satu kelompok mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, bahkan lebih pesat dari apa yang dialami oleh negara industri Barat. Pada tahap-tahap permulaan dari proses industrialisasi mereka. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat ini ternyata tidak terlalu berhasil dalam menyediakan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk yang terus-menerus bertambah maupun dalam mengurangi kemiskinan yang tersebar luas di negara tersebut.

Di samping tidak tercapainya pengurangan secara berarti dari kemiskinan, pengangguran, serta setengah pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara berkembang disertai oleh ketimpangan yang semakin meningkat dalam pembagian pendapatan. Akan tetapi, hal ini tentu tidaklah mengherankan bagi ahli-ahli ekonomi pembangunan mulai dari Adam Smith, Ricardo, Marx samapai kepada kuznets, yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak merata.

Bagaimana juga, kenyataan menunjukkan bahwa banyak negara berkembang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai dengan pembagian pendapatan yang tidak merata. Satu contoh negara Brazil yang sejak tahun 1967 telah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, sedemikian pesatnya sehingga beberapa ahli mulai bicara tentang keajaiban ekonomi Brazil yang menyaingi Jepang dan Jerman Barat. Demikian juga yang dikemukakan oleh Hendara Esmara mengenai pengalaman Indonesia yang telah memberikan hasil-hasil yang serupa dengan tersebut di atas, yaitu mengenai pembagian pendapatan yang menyertai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama dasawarsa 1970-an. Demikian juga yang dikemukakan oleh Gustav Ranis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan, serta adanya konflik antara keadilan sosial dengan pembagian pendapatan, serta adanya konflik antara keadilan sosial dengan pertumbuhan ekonomi yang agak parah. Walaupun tidak ada jawaban yang pasti antara hubungan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, namun hubungan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara berarti, telah memaksa baik para perencana ekonomi dan teknokrat maupun para peneliti ekonomi untuk kembali mempelajari kebijaksanaan serta mendorong mereka untuk mempelajari alternatif-alternatif yang lebih realistis bagi kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi.

### **Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Pendekatan kebutuhan dasar dalam strategi pembangunan telah menarik banyak perhatian kalangan pejabat pemerintah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan maupun kalangan sarjana ekonomi dan sosial di negara berkembang yang sejak lama bersikap kritis terhadap pola dan arah pembangunan yang ditempuh hingga kini di negara tersebut. Keraguan pola dan arah pembangunan di banyak negara berkembang, terutama disebabkan oleh karena pembangunan di negara-negara tersebut ternyata sering tidak berhasil mengurangi kemiskinan absolut secara berarti. Lagipula pembagian hasil-hasil pembangunan selama ini sering pula tidak merata karena lebih menguntungkan golongan

yang berpendapatan tinggi dan lebih menguntungkan penduduk kota daripada penduduk desa.

Meskipun pendekatan kebutuhan dasar ini telah disambut baik oleh kalangan luas sewaktu gagasan ini secara resmi diajukan pada Konferensi Kesempatan Kerja Dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 1976, namun di lain pihak banyak juga kritik yang dilontarkan terhadap gagasan tersebut. Disamping kritik yang beralasan, terdapat pula kritik yang berakar pada kesalahpahaman mengenai ruang lingkup serta implikasi-implikasi dari strategi pertumbuhan ini.

Suatu kritik yang sering dilontarkan terhadap pendekatan kebutuhan dasar adalah bahwa pendekatan ini hanya mengutamakan konsumsi dan bukan investasi, dan oleh karena itu, menghambat pertumbuhan ekonomi. Dikatakan pula bahwa pendekatan kebutuhan dasar merupakan suatu usaha menciptakan negara sejahtera (*welfare state*) di negara berkembang yang sebenarnya jauh melebihi kemampuan dan persediaan sumber-sumber daya negara tersebut.

Pendekatan kebutuhan dasar memang sangat menekankan pemenuhan kebutuhan dasar untuk seluruh penduduk dalam kurung waktu yang relatif singkat, yaitu satu generasi. Dan oleh karena itu, berbeda sekali dari model-model pertumbuhan kapitalis maupun marxis, yang kedua-duanya merupakan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui tingkat penekanan konsumsi. Kesan bahwa pendekatan kebutuhan dasar tidak mementingkan pertumbuhan ekonomi, kadang-kadang juga karena ucapan beberapa penganut pendekatan kebutuhan dasar dapat tercapai melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ada tanpa memerlukan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat.

Namun keliru sekali jika orang menganggap bahwa pendekatan kebutuhan dasar merupakan model pembangunan yang pada dasarnya bersifat anti pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat justru sangat memerlukan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar diharapkan bahwa dengan produksi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar yang terus menerus meningkat bukan saja kemiskinan absolut dapat dihapuskan, tetapi juga kemiskinan relatif dapat dikurangi.



Dengan demikian , maka pelaksanaan strategi kebutuhan dasar bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi karena mengutamakan redistribusi kekayaan dan pendapatan, tetapi suatu reorientasi arah dan pola pertumbuhan ekonomi ke peningkatan produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar. Hal ini tentu berarti pula realokasi dari kebanyakan sumber-sumber daya produktif dari proyek-proyek investasi yang padat modal di sektor modern (yang sangat ditekankan dalam strategi pertumbuhan ekonomi yang konvensional) ke sektor-sektor penghasil barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar yang lebih padat karya dan lebih menghemat dalam pemakaian modal. Suatu kritik lain yang berkaitan dengan kritik pertama adalah strategi kebutuhan dasar yang hanya melestarikan keterbelakangan ekonomi, karena lebih mengutamakan produksi barang-barang konsumsi daripada barang modal dan penggunaan teknologi padat karya (yang dianggap usang) daripada teknologi modern yang padat modal.

Strategi kebutuhan dasar memang menekankan produksi serta distribusi barang-barang konsumsi serta jasa-jasa kebutuhan dasar, namun komposisi barang-barang konsumsi dan barang-barang modal yang dihasilkan serta teknik-teknik produksi yang digunakan oleh suatu negara terutama akan tergantung pada kondisi khas yang terdapat di negara tersebut. Perlu ditekankan bahwa perumusan strategi kebutuhan dasar haruslah bersifat country specific. Namun strategi kebutuhan dasar tidak berarti substitusi yang menyeluruh dari teknologi padat modal dengan teknologi padat karya. Karena di setiap negara berkembang terdapat beberapa kondisi dimana penggunaan teknologi padat modal bagaimanapun juga lebih efisien daripada teknologi padat karya.

### **Implikasi Dari Strategi Kebutuhan Dasar**

Strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipentingkan lagi. Malahan sebaiknya, pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk hanya dapat terlaksana dalam konteks perekonomian yang bertumbuh dengan pesat.

Namun keberhasilan strategi kebutuhan dasar mutlak memerlukan perubahan dan pola pertumbuhan ekonomi, sedemikian rupa sehingga kapasitas produksi yang sudah ada

dan yang masih akan dibangun akan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar dalam jumlah yang jauh lebih banyak sehingga memadai bagi seluruh penduduk. Implikasi dari perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi adalah perlu diadakan perubahan struktural dalam alokasi dan mobilisasi sumber-sumber daya produktif. Dengan kata lain inti pokok dari pelaksanaan strategi kebutuhan dasar adalah realokasi sumber-sumber daya produktif ke usaha-usaha yang menghasilkan dan mendistribusi secara merata barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan pokok.

Sudah barang tentu realokasi sedemikian jauh lebih mudah diutarakan di atas kertas daripada dalam praktek. Realokasi sumber-sumber daya produktif berarti sektor-sektor kegiatan ekonomi, dan golongan-golongan masyarakat yang dahulu mendapat prioritas dalam alokasi sumber-sumber daya produktif tidak akan diutamakan lagi, malahan akan dirugikan dan akan menentang strategi kebutuhan dasar dan realokasi sumber-sumber daya produktif yang merupakan dasar bagi keberhasilan strategi tersebut.

Namun dalam konteks negara yang relatif miskin, seperti negara kita, dengan persediaan sumber-sumber daya produktif yang langka, realokasi sumber-sumber daya produktif mau tidak mau harus diadakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka strategi untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat suatu negara dapat terpenuhi.

### **Munculnya Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Pada tahun 1969, ILO melancarkan suatu program kesempatan kerja sedunia yang luas untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Sekalipun pada mulanya program kesempatan kerja sedunia ini dimulai tanpa suatu tema khusus, namun pada tahun-tahun berikutnya bagian terbesar WEP ini ditunjukkan pada masalah-masalah kesempatan kerja di negara berkembang, termasuk Kolumbia, Kenya, Sudan, Srilangka, Philipina. Selama ini mempelajari masalah-masalah kesempatan kerja ini, WEP itu sendiri semakin banyak terlihat dalam masalah-masalah pengangguran yang lebih luas, khususnya sebab-sebab pokok dan kegagalan strategi pembangunan yang dilaksanakan di negara tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak secara berangsur di negara ini.

Dari hasil-hasil penelitian berbagai misi kesempatan kerja ILO yang telah dikirim ke berbagai negara berkembang dimana fokus perhatian ILO lambat laun mulai bergeser dari tekanan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai ke penghapusan dan akhirnya ke penyediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk.

Sebenarnya anjuran strategi kebutuhan dasar dimulai dengan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi misi kesempatan kerja ILO ke Kenya pada tahun 1972, dipimpin oleh Profesor Hans Singer dari lembaga studi pembangunan pada Universitas Sussex, yang kemudian dimuat dalam laporan ILO mengenai kesempatan kerja, pendapatan, dan ketimpangan di Kenya, sekalipun istilah kebutuhan dasar belum digunakan dalam laporan tersebut, namun inti laporan tersebut adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk Kenya.

Karena pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia pada akhir abad ini membutuhkan komitmen global, usaha konferensi kesempatan kerja sedunia tahun 1976 juga menyerukan pembentukan suatu tata ekonomi Internasional baru (TEIB). Sepintas selalu pendekatan kebutuhan dasar dan himbauan untuk suatu tata ekonomi Internasional baru tidak saling berhubungan. Akan tetapi setelah berpikir lebih lanjut, maka akan menjadi jelas bahwa komitmen global perlu pemenuhan kebutuhan dasar, seperti himbauan konferensi kesempatan kerja sedunia, hanya akan ada artinya dalam rangka tata ekonomi Internasional (TEIB) dimana dampak kebijaksanaan lain di bidang ekonomi Internasional, tidak merugikan usaha pemenuhan kebutuhan dasar. Sebaliknya, negara-negara industri akan jauh lebih cenderung untuk menerima perubahan-perubahan yang diusulkan untuk TEIB, jika negara-negara berkembang sendiri mengadakan komitmen yang sepenuhnya menghapus kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar penduduk negara-negara mereka masing-masing.

Sekalipun ILO pasti telah memegang peranan dalam rumusan yang menyeluruh mengenai pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan, dan juga dalam mempromosikan serta mempopulerkan konsep dan strategi pendekatan ini, kelompok-kelompok lain, baik lembaga nasional dan internasional maupun perorangan setelah berkonsultasi satu sama lain telah menerima pelajaran dari pengalaman dengan

pertumbuhan ekonomi selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, dan telah menarik kesimpulan yang pada dasarnya sama dengan ILO.

### **Konsep Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Tujuan utama dari pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dari penduduk suatu negara dalam jangka waktu satu generasi, yaitu menjelang tahun dua ribu. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan dua perangkat sasaran yang terpisah namun saling melengkapi. Dua perangkat sasaran tersebut antara lain:

- a. Personal Consumption Items
- b. Basic Public Services

Di samping kedua perangkat tersebut di atas, konsep kebutuhan dasar kadang-kadang juga digunakan untuk mencakup sasaran lain. Dalam menentukan kebutuhan dasar yang lebih eksak dapat dihadapi 3 jenis kesulitan yaitu:

- 1) Kesulitan mengenai kriteria atau standar paket kebutuhan dasar.
- 2) Kesulitan mengenai tingkat kebutuhan dasar.
- 3) Kesulitan mengenai urutan kebutuhan dasar.

Sekalipun ada masalah-masalah konseptual yang nyata dalam menentukan apa yang mencakup paket kebutuhan dasar, namun mungkin dan perlu agar perencanaan pembangunan lebih dahulu memusatkan perhatian pada satu kelompok inti kebutuhan dasar.

### **Ciri-ciri Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Untuk mengetahui secara jelas ciri-ciri pokok dari pendekatan kebutuhan dasar, perlu diadakan suatu perbandingan antara pendekatan kebutuhan dasar dengan pendekatan kemiskinan, sejauh terdapatnya suatu tingkat pemenuhan kebutuhan dasar absolut yang tertentu untuk seluruh penduduk berarti penghapusan kemiskinan absolut maka pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan adalah sama dengan

pendekatan konvensional. Akan tetapi, ada perbedaan-perbedaan konseptual yang penting antara kedua pendekatan ini dalam perencanaan pembangunan yaitu:

(a). Pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan dalam perencanaan pembangunan memusatkan perhatian pada kelompok-kelompok sasaran dalam masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan. Sedangkan pendekatan kebutuhan dasar beranggapan bahwa kemiskinan terbesar di negara-negara berkembang tersebar luas, dan oleh karena ini memerlukan program-program pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

(b). Dalam usaha penghapusan kemiskinan, maka pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan memusatkan perhatian kepada usaha peningkatan yang berarti dalam tingkat permintaan total maupun persediaan barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sasaran kebutuhan dasar tidak terbatas pada penghapusan kemiskinan absolut, melainkan meliputi pula pemenuhan kebutuhan di atas tingkat pemenuhan kebutuhan hidup.

(c). Pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit, untuk menghapus kemiskinan, maka pendekatan kebutuhan dasar sangat mengutamakan partisipasi massa secara efektif, baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan program-program dasar, agar tujuan-tujuan pokok dari program ini tidak terabaikan.

Dengan demikian, maka pendekatan kebutuhan dasar sebenarnya menggabungkan serta mensintesakan tujuan-tujuan dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, kesempatan kerja, dan kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai suatu proses dimana produk barang-barang dan jasa-jasa terus meningkat dengan mantap dan dengan mana diterapkan teknologi yang tepat guna (teknologi secara ganda). Penerapan teknologi yang tepat guna ini juga akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan yang memberikan imbalan yang wajar. Kombinasi antara tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi dengan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang lebih tinggi akan memungkinkan seorang kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

### **Kebijaksanaan Kebutuhan Dasar**

Dalam penyusunan rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar, maka langkah pertama yang logis adalah untuk meningkatkan suatu tingkat tertentu dari kebutuhan dasar, khususnya keperluan konsumsi perorangan, yang seharusnya dapat dicapai oleh seluruh penduduk, termasuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dapat dinyatakan secara kuantitatif (misalnya kebutuhan kalori setiap hari) atau menurut tingkat pendapatan, yang diperlukan untuk membeli inti kebutuhan dasar tersebut. Antara berbagai Negara terdapat perbedaan dalam tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi inti kebutuhan dasar, yang tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Dalam langkah yang kedua, penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan dasar dicakup pula jasa-jasa pelayanan masyarakat yang merupakan pula bagian integral dari kebutuhan konsumsi perorangan, seperti tersedianya fasilitas pendidikan, dan kesehatan serta air minum bersih. Dalam menyuaikan jasa-jasa pelayanan umum dengan kebutuhan dasar, maka rencana pembangunan bukan hanya memperbaiki jenis-jenis jasa pelayanan umum yang harus disediakan serta metode-metode untuk mempermudah pemanfaatan jasa-jasa ini oleh perorangan atau rumah tangga, yang selama ini belum atau tidak dapat memanfaatkannya.

Dalam langkah yang ketiga rencana kebutuhan dasar ditentukan dan diidentifikasi oleh berbagai kelompok sasaran dari masyarakat, yang kebutuhan dasar pada umumnya belum terpenuhi, yaitu kelompok-kelompok yang konsumsinya berada di bawah tingkat minimum dari kebutuhan dasar. Satu cara untuk memperkirakan tingkat dasar minimum dari kebutuhan dasar adalah apa yang dinamakan pendekatan unsur dominan (Dominan Item Approach). Pendapatan kebutuhan dasar yang diperkirakan prosedur ini tidak akan memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar, karena ini didasarkan pada inti paket kebutuhan dasar bukan hanya satu unsur konsumsi saja, sekalipun pangan adalah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Rencana kebutuhan dasar harus mencakup tindakan-tindakan atau strategi khusus untuk menjamin bahwa kelompok-

kelompok sasaran memang dapat memperoleh pendapatan, barang-barang konsumsi pokok serta jasa-jasa pelayanan umum bagi mereka.

Strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipentingkan lagi. Malahan sebaliknya, pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk hanya dapat terlaksana dalam konteks perekonomian yang tumbuh pesat. Namun keberhasilan strategi pembangunan (kebutuhan dasar) mutlak memerlukan perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi sedemikian rupa, sehingga kapasitas produksi yang sudah ada dan yang masih akan dibangun akan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar yang jauh lebih banyak sehingga memadai bagi seluruh kebutuhan penduduk.

### **Ekonomi Indonesia dengan Strategi Kebutuhan Dasar.**

Dengan melihat perkembangan di masa lampau dalam hal penurunan kemiskinan absolut diuraikan bahwa bahan-bahan keterangan yang diperoleh dari survey ekonomi nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan oleh Biro Statistik pada tahun 1970 dan 1976 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1970-1976 persentase penduduk Indonesia yang miskin, artinya penduduk Indonesia yang hidup di tingkat kemiskinan telah berkurang.

Hal ini berlaku baik bagi Indonesia secara keseluruhan, maupun diadakan perincian menurut daerah pedesaan dan daerah perkotaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat hidup absolut semua golongan masyarakat telah meningkat sehingga kemiskinan absolut di Indonesia selama Repelita I dan tahun pertama Repelita II telah berkurang. Perhitungan berbagai peneliti Indonesia maupun asing mengenal persentase penurunan penduduk miskin agak berbeda. Namun pada umumnya dapat dikatakan persentase penduduk Indonesia telah menurun dari 60% pada tahun 1970 sampai kurang lebih 45% dalam tahun 1976. Malahan menurut perkiraan Parves Hasan dari Bank Dunia pada pertengahan dasawarsa 1970-an, masih 55% dari penduduk Indonesia atau 72% orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Penurunan relatif dalam persentase penduduk yang miskin, meskipun penurunan jumlah absolut penduduk yang miskin, meskipun penurunan jumlah absolute penduduk

yang miskin, meskipun penurunan jumlah absolute ini tidak begitu mengesankan karena dinetralkan oleh pertambahan pesat dalam jumlah absolut penduduk Indonesia. Perkiraan-perkiraan tersebut juga menunjukkan bahwa pada umumnya dimensi kemiskinan di Jawa lebih besar daripada di luar Jawa.

Di antara berbagai daerah perkotaan, maka hasil SUNSENAS juga memperlihatkan bahwa penduduk Jakarta telah memperlihatkan laju kenaikan pendapatan rata-rata tiga kali lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, maka penduduk kota Jakarta sebagai keseluruhan telah lebih banyak menikmati hasil-hasil pembangunan dari pada daerah-daerah lainnya. Uraian di atas telah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat telah berhasil dalam meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat, termasuk golongan pendapatan rendah, sehingga kemiskinan absolute telah berkurang. Namun disamping gejala yang menggembirakan ini, terjadi juga hal-hal yang memprihatinkan, yaitu bahwa pembagian pendapatan bertambah timpang, sehingga jurang pemisah (gap) antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah, dan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Menjadi semakin besar.

Proses pembangunan ekonomi memang merupakan disequilibrium process, suatu proses dimana beberapa sector bertumbuh dengan lebih pesat dari sektor-sektor lainnya, sehingga memang tidak dapat dihindarkan bahwa pembagian pendapatan pada proses pembangunan ekonomi bertambah buruk. Pengalaman di Negara-negara lain telah memperlihatkan bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan baru dapat terjadi pada tingkat perkembangan ekonomi dengan tingkat perkembangan ekonomi dengan pendapatan perkapita yang melebihi US \$ 1000 setahun.

Namun apa yang memprihatinkan adalah bahwa ketimpangan dalam pembagian pendapatan dewasa ini dirasakan sudah melewati batas-batas yang wajar dapat diterima. Cita-cita untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur tidak berarti bahwa dalam masyarakat tersebut masih tetap akan pemerataan yang sempurna. Dalam masyarakat tersebut masih akan terdapat dan akan ditolerir perbedaan-perbedaan dalam tingkat pendapatan dan kekayaan, asalkan perbedaan ini menurut rasa keadilan bangsa Indonesia



masih dalam batas-batas yang wajar dan dapat diterima. Perasaan bahwa ketimpangan pendapatan (pembagian) sudah melewati batas-batas yang wajar dan dapat diterima terutama disebabkan oleh gaya hidup dan gaya konsumsi sementara golongan yang berpendapatan tinggi yang berlebihan (Overdadig), terutama dalam konteks Negara dan masyarakat yang relative masih miskin dengan pendapatan perkapita US \$ 400 pada tahun 1980.

Jelas kiranya, bahwa perkembangan demikian juga tidak sehat untuk memperkuat ketahanan nasional, karena salah satu unsur pokok dari ketahanan nasional justru adalah rasa solidaritas nasional diantara berbagai golongan masyarakat. Rasa solidaritas nasional ini sulit kiranya dipupuk jika pembagian pendapatan dan kekayaan antar golongan dan daerah bertambah timpang. Pembangunan yang tidak merata, terutama pada awal proses pembangunan memang tidak dapat dihindarkan karena proses pembangunan dimana-mana dicirikan oleh sector-sector yang tertinggal di belakang. Namun masalah ini akan lebih membesar lagi jika sector-sector yang bertumbuh pesat tidak dapat atau kurang mendorong pertumbuhan sector-sector yang terbelakang.

Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah perlu membantu sector-sector yang terbelakang dengan menyalurkan lebih banyak dan adanya investasi ke sector-sector yang terbelakang dan lemah, agar dengan harta (asset) yang lebih banyak, berupa modal, perlengkapan mesin dan keterampilan yang lebih tinggi, produktivitas dari sector-sector ini lambat laun dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan hasil pembangunan tidak selalu bertentangan. Walaupun di kebanyakan di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dibaringi oleh pembagian pendapatan yang makin timpang, di beberapa Negara berkembang lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat (malahan termasuk yang paling pesat diantara Negara-negara berkembang) dibaringi oleh pembagian pendapatan yang makin merata. Bukan itu sajatetapi pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dibaringi oleh perbaikan dalam mutu hidup (quality of life) di Negara-negara tersebut, seperti terlihat dari beberapa indikator, misalnya angkapengangguran yang relative rendah, harapan hidup (life

expectancy) yang tinggi dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan oleh Professor Harry oshima, gur besar tamu pada Universitas Philipina menunjukkan, bahwa Negara-negara kawasan Asia timur yang meliputi Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong selama kurun waktu 1950 samapi 1975 mengalami kenaikan dalam GNP perkapita yang rata-rata berjumlah 6% setahun. Di lain pihak Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand selama kurun waktu yang sma menglami kenaikan dalam GNP perkapita sebanyak 3% setahun, sedangkan Negara-negara Asia Selatan termasuk India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal telah tumbuh dengan lebih lambah lagi, yaitu rata-rata hanya 1,5% setahun.

Walaupun negara-negara Asia timur bertumbuh dan paling pesat, namun dalam hal pembagian pendapatan memperlihatkan pola yang lebih merata daripada negara-negara Asia Tenggara dan Selatan. Angka indeks ini yang meupakan salah satu indeks dari ketimpangan pembagian pendapatan, untuk Negara-negara Asia Timur adalah 0,4%, sedangkan untuk Negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan adalah lebih tinggi yaitu 0,5%.

Dengan demikian, maka pengalaman dari Negara-negara Asia Timur memerlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak otomatis bertentangan dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi, tidak tepat untuk merumuskan masalah yang dihadapi Indonesia sebagai pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan. Demikian pula laju pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pembagian pendapatan lebih merata atau lebih timpang tergantung dari laju atau pola ekonomi yang dianut. Jika pola pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh pertumbuhan pesat dari sektor-sektor yang padat modal, seperti perkebunan pasar, kehutanan, pertambangan dan industri-industri besar serta sektor-sektor yang padat karya tertinggal di belakang, maka tidak mengherankan jika pola pertumbuhan demikian akan menghasilkan pembagian pendapatan yang makin timpang, terlebih-lebih jika sektor-sektor yang bertumbuh pesat tidak mampu untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang terbelakng dan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan (berupa system perpajakan yang progresif) tidak bekerja dengan efektif dan efisien.

## BAB VII. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

### Paradigma Pembangunan Ekonomi Daerah

Terjadi pergeseran dan perubahan-perubahan mendasar paradigma pembangunan akibat adanya distorsi berupa kesalahan di dalam menerapkan model-model pembangunan selama ini adalah :

- (1). Pergeseran dari situasi harus memilih antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan sebagai pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan secara “berimbang”.
- (2). Kecenderungan pendekatan dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang di ukur secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan lokal
- (3). Pergeseran peranan pemerintah yang dominan menjadipendekatan pembangunan yang mendorong partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan (baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian).

Di masa sekarang dan yang akan datang diperlukan adanya pendekatan perencanaan daerah yang berbasis pada hal-hal berikut:

- (1). Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak di inginkan.
- (2). Menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
- (3). Menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa sekarang dan masa yang akan datang (pembangunan berkelanjutan).
- (4). Disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplemantasikan perencanaan yang disusun.

**Ciri penting pembangunan ekonomi daerah adalah** upaya mencapai pembangunan berimbang (*balanced development*). Isu pembangunan wilayah atau daerah yang berimbang tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah (*equally developed*), juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi daerah yang seragam, juga bentuk-bentuk keseragaman pola dan struktur ekonomi daerah, atau juga tingkat

pemenuhan kebutuhan dasar (*self sufficiency*) setiap daerah. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap daerah yang jelas-jelas beragam.

Paradigma baru pembangunan harus di arahkan kepada terjadinya pemerataan(*equity*), pertumbuhan, efisiensi, dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi melalui transfer, perpajakan, dan subsidi. Sedangkan ekonomi selebihnya di serahkan kepada mekanisme pasar.

### **Itegrasi Ekonomi Antara Daerah**

Disparitas regional merupakan masalah universal, kemajuan pembangunan antarwilayah yang tidak merata. Pembangunan ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah social politik. Hampir di semua daerah dan negara, baik pada system perekonomian pasar maupun ekonomi terencana secara terpusat, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antarwilayah.

Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan.

Secara makro dapat di lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai bangsa.

Ketidakeimbangan pembangunan antarwilayah/kawasan di satu sisi terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya system ekonomi. Di sisi lain, potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya.

Ketidak seimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antarwilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*), yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah tertuju ke pusat-pusat pertumbuhan.

Selanjutnya kemiskinan di wilayah belakang/pedesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya menjadi melemah dan inefisien karena timbulnya berbagai penyakit “urbanisasi” yang luar biasa. Fenomena urbanisasi yang memperlemah perkembangan kota, dapat dilihat pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia yang mengalami “over-urbanization” yang dicirikan dengan berbagai bentuk ketidakefisienan dan permasalahan seperti munculnya kawasan kumuh (*slum area*), tingginya tingkat polusi, terjadinya kemacetan, kriminalitas dan sebagainya. Perkembangan perkotaan pada akhirnya menjadi sarat dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.

Menyadari terjadinya ketidakseimbangan pembangunan inter-regional, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan wilayah/kawasan. Strategi program-program pengembangan kawasan lebih di dasarkan atas strategi pengembangan kawasan yang berdasarkan padakeunggulan komparatif (*comparative advantages*) berupa upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas kawasan yang di dasarkan atas pertimbangan optimalisasi daya dukung (*carrying capacity*), kapabilitas (*capability*) dan kesesuaian (*suitability*) sumberdaya wilayah.

Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi sinergi keterkaitan (*linkages*) antara kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antarkawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antarkawasan melalui pembangunan berbagai infrastruktur fisik (*network of transport, port, communication and other*) yang dapat menciptakan keterkaitan fisik antarkawasan.

Keterkaitan fisik harus disertai kebijakan-kebijakan yang menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antarkawasan. Pengembangan keterkaitan

yang salah (tidak tepat sasaran) dapat mendorong aliran *backwash* yang lebih masif, yang pada akhirnya justru memperparah kesenjangan dan ketidakseimbangan pembangunan inter-regional. Oleh karena itu, keterkaitan inter-regional yang diharapkan adalah bentuk-bentuk keterkaitan yang sinergis (generatif) atau saling memperkuat, bukan saling memperlemah atau eksploitatif.

Dalam kerangka wilayah sebagai suatu system yang tersusun maka program-program pengembangan kawasan pada umumnya dilaksanakan berdasarkan karakteristik sumberdaya alam (natural resources), sumberdaya manusia (human capital), sumberdaya buatan (man-made capital), dan sumberdaya sosial yang dimilikinya.

Beberapa program ini di antaranya berupa program-program yang dikembangkan oleh instansi lintas sektoral (Bappenas, Depdagri dan BPPT), yakni antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), kawasan Andalan (KADAL), Kawasan Sentra Produksi (KSP), dan Program Pengembangan Kawasan Tertinggal (KATING). Semua program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan disparitas antarwilayah.

Pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua wilayah harus mempunyai perkembangan, tingkat industrialisasi, pola ekonomi, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat di antara semua wilayah yang terlibat.

**Dewan Ekonomi PBB (1965)** memilih resolusi untuk pengembangan ekonomi wilayah dinegara Dunia Ketiga yang mengusul mendukung pentingnya keseimbangan pertumbuhan secara regional agar pembangunan berimbang dan dinikmati oleh penduduk miskin dipedesaan. Selanjutnya PBB mengeluarkan resolusi dengan mengusulkan arahan kebijakan dan tujuan pengembangan wilayah berikut ;

- (1) Merangsang perubahan struktural secara cepat dan reformasi sosial, untuk meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih luas pada kelompok masyarakat yang tertinggal
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam menetapkan tujuan pembangunan dan didalam proses pengambilan keputusan serta mengembangkan organisasi masyarakat.
- (3) Menciptakan sistim kelembagaan dan struktur administrasi serta pendekatan operasional untuk perencanaan pengembangan yang lebih efektif.
- (4) Mencapai distribusi penduduk dan aktifitas masyarakat yang lebih baik melalui integrasi yang lebih efektif dari pengembangan kota dan desa.
- (5) Memasukan pertimbangan lingkungan secara lebih efektif dalam program pembangunan.

#### **Dasar Penetapan Integrasi Ekonomi Daerah**

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah terlebih dahulu perlu ditetapkan pengelompokan wilayah pembangunan baik dalam suatu negara, provinsi, kabupaten maupun kota dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah bersangkutan. Penetapan wilayah pembangunan ini perlu dilakukan agar memberlakukan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut dapat di tentukan dengan jelas dan tegas sampai dimana wilayah cakupannya. Dengan demikian, perumusan kebijakan pembangunan wilayah akan dapat dilakukan secara lebih tepat, sesuai dengan kondisi, permasalahan dan potensi wilayah serta kewenangan pemerintah daerah bersangkutan. Hal ini sangat penting artinya agar penetapan kebijakan pembangunan wilayah tersebut menjadi lebih operasional dan terarah.

Penetapan wilayah pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu:

1. ***Kesamaan kondisi***, permasalahan dan potensi umum daerah baik di bidang ekonomi, sosial, dan geografi. Bila aspek ini di jadikan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan wilayah, menggunakan pengertian *region*. Maka wilayah

tersebut dapat dikategorikan sebagai *homogeneous region*. Aspek kesamaan ini sangat penting artinya agar kebijakan pembangunan wilayah tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi dan potensi utama wilayah bersangkutan.

2. ***Keterkaitan yang erat antara daerah-daerah yang tergabung*** dalam wilayah pembangunan bersangkutan. Keterkaitan ini dapat diketahui melalui data tentang kegiatan perdagangan antar daerah dan mobolitas penduduk (migration) antar daerah. Bila aspek ini dijadikan sebagai dasar utama pembentukan wilayah pembangunan tersebut, maka wilayah ini di namakan sebagai *nodal region*. Aspek keterkaitan ini sangat penting artinya untuk kebijakan pembangunan wilayah yang di tetapkan dapat mendorong terjadinya keterpaduan dan sinergi pembangunan antar daerah dalam wilayah bersangkutan.
3. ***Kesamaan karakteristik geografis antar daerah yang tergabung*** dalam wilayah pembangunan tersebut. Karakteristik geografis tersebut meliputi jenis daerah (pantai, pegunungan atau daerah aliran sungai), kesuburan dan kesesuaian lahan, dan potensi sumberdaya alam. Bila aspek ini di jadikan sebagai dasar utama penetapan wilayah pembangunan, maka wilayah tersebut dapat dinamakan sebagai *wilayah fungsional*. Aspek ini sangat penting dalam penentuan wilayah pembangunan agar kebijakan yang ditetapkan akan dapat di dukung oleh kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam wilayah bersangkutan, sehingga pertumbuhan ekonommi wilayah menjadi lebih cepat.
4. ***Kesatuan wilayah administrasi pemerintahan antara provinsi, kabupaten dan kota*** yang tergabung dalam wilayah pembangunan bersangkutan. Bila pertimbangan merupakan unsur utama yang melandasi pembentukan wilayah pembangunan tersebut, maka wilayah ini dinamakan sebagai wilayah perencanaan (planing region). Aspek kesatuan wilayah administrasi ini sangat penting artinya agar perumusan kebijakan dan perencanaan dapat terjamin pelaksanaannya karena sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Disamping itu, kesatuan wilayah administrasi ini juga sangat penting artinya untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan karena



umumnya data dan informasi statistik daerah disusun berdasarkan wilayah administrasi.

### **Pengembangan Ekonomi Basis**

Robinson (tahun 2005) mengemukakan sektor ekonomi basis dikembangkan dengan membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu wilayah atas : pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan) dan untuk menghindari kesalah pahaman disebut saja sector nonbasis.

Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis, sedangkan pekerjaan *service* (nonbasis) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Walaupun dalam kenyataannya perlu dilengkapi dengan kebijakan lain agar bisa digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang komprehensif.

Pada mulanya pengembangan basis ekspor hanya memasukkan ekspor murni ke dalam pengertian ekspor. Akan tetapi, kemudian orang membuat definisi ekspor yang lebih luas. Ekspor tidak hanya mencakup barang/jasa yang dijual ke luar daerah tetapi termasuk juga didalamnya barang atau jasa yang di beli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut.

Kegiatan local yang melayani pariwisata adalah pekerjaan basis karena mendatangkan uang dari luar daerah. Demikian pula kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir, dan swalayan yang melayani orang dari luar daerah adalah pekerjaan basis. Asrama militer biasanya juga dikategorikan sebagai pekerjaan basis karena mereka di bayar oleh pemerintah pusat. Jadi, pada pokoknya, kegiatan yang hasilnya di jual keluar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah adalah kegiatan basis, sedangkan

kegiatan service (nonbasis) adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri.

### **Keunggulan Komparatif Dan Location Question**

Robinson (tahun 2005) mengemukakan suatu daerah akan lebih beruntung jika mengkonsentrasikan diri (berspesialisasi) pada kegiatan produksi komoditi dengan biaya relatif lebih murah (efisien) dibanding dengan komoditi lain di wilayahnya, dan komoditi yang sama di daerah lain. Keunggulan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbandingan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Jika keunggulan tersebut dalam bentuk nilai tambah riil, maka dinamakan keunggulan mutlak (Absolut).

Biaya produksi yang relatif lebih murah ini ditentukan oleh harga faktor produksi yang berlaku di wilayah bersangkutan. Dan perbedaan harga faktor produksi antara wilayah ditentukan oleh tingkat kandungan relatif faktor produksi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Biaya produksi yang relatif rendah akan memungkinkan wilayah tersebut menetapkan harga hasil produksi yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perbedaan harga ini selanjutnya memungkinkan wilayah tersebut akan menjual produknya ke wilayah lain dimana harga barang yang sama relatif lebih tinggi. Dan perbedaan harga ini akan mendorong kegiatan perdagangan antara wilayah yang menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan prinsip tersebut maka wilayah terbelakang dan didominasi oleh kegiatan pertanian akan lebih diuntungkan jika berspesialisasi pada sektor pertanian dan menjual hasil produksi pertanian ke wilayah yang lebih maju yang sudah merupakan daerah industri. Dan sebaliknya daerah yang sudah maju yang memproduksi barang industri dengan lebih murah karena biaya produksi yang relatif lebih rendah, maka akan diuntungkan bila spesialisasi pada produk industri dan menjual hasil produksinya ke wilayah agraris. Jika hal ini dilakukan maka kedua belah pihak akan sama-sama memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut.

Factor-faktor yang bisa membuat suatu daerah memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dapat berupa kondisi alam, yaitu sesuatu yang sudah *given* tetapi

dapat juga karena usaha-usaha manusia. Suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif karena salah satu factor atau gabungan dari beberapa factor yang akan diuraikan berikut ini. Factor-faktor yang dapat membuat sesuatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pemberian alam, antara lain deposit bahan tambang (minyak, gas, emas, bijih besi, timah, danlainnya); kondisi tanah yang khas (misalnya tanah Deli untuk produksi tembakau Deli); pemandangan yang indah (misalnya danau Toba dan alam pegunungan Karo); serta potensi alam (misalnya air terjun untuk pembangkit listrik dan sumber air panas untuk pembangkit listrik).
2. Masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir (menemukan hal-hal baru) untuk jenis produk tertentu, contoh : masyarakat Jepang, Amerika, dan Jerman.
3. Masyarakat menguasai keterampilan khusus, misalnya ukiran Jepara, ukiran Bali, dan kain songket batu bara.
4. Wilayah itu dekat denga pasar, misalnya lokasi pabrik batu bara di sekitar Lubuk Pakam dan tanjung Morawa karena dekat dengan pasar, yaitu Medan.
5. Wilayah dengan akseibilitas yang tinggi, karena memiliki angkut darat, laut, maupun udara, yang membuat angkutan barang maupun penumpang bisa lebih cepat, tepat waktu, dan lebih murah karena banyak pilihan.
6. Daerah konsentrasi/sentra dari suatu kegiatan sejenis, misalnya produksi sepatu di Cibaduyut (Jabar), kakao di luwu sulsel, sayur-mayur di Gowa (sulsel). Daerah sentra bisa menjamin kepastian adanya barang dalam kualitas dan kuantitas yang diinginkan dan ini bisa menurunkan biaya pemasaran/biaya transportasi.
7. Daerah agglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu memanfaatkan keuntungan agglomerasi, yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran.
8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung. Pengertian upah buruh yang rendah adalah relatif, artinya harus dikaitkan dengan produktivitas.

9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan : jujur, terbuka, mau bekerja keras, dan disiplin sehingga lingkungan kehidupan ama, tertib, dan teratur. Kondisi masyarakat seperti ini akan menjamin kelangsungan investasi, biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah dan efisien.
10. Kebijakan pemerintah, antara lain dengan menciptakan salah satu/beberapa factor yang menciptakan keunggulan seperti disebutkan di atas. Ada juga cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan subsidi untuk mendorong sector tertentu. Akan tetapi, hal ini haruslah bersifat sementara sehingga akhirnya bisa bersaing tanpa subsidi. Selama pemerintah masih memberikan subsidi, keunggulan tersebut adalah keunggulan semu. System subsidi ini sering membuat pihak luar negeri, pembeli barang menuduh tidak *fair* dan mencurigai adanya praktik dumping.

Keunggulan komparatif daerah dapat diukur dengan menggunakan Location Question (LQ). metode LQ merupakan suatu alat yang dapat mengukur besarnya peranan suatu sektor industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan industri tersebut secara nasional. Banyak variabel ekonomi yang dapat diukur dengan metode ini, selain PDRB juga jumlah lapangan kerja. Namun penulis lebih menyoroiti keunggulan komparatif dari sisi PDRB.

Robinson merumuskan untuk mengukur keunggulan komparatif dengan menggunakan Location Question (LQ) adalah :

$$LQ = \frac{x_i/PDRB}{X_i/PNB}$$

Dimana :

$x_i$  = nilai tambah sektor i di suatu daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut

$X_i$  = Nilai tambah sektor i secara nasional

PNB = Produk Nasional Bruto atau GNP.

Wilayah nasional dapat diartikan sebagai wilayah induk/layah atasan. Apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan provinsi, maka wilayah provinsi adalah wilayah atasan. Jika  $LQ > 1$  artinya, peran sektor tersebut lebih menonjol dibanding peran sektor yang sama terhadap nasional atau daerah induknya. Sebaliknya jika  $LQ < 1$ , maka peran sektor itu di daerah tersebut lebih kecil terhadap peran sektor tersebut secara nasional. Jika koefisien  $LQ$  daerah tersebut lebih besar dari satu maka daerah itu dapat berspesialisasi pada sektor tersebut dan ekspor produk tersebut ke daerah lain yang tidak mempunyai keunggulan komparatif terhadap produk itu. Daerah yang mempunyai keunggulan komparatif, mampu menghasilkan produk yang lebih murah dan lebih efisien, sehingga lebih menguntungkan baik bagi daerah asal produk maupun bagi daerah tujuan ekspor.

### **Strategi Pembangunan ekonomi Daerah**

Titik berat pembangunan nasional maupun daerah masih tetap bertumpuh pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut menurut Sjafrizal (tahun 2008) dapat menerapkan beberapa strategi pembangunan dibidang ekonomi sebagai berikut :

#### **(1). Strategi pengembangan komoditi yang mempunyai keunggulan kompetitif.**

Setiap daerah yang mempunyai keinginan untuk mencapai kemajuan dengan lebih cepat dibanding daerah lainnya maka salah satu strategi adalah berupaya mengembangkan keunggulan kompetitif daerah. Dalam era otonomi, masing-masing daerah untuk menentukan arah dan strategi pembangunan daerahnya sesuai potensi daerahnya. Sehingga terjadi persaingan antara daerah yang semakin tajam.

Konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, yang dikombinasikan dalam kegiatan usaha yang mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan demikian konsep keunggulan kompetitif tidak didasarkan pada pemilikan kandungan sumber daya alam semata, tetapi lebih pada inovasi dan kreatifitas

dalam menemukan metode baru, barang-barang baru dengan mutu relatif lebih baik dan harga yang relatif lebih murah.

**(2). Strategi pengembangan komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif.**

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan ekonomi daerah, didasarkan pada keunggulan komparatif daerah. Konsep keunggulan komparatif lebih dipilih oleh daerah yang hanya memiliki kemampuan sumber daya alam dan selanjutnya masing-masing daerah melakukan spesialisasi produksi pada sektor tertentu yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian komoditi tersebut dieksport ke daerah atau negara lain yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Dan sebaliknya daerah tersebut mengimport komoditi yang tidak memiliki keunggulan komparatif jika memproduksinya sendiri. Sehingga kedua daerah atau negara yang terlibat dalam perdagangan akan memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan tersebut.

**(3). Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET)**

Penentuan strategi dan kebijakan pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan potensi dan keterkaitan masing-masing sektor, tetapi juga harus memperhatikan keuntungan lokasi, karakter khusus daerah dan keterpaduan antara wilayah. Kegiatan produksi dapat dikembangkan melalui pemanfaatan potensi daerah yang didukung oleh keuntungan aglomerasi yang dapat meningkatkan efisiensi melalui penurunan biaya produksi. Keadaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penyediaan lapangan kerja masyarakat setempat.

Salah satu bentuk dari pendekatan pembangunan wilayah adalah melalui pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi cukup besar. Pengembangan KAPET ini didasarkan pada komoditi unggulan yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan yang selanjutnya dijadikan sebagai "*core business*". Selanjutnya dikembangkan pula dalam kawasan tersebut berbagai produk lain yang terkait langsung dengan komoditi unggulan baik dari segi input maupun output. Ini berarti pengembangan kegiatan ekonomi dalam KAPET tersebut dilakukan melalui pendekatan *agribusiness* yang melibatkan kegiatan produksi pertanian, pengolahan dan pemasarannya. Sedangkan pengembangan

prasarana dan sarana kawasan tersebut di tentukan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan pada masing-masing KAPET tersebut.

#### **(4). Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Antar Daerah**

Dalam Era Otonomi Daerah, kerja sama ekonomi antar daerah menjadi semakin penting. Melalui kerja sama ini, kelebihan suatu daerah akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, sedangkan kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya. Dengan cara demikian, pemanfaatan sumberdaya yang tersedia akan menjadi lebih baik dan efisien sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dimasing-masing daerah akan dapat pula ditingkatkan. Pada tingkat propinsi dinamakan Wilayah Pembangunan (WP) yang menggabungkan beberapa kabupaten dan kota yang saling terkait.

Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota juga terdapat pula sub wilayah pembangunan (SWP) yang menggabungkan beberapa kecamatan yang potensinya relatif sama dan kegiatan sosial ekonominya saling terkait satu sama lainnya.

Untuk kerja sama antar daerah dalam negeri, diarahkan pada bidang perencanaan dan pelaksanaan proyek yang lokasinya melintasi beberapa daerah. Kerja sama dibidang ekonomi diarahkan dalam rangka mendorong pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak. Untuk hal tersebut pemerintah daerah diharapkan bertidak menjadi fasilitator, memberi arah dan mengawasi masing-masing daerah agar selalu tetap mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

#### **(5). Pembangunan Ekonomi Kota**

Pembangunan ekonomi kota merupakan unsur penting dalam pembangunan wilayah. Alasannya jelas karena kota umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi sektor modern, yaitu: industri, perdagangan dan jasa. Kegiatan ini mempunyai kaitan yang erat dengan sektor pertanian baik sebagai penyedia bahan baku, maupun sebagai pasar. Ini berarti terdapat kaitan yang erat antara perekonomian kota dan wilayah yang umumnya merupakan daerah pertanian.

Karena itu, banyak pemikiran para ahli ekonomi regional dalam beberapa literatur tidak salah kiranya menjelaskan bahwa kota mempunyai peran sebagai pusat

pelayaran, juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu.

#### **(6). Pengembangan Ekonomi Desa**

Sebagaimana halnya dengan pembangunan kota, pembangunan desa juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi desa perlu dilakukan secara terpadu dengan pembangunan ekonomi kota. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang saling menunjang sehingga pembangunan wilayah secara keseluruhan akan dapat pula ditingkatkan. Biasanya desa berfungsi sebagai sumber bahan baku, sumber tenaga kerja dan sekaligus juga sebagai pasar dari produk-produk sektor industri dan jasa yang dihasilkan oleh kota. Karena itu, keterkaitan sosial-ekonomi desa dan kota perlu terus dibina dan dikembangkan agar terwujud pembangunan yang saling menunjang dalam suatu provinsi.

#### **Kebijakan Mengatasi Disparitas Antara Daerah**

Untuk membangun keterkaitan antar wilayah dan mengurangi terjadinya disparitas antar wilayah, dapat dilakukan antara lain:

(1). Mendorong pemerataan investasi

Investasi harus terjadi pada semua sektor dan semua wilayah secara simultan sehingga infrastruktur wilayah bisa berkembang.

(2). Mendorong pemerataan permintaan (*demand*)

Setiap industry dan wilayah harus dikembangkan secara simultan sehingga bisa mencapai *demand* untuk tiap-tiap produk.

(3). Mendorong pemerataan tabungan

Tabungan sangat diperlukan untuk bisa memacu investasi. Apabila jumlah tabungan di suatu wilayah meningkat, maka potensi investasi juga akan meningkat.

Disparitas antar daerah dapat ditanggulangi dengan beberapa tahapan reformasi ekonomi yang memperhatikan dimensi spasial, yaitu:



### **Tahap Pertama**

1. Redistribusi aset (tanah, kapital, finansial, dan lain-lain)
2. Pengembangan lembaga dan pasar financial di wilayah pedesaan
3. Kebijakan insentif lapangan kerja yang membatasi migrasi penduduk dari desa ke kota
4. Kebijaksanaan mempertahankan nilai tukar (*exchange-rate policy*) yang mendorong ekspor pertanian menjadi selalu kompetitif.
5. Pengendalian sebagian (*partial controlled*) melalui kebijaksanaan perpajakan dan monitoring kepada lalu lintas devisa dan modal.

### **Tahap kedua**

1. Pembangunan regional berbasis pada pemanfaatan sumberdaya wilayah/kawasan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing wilayah.
2. Kebijaksanaan (insentif fiskal) mendorong produksi dan distribusi lokasi kegiatan ekonomi ke arah wilayah pedesaan
3. Investasi dalam *human capital* dan *social capital* serta teknologi berbasis pedesaan yang lebih kuat dengan membangun *trust fund* di daerah-daerah untuk dapat membiayai pembangunan dua kapital di atas
4. Industrialisasi berbasis di wilayah perdesaan/pertanian (melalui pembangunan system mikropolitan atau agropolitan), seperti:
  - Industri pengolahan makanan dan pakan
  - Industri pengolahan pertanian lain
  - Industri peralatan dan input-input pertanian, serta barang konsumsi lain.

### **Teori Lokasi Industri**

Menentukan lokasi untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi memerlukan pertimbangan yang yang matang. Ada beberapa faktor yang menentukan suatu lokasi dapat dipilih sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi suatu daerah.

- 1). Faktor ketersediaan input lokal.

Ketersediaan input lokal baik secara permanen ada disuatu lokasi seperti ketersediaan lahan, iklim, kualitas air, kualitas udara, lingkungan, yang dapat disediakan secara lokal, atau tidak bergantung pada alokasi input dari daerah lain.

- 2). Ketersediaan input yang bisa cepat diakses dari daerah lain pada batas tertentu sesuai kebutuhan maka akan sangat mempengaruhi penentuan lokasi sebagai pusat pengembangan ekonomi suatu daerah.
- 3). Permintaan Terhadap output yang dihasilkan dari daerah tersebut, baik permintaan yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah. Permintaan dari luar daerah merupakan penerimaan bersih yang sudah diperhitungkan dengan biaya transfer atau biaya transportasi dari lokasi tersebut ke daerah pasar.

Penentuan Lokasi industri dapat kita lakukan dengan beberapa pendekatan :

#### **Pendekatan Biaya Minimum dari Alfred Weber**

Alfred Weber dalam sjafrizal (tahun 2008) mengemukakan teorinya tentang penentuan lokasi kegiatan industri didasarkan pada prinsip biaya minimum atau biaya terkecil. Menurut Weber ada tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi industri, yaitu : (1) Biaya transportasi, (2) biaya tenaga kerja, (3) kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi.

Weber menyatakan bahwa penentuan setiap lokasi industri tergantung pada total biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Dimana total biaya minimum tersebut adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Biaya tenaga kerja dan biaya upah tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental menentukan lokasi industri. Kekuatan aglomerasi merupakan kekuatan lokal yang berpengaruh menciptakan konsentrasi atau pemencaran berbagai kegiatan dalam ruang.

Menurut Weber biaya transportasi merupakan faktor utama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat dimodifikasi lokasi. Biaya transportasi bertambah proporsional dengan jarak. Jadi titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan

distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat lokasional adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ketempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan diangkut ketempat pasar.

Berat total terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut kelokasi pabrik. Biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh dan berat barang. Sehingga yang membuat biaya terkecil adalah bobot total pergerakan pengumpulan berbagai input dan pendistribusian output ke lokasi pasar adalah minimum.

Untuk menunjukkan bahwa lokasi tersebut optimum terhadap sumber bahan mentah dengan pasar, maka Weber mengemukakan suatu indeks yang disebut dengan indeks bahan (material index). Indeks bahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Bahan (Ib)} = \frac{\text{Berat Bahan mentah Lokal}}{\text{Berat Produksi Akhir}}$$

Bila indeks bahan  $Ib > 1$  artinya bahwa perusahaan tersebut lebih berorientasi ke bahan mentah. Sedangkan jika indeks bahan  $< 1$  berarti perusahaan lebih berorientasi kepada pasar.

Teori Weber mendapat kritikan dari berbagai kalangan seperti kritik terhadap (1) bahwa biaya transportasi dan biaya produksi bersifat konstan, (2) tidak memperhatikan faktor kelembagaan seperti kebijakan pemerintah daerah tentang perpajakan lokal, (3) terlalu menekan pada sisi input.

Dalam teorinya Weber berasumsi :

- (a) daerah yang menjadi obyek studi adalah daerah yang terisolasi, iklim yang homogen, dengan konsumen yang terkonsentrasi pada pusat tertentu, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna,
- (b) beberapa sumber daya alam seperti tanah, air dapat diperoleh dimana saja (ubikuitas), dalam jumlah yang memadai,
- (c) material lainnya seperti minyak bumi dan mineral lainnya hanya dapat diperoleh pada tempat-tempat tertentu, atas terbatas.

(d) tenaga kerja tidak bersifat ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas

#### **Pendekatan Lokasi Pasar dari August Losch.**

**Losch dalam Sjafrizal (tahun 2008)** melihat masalah ini dari sisi permintaan (pasar). Losch mengatakan bahwa lokasi sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, makin enggan konsumen membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Disisi lain produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini seperti juga dengan pandangan Christaller. Losch menyarankan agar lokasi industri berada dipasar atau dekat pasar.

Namun demikian perlu dicatat bahwa industri dikota dapat merusak lingkungan kota, sehingga pemerintah melarang mendirikan industri didalam kota. Dengan demikian, lokasi industri harus didirikan dipinggir kota atau bahkan berada diluar kota tetapi membuka kantor pemasaran didalam kota. Artinya lokasi industri tersebut merupakan bagian dari kegiatan kota atau memanfaatkan range atau wilayah dari kota tersebut.

#### **Pendekatan Keuntungan Maksimum**

Teori Weber melihat penentuan lokasi dari sisi kegiatan produksi. Dari sisi produksi melihat lokasi dari sisi biaya terkecil, sedangkan teori Losch melihat lokasi dari sisi permintaan (pasar). Dari sisi permintaan pada penerimaan maksimal yang dapat diperoleh. Kedua pendapat ini perlu digabung menjadi satu teori, yaitu menentukan lokasi industri dengan melihat keuntungan yang maksimal.

Isard dalam Robinson (thn 2005) lokasi industri merupakan menyeimbang antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan kepada situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Keuntungan relatif dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi oleh faktor dasar seperti : (1) biaya input atau bahan baku, (2) biaya transportasi, dan (3) keuntungan **aglomerasi**. Diantara berbagai biaya tersebut, jarak dan aksesibilitas merupakan pilihan terpenting dalam konteks tata ruang. Biaya transportasi merupakan fungsi dari jarak. Jadi Isard

menekankan pada faktor jarak dan aksesibilitas dan keuntungan aglomerasi sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan lokasi.

Richardson (tahun 2001) mengemukakan bahwa aktifitas ekonomi atau perusahaan lebih cenderung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimumkan resiko. Faktor unsur ketidakpastian minimum dapat diperoleh pada pusat kegiatan sehingga keputusan lokasi ada pada kriteria lain dari biaya dan keuntungan. Menurut Richardson kenyamanan dan keuntungan aglomerasi merupakan penentu lokasi yang penting, dari pada sumber daya alam dan sumber tenaga kerja dengan upah rendah.

Secara komprehensif menekankan pada pemilihan lokasi industri cenderung mempertimbangkan penyediaan input dan besarnya pasar yang dihadapi. Semakin besar suatu kota, tidak hanya penyediaan input yang semakin besar melainkan juga tersedianya pasar yang luas. Ketersediaan bahan baku, upah tenaga kerja yang murah, daya serap pasar lokal, akses dari tempat produksi ketempat pemasaran yang lebih luas adalah faktor yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha. Sikap politik yang respons terhadap usaha industry, keamanan dan nyaman dalam investasi, peraturan daerah yang pro pada pengembangan usaha dan pajak yang ringan adalah faktor menentukan para pengusaha untuk memilih lokasi industry.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I dkk. 1987. *Mengkaji ulang strategi-strategi Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arief Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arsyad L. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi*. Penerbit Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta.
- Bintoro. 1984. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta.
- Badrudin R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Galbraith, J. 1983. *The Nature of Mass Poverty*. Penerbit sinar harapan, jakarta.
- Hollis B. Chenery. 1959, *Interindustry Economics. Economics The Rand Corporation. Economicst Associate Professor of Economics*
- Richardson H. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jhingan. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Lewis, A. 1950. *The Principles of Economic Planning*. Penerbit George Allen & Unwin LTD, London.
- Myrdal G. 1971. *The Challenge of Word Poverty*. Published in Pelican Books. England.
- Mankiw G. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Martani H. 2001. *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*. Penerbit Istitecs.

- Poli W.I.M. 1975. *Perbandingan Teori Pembangunan*. Penerbit Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Poli W.I.M. 2010. *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Penerbit Brilian Internasional. Surabaya.
- Rostow W. 1965. *Tahap-tahap pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit Bharata, Jakarta.
- Robinson. T. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Salim E. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Penerbit Inti Idayu Press. Jakarta.
- Sadono S. 2000. *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Penerbit baduose media, Sumatra Barat.
- Tinbergen J. 1967. *Development Planning*. World Univercity Library, New York Toronto.
- Todaro. 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Penerbit CV. Intermedia, Jakarta.
- Todaro. M. 2002. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tambunan, 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta





